



# JURNAL RISET AKUNTANSI DAN AUDITING

MAGISTER AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI UNSRAT

## Goodwill

VOLUME 6 – NOMOR 1, JUNI 2015

**PENGARUH KECAKAPAN PROFESIONAL, INDEPENDENSI DAN LAMA BEKERJA TERHADAP HASIL PEMERIKSAAN AUDITOR INTERNAL PADA INSPEKTORAT KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI SULAWESI UTARA**

Sandi Hasudungan Pasaribu, Jenny Morasa, Steven Tangkuman

**PENGARUH KINERJA KEUANGAN KABUPATEN/KOTA TERHADAP ALOKASI BELANJA MODAL DI PROVINSI SULAWESI UTARA**

Sylvia Febriany Gerungan, David Paul Elia Saerang, Winston Pontoh

**ANALISIS SISTEM AKUNTANSI INSTANSI PADA KANTOR PERWAKILAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL PROVINSI SULAWESI UTARA**

Yefie Ignasia Worung, Jenny Morasa, Jantje Tinangon

**ANALISIS KUALITAS APARAT PENGAWAS INTERN PEMERINTAH DALAM PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH (STUDI PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA)**

Josua H.R.Lumbantobing, David Paul Elia Saerang, Heince Wokas

**PENGARUH UKURAN PERUSAHAAN, PROFITABILITAS PERUSAHAAN, SOLVABILITAS PERUSAHAAN DAN LIKUIDITAS PERUSAHAAN TERHADAP PENUNDAAN AUDIT PADA PERUSAHAAN *CONSUMER GOODS* YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA**

Nikita Melisa Rattu, David Paul Elia Saerang, Grace Nangoi

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA ALOKASI UMUM TERHADAP ANGGARAN BELANJA MODAL DI PROVINSI SULAWESI UTARA**

Sandi Hasudungan Pasaribu, Jantje Tinangon

JURNAL RISET AKUNTANSI dan AUDITING Goodwill

- Pelindung : Prof. DR. D. P. E. Saerang, SE.,M.Com (Hons)
- Penanggungjawab : DR. Jullie J. Sondakh, SE.,MSi.,CPA  
DR. Agus T. Poputra, SE.,MM.,MA.,Ak
- PimpinanRedaksi : DR. Herman Karamoy, SE.,MSi.,Ak
- Reviewer : Prof. DR. D. P. E. Saerang, SE.,M.Com (Hons)  
DR. Ventje Ilat, SE.,MSi  
DR. Jenny Morasa, SE.,MSi.,Ak  
DR. Agus T. Poputra, SE.,MM.,MA.,Ak
- Redaksi : Lidia Mawikere, SE.,MSi.,Ak, CA  
Novi Budiarmo, SE.,MSA.,Ak, CA  
Winston Pontoh, SE.,MM.,Ak, CA  
HeinceWokas, SE.,MM.,Ak, CA  
Steven Tangkuman, SE.,MAk.,Ak, CA  
Meily Kalalo, SE.,MSA.,Ak, CA  
Christian Datu, SE.,MSi.,Ak, CA
- Operator Pelaksana : Andreita Agama, SE.,Ak  
Claudia W. M. Korompis, SE, MSA, Ak, CA  
Princilvanno A. Naukoko, SE, ME, MSA, Ak, CA
- Administrasi & Sirkulasi : Marnix Tuwongkesong, ST  
Ayu LestianiMandalling, SE
- Alamat Redaksi : Fakultas Ekonomi Universitas Sam Ratulangi Manado  
Jl. Kampus Bahu. Gedung Program Magister Akuntansi  
Telepon (0431) 823018

Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing Goodwill Diterbitkan Oleh Program Magister Akuntansi (MAKSI) Fakultas Ekonomi Universitas Sam Ratulangi Manado, dimaksudkan sebagai media pertukaran informasi, penelitian dan karya ilmiah antara pengajar, alumni, mahasiswa dan masyarakat pada umumnya. Jurnal ini terbit dua kali setahun yaitu bulan Juni dan Desember.

Redaksi menerima naskah yang belum diterbitkan oleh media dan tinjauan atas buku-buku akuntansi terbitan dalam dan luar negeri yang baru serta catatan/komentar atas artikel yang dimuat dalam jurnal ini. Surat-surat mengenai naskah yang diterbitkan, langganan, keagenan, dan lainnya dapat dialamatkan langsung ke redaksi.

# Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing

## Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi Unsrat



VOLUME 6 – NOMOR 1, JUNI 2015

ISSN. 2088-8899

---

Pengaruh Kecakapan Profesional, Independensi Dan Lama Bekerja Terhadap Hasil Pemeriksaan Auditor Internal Pada Inspektorat Kabupaten/Kota Di Provinsi Sulawesi Utara	1 – 11
Pengaruh Kinerja Keuangan Kabupaten/Kota Terhadap Alokasi Belanja Modal Di Provinsi Sulawesi Utara	12 – 29
Analisis Sistem Akuntansi Instansi Pada Kantor Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Sulawesi Utara	30 - 36
Analisis Kualitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah Dalam Pengawasan Keuangan Daerah (Studi Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara)	37 – 49
Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas Perusahaan, Solvabilitas Perusahaan Dan Likuiditas Perusahaan Terhadap Penundaan Audit Pada Perusahaan <i>Consumer Goods</i> Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia	50 – 60
Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Anggaran Belanja Modal Di Provinsi Sulawesi Utara	61 – 72

# PENGARUH KECAKAPAN PROFESIONAL, INDEPENDENSI DAN LAMA BEKERJA TERHADAP HASIL PEMERIKSAAN AUDITOR INTERNAL PADA INSPEKTORAT KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI SULAWESI UTARA

Sandi Hasudungan Pasaribu  
Jenny Morasa  
Steven Tangkuman

[sandihhasudungan@gmail.com](mailto:sandihhasudungan@gmail.com)

## ABSTRACT

*In the area of financial management supervision entrusted by the Government Internal Supervisory Apparatus (APIP) as an internal auditor eventually require attention to the quality of the examination done. Many factors affect the quality of audit reports become among other professional qualifications, independence and work experience. Professional qualifications and independence of the auditor is seen with regard to both the equality audit process and the audit results. Experienced auditors have advantages, including in terms of detecting errors, faults accurately understand, and look for the cause of the error.*

*The purpose of this study was to determine the effect of professional competence, independence, and long working against the results of an internal auditor at the District / City in the province of North Sulawesi.*

*Data collection methods used by the survey with a questionnaire containing a list of questions that are answered by the respondents selected that the internal auditor inspectorate. Data analysis techniques to test the hypothesis done using simple linear regression analysis and multiple linear regression were processed through SPSS ver 18.0.*

*Based on the research results simultaneously (F test) showed that professional skills variable (X1), Independence (X2), and longer working (X3) significantly affects the results of the internal auditor in the inspectorate districts / cities in North Sulawesi. As for the results of research partially (t test) showed that the professional competence and independence of the variables significantly influence the results of the internal auditor in the inspectorate districts / cities in North Sulawesi, while for the old variable work does not affect the results of the auditor on the inspectorate district / city in North Sulawesi Province.*

*Keywords: Professional Skills, Independence, length of work, Internal Auditor Examination Results.*

## I. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Tuntutan pelaksanaan akuntabilitas sektor publik terhadap terwujudnya *good governance* di Indonesia semakin meningkat. Tuntutan ini memang wajar, karena beberapa penelitian menunjukkan bahwa terjadinya krisis ekonomi di Indonesia ternyata disebabkan oleh buruknya pengelolaan (*bad governance*) dan buruknya birokrasi. Akuntabilitas sektor publik berhubungan dengan praktik transparansi dan pemberian informasi kepada publik dalam rangka pemenuhan hak publik. Sedangkan *good governance* menurut World Bank didefinisikan sebagai suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab dan sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, pencegahan korupsi baik secara politis maupun administratif, menciptakan disiplin anggaran, serta menciptakan kerangka hukum dan politik bagi tumbuhnya aktivitas usaha.

Terdapat tiga aspek utama yang mendukung terciptanya pemerintahan yang baik (*good governance*), yaitu pengawasan, pengendalian, dan pemeriksaan. Pengawasan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pihak di luar eksekutif, yaitu masyarakat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk mengawasi kinerja pemerintahan. Pengendalian (*control*) adalah mekanisme yang

dilakukan oleh eksekutif untuk menjamin bahwa sistem dan kebijakan manajemen dilaksanakan dengan baik sehingga tujuan organisasi dapat tercapai. Sedangkan pemeriksaan (*audit*) merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pihak yang memiliki independensi dan memiliki kompetensi profesional untuk memeriksa apakah hasil kinerja pemerintah telah sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Berkaitan dengan peran dan fungsi tersebut, Inspektorat Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara mempunyai tugas pokok dan fungsi yang dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 6 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 63 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Inspektorat Provinsi Sulawesi Utara adalah membantu Gubernur dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah provinsi, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintah daerah Kabupaten/Kota dan pelaksana urusan pemerintahan di daerah Kabupaten/Kota. Sedangkan fungsi dari Inspektorat yang pertama ; perencanaan program pengawasan, kedua; perumusan kebijakan dan fasilitas pengawasan, ketiga ; pemeriksaan, pengusutan, pengujian, dan penilaian tugas pengawasan, keempat; pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang pengawasan, kelima; penyelenggaraan urusan administrasi kesekretariatan, keenam ; pelaksanaan tugas lain yang diberikan Gubernur.

Kualitas hasil pemeriksaan yang dilaksanakan oleh aparat inspektorat Kabupaten/Kota (Provinsi Sulawesi Utara, Kota Manado, Inspektorat Kota Bitung, dan Kabupaten Minahasa Selatan) saat ini masih menjadi perhatian masyarakat, karena masih banyaknya temuan audit yang tidak terdeteksi oleh aparat inspektorat sebagai auditor internal, akan tetapi ditemukan oleh auditor eksternal yaitu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). BPK masih menemukan adanya kegiatan yang merugikan keuangan negara di Provinsi Sulawesi Utara, dan di sejumlah kabupaten/kota lain, bahkan di Kabupaten Minahasa Selatan (Tahun Anggaran 2010 dan Tahun Anggaran 2011) memperoleh penilaian *tidak wajar* dan *disclamer*, sedangkan Kota Manado pada Tahun Anggaran 2009, Tahun Anggaran 2010 memperoleh penilaian *tidak wajar* dan pada Tahun Anggaran 2011 memperoleh penilaian *disclamer*. Dalam laporan keuangan tersebut ditemukan masih adanya temuan-temuan berupa ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, kecurangan, ketidakpatuhan dalam pelaporan keuangan dan lemahnya pengendalian intern. Dengan adanya temuan BPK tersebut, berarti kualitas hasil pemeriksaan aparat inspektorat yang ada di Kabupaten/Kota Sulawesi Utara masih kurang baik.

## **1.2 Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang yang dikemukakan di atas, maka yang menjadi masalah pokok dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah kecakapan profesional berpengaruh terhadap hasil pemeriksaan auditor internal pada Inspektorat Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara?
2. Apakah independensi berpengaruh terhadap hasil pemeriksaan auditor internal pada Inspektorat Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara?
3. Apakah lama bekerja berpengaruh terhadap hasil pemeriksaan auditor internal pada Inspektorat Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara?
4. Apakah secara bersama-sama kecakapan profesional, independensi dan lama bekerja berpengaruh terhadap hasil pemeriksaan auditor internal pada Inspektorat Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk :

1. Mengetahui pengaruh kecakapan profesional terhadap hasil pemeriksaan auditor internal pada Inspektorat Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara?
2. Mengetahui pengaruh independensi terhadap hasil pemeriksaan auditor internal pada Inspektorat Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara?
3. Mengetahui pengaruh lama bekerja terhadap hasil pemeriksaan auditor internal pada Inspektorat Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara?

4. Mengetahui secara bersama-sama pengaruh kecakapan profesional, independensi dan lama bekerja terhadap hasil pemeriksaan auditor internal pada Inspektorat Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara?

#### 1.4 Manfaat Penelitian

Apabila tujuan penelitian ini dapat dipenuhi, maka manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Bagi Inspektorat, sebagai masukan dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah khususnya peranan Inspektorat dalam meningkatkan kinerjanya sebagai internal auditor/aparat pengawasan pengelolaan keuangan daerah dan dalam rangka mewujudkan *goodgovernance*, sehingga Inspektorat diharapkan dapat membuat program yang berkontribusi pada peningkatan kualitas, kapabilitas dan kinerjanya.
2. Bagi Akademisi, memberikan kontribusi pengembangan literatur akuntansi sektor publik di Indonesia terutama sistem pengendalian manajemen di sektor publik.

#### 1.5 Batasan Masalah Penelitian

Dalam hal melakukan penelitian, peneliti mempunyai keterbatasan, antara lain :

1. Batasan Aspek, penelitian ini dibatasi pada audit internal di lingkup pemerintahan, khususnya pada tugas dan fungsi Inspektorat Kabupaten/Kota di Sulawesi Utara.
2. Batasan Lokasi penelitian, pada lokasi penelitian terbatas di Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, Kota Manado, Kota Bitung, Kabupaten Minahasa Selatan.

## II. KERANGKA TEORITIS

### 2.1 *Grand Theory* : Teori Pengambilan Keputusan

Pengertian Pengambilan Keputusan dikemukakan oleh :

- a. Ralp C. Davis;
- b. Mary Follet;
- c. James A.F. Stoner.

Keputusan dapat dijelaskan sebagai hasil pemecahan masalah, selain itu juga harus didasari atas logika dan pertimbangan, penetapan alternatif terbaik, serta harus mendekati tujuan yang telah ditetapkan. Seorang pengambil keputusan haruslah memperhatikan hal-hal seperti; logika, realita, rasional, dan pragmatis.

#### 2.1.2 Definisi Audit

Definisi audit menurut PSAK – Tim Sukses UKT Akuntansi 2006 adalah suatu proses sistematis yang bertujuan untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti yang dikumpulkan atas pernyataan atau asersi tentang aksi-aksi ekonomi dan kejadian-kejadian dan melihat bagaimana tingkat hubungan antara pernyataan atau asersi dengan kenyataan dan mengkomunikasikan hasilnya kepada yang berkepentingan.

- **Tipe – tipe Audit :**

- a. **Audit Eksternal**
- b. **Audit Internal**

- **Jenis - jenis Auditor**

Auditor dapat dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu :

1. Auditor Independen atau Akuntan Publik
2. Auditor Intern
3. Auditor Pemerintahan

#### 2.1.3 Hasil Pemeriksaan Auditor

Hasil pemeriksaan auditor adalah probabilitas dimana seorang auditor menemukan dan melaporkan tentang adanya suatu pelanggaran dalam sistem akuntansi kliennya. Deis dan Giroux (1992) dalam Alim *dkk*, (2007:14) dalam penelitiannya terdapat empat hal dianggap mempunyai hubungan dengan kualitas hasil pemeriksaan yaitu :

1. Lama waktu auditor telah melakukan pemeriksaan terhadap suatu perusahaan (*tenure*), semakin lama seorang auditor telah melakukan audit pada klien yang sama maka kualitas audit yang dihasilkan akan semakin rendah.
2. Jumlah klien, semakin banyak jumlah klien maka kualitas audit akan semakin baik karena auditor dengan jumlah klien yang banyak akan berusaha menjaga reputasinya.
3. Kesehatan keuangan klien, semakin sehat kondisi keuangan klien maka akan ada kecenderungan klien tersebut untuk menekan auditor agar tidak mengikuti standar, dan ;
4. *Review* oleh pihak ketiga, kualitas audit akan meningkat jika auditor tersebut mengetahui bahwa hasil pekerjaannya akan direview oleh pihak ketiga.

#### 2.1.4 Kecakapan Profesional

Dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No. PER/05/M.PAN/03/2008 tanggal 31 maret 2008 tentang standar audit, auditor harus menggunakan keahlian profesionalnya dengan cermat dan seksama (*dueprofessionalcare*) dan secara hati-hati (*prudent*) dalam setiap penugasan. Sedangkan Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia No. 01 Tahun 2007 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara dinyatakan dalam pelaksanaan pemeriksa serta penyusunan laporan hasil pemeriksaan, pemeriksa wajib menggunakan kemahiran profesionalnya secara cermat dan seksama.

#### 2.1.5 Independensi

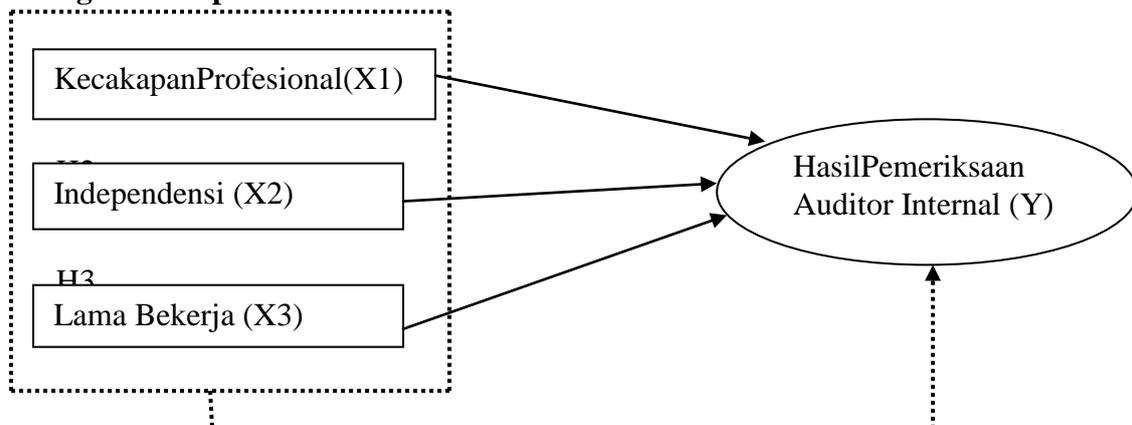
Menurut Messieretal(2005) dalam Efendy (2010), independensi merupakan suatu istilah yang sering digunakan oleh profesi auditor. Independensi menghindarkan hubungan yang mungkin mengganggu obyektivitas auditor. Dalam lampiran 2 SPKN disebutkan bahwa: “Gangguan pribadi yang disebabkan oleh suatu hubungan dan pandangan pribadi mungkin mengakibatkan pemeriksa membatasi lingkup pertanyaan dan pengungkapan atau melemahkan temuan dalam segala bentuknya.

#### 2.1.6 Lama Bekerja

Siagian (2008:20) menyatakan bahwa masa kerja/lama bekerja menunjukkan berapa lama seseorang bekerja pada masing-masing pekerjaan atau jabatan. Annesadkk (2011:7) menyatakan bahwa masa kerja yang lama akan cenderung membuat seorang pegawai lebih merasa betah dalam suatu organisasi, hal ini disebabkan diantaranya karena telah beradaptasi dengan lingkungannya yang cukup lama sehingga seorang pegawai akan merasa nyaman dengan pekerjaannya. Penyebab lain juga dikarenakan adanya kebijakan dari instansi atau perusahaan mengenai jaminan hidup di hari tua.

### III. KERANGKA KONSEPTUAL

#### 3.1 KerangkaKonseptual



Gambar 3.1 KerangkaKonseptual

#### 3.2 Hipotesis

Berdasarkan latar belakang masalah, rumusan masalah, landasan teori, dan kerangka konseptual yang dikemukakan maka dikembangkan hipotesis dengan penjelasan sebagai berikut :

- H<sub>1</sub> : Kecakapan profesional berpengaruh signifikan terhadap hasil pemeriksaan auditor internal pada Inspektorat Kabupaten/Kota di Sulawesi Utara.
- H<sub>2</sub> : Independensi berpengaruh signifikan terhadap hasil pemeriksaan auditor internal pada Inspektorat Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara.
- H<sub>3</sub> : Lama bekerja berpengaruh signifikan terhadap hasil pemeriksaan auditor internal pada Inspektorat Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara.

### 3.3. Model Analisis

Penelitian ini menggunakan metode induktif atau inferensia berupa metode analisis regresi linear berganda. Dengan menggunakan formula :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Keterangan :

Y	=	Hasil pemeriksaan auditor internal
$\alpha$	=	Konstanta
$\beta_1, \beta_2, \beta_3$	=	Koefisien regresi
X <sub>1</sub>	=	Kecakapan profesional
X <sub>2</sub>	=	Independensi
X <sub>3</sub>	=	Lama Bekerja
e	=	<i>error</i>

## IV. METODE PENELITIAN

### 4.1 Populasi dan Sampel

Objek populasi dari penelitian ini adalah auditor pada Inspektorat Propinsi Sulawesi Utara, Inspektorat Kota Manado, Inspektorat Kota Bitung, dan Inspektorat Kabupaten Minahasa Selatan.

Dalam penelitian ini peneliti mengambil auditor internal yang ada di lingkungan Inspektorat Provinsi Sulawesi Utara, Inspektorat Kota Manado, Inspektorat Kota Bitung, dan Inspektorat Kabupaten Minahasa Selatan. Karena lokasinya yang berdekatan dengan peneliti. Sehingga sampel dalam penelitian ini berjumlah 97 auditor internal.

### 4.2 Metode Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dengan metode pengumpulan datanya menggunakan daftar pertanyaan (kuesioner) terstruktur dengan tujuan untuk mengumpulkan informasi dari auditor pada Inspektorat Propinsi Sulawesi Utara, Inspektorat Kota Manado, Inspektorat Kota Bitung, Inspektorat Kabupaten Minahasa Selatan, dan sebagai responden dalam penelitian ini.

### 4.3 Klasifikasi Variabel dan Definisi Operasional Variabel

Dalam penelitian ini, variabel dependen (Y) yang digunakan adalah hasil pemeriksaanauditor internal, sedangkan variabel independennya terdiri dari kecakapan profesional (X<sub>1</sub>), independensi (X<sub>2</sub>), dan lama bekerja (X<sub>3</sub>).

Definisi operasional dan pengukuran untuk variabel-variabel tersebut adalah:

1. Hasil pemeriksaan auditor internal (Y) merupakan probabilitas bahwa auditor akan menemukan danmelaporkan pelanggaran pada sistem akuntansi pemerintah dengan berpedomanpada standar akuntansi dan standar audit yang telah ditetapkan. Indikator :kelemahan pengendalian intern, tanggapan dari *auditee*, kerahasiaan informasi, pendistribusian laporan hasil pemeriksaan (LHP), dan temuan dan rekomendasi hasil pemeriksaan harus ditindak lanjut oleh pimpinan. Instrumen yang digunakan untuk mengukur hasil pemeriksaan auditor internal ini diadopsi dari penelitian Rizal (2008) dengan beberapamodifikasi berdasarkan SPKN.
2. Kecakapan profesional (X<sub>1</sub>) dalam pemeriksaan merupakan pengetahuan, keahlian, dan pengalaman yang dibutuhkan auditor untuk dapat melakukan audit secara objektif, cermat dan seksama, dengan selalu mengikuti perkembangan mutakhir terhadap aturan-aturan yang berlaku. Indikator :telah mengikuti training akuntansi, audit dan pengalaman dalam melakukan pemeriksaan. Instrumen yang digunakan untuk mengukur kecakapan profesional ini diadopsi dari penelitian Rizal (2008) dengan beberapa modifikasi berdasarkan SPKN.

3. Independensi ( $X_2$ ) adalah pemeriksa tidak memiliki hubungan kerjasama dengan entitas atau program yang diperiksa, pemeriksa dalam melakukan pemeriksaan tidak mempunyai batasan waktu yang tidak wajar, organisasi pemeriksa harus bebas dari hambatan independensi, dan tidak ada campur tangan dari pihak ekstern mengenai penugasan, penunjukan dan promosi pemeriksa. Indikator :pemeriksa tidak memiliki kerja sama dengan yang diperiksa, tidak ada pembatasan waktu yang tidak wajar dalam pemeriksaan, organisasi pemeriksaan bebas dari hambatan independensi, dan tidak ada campur tangan pihak ekstern dalam pemeriksaan. Instrumen yang digunakan untuk mengukur independensi ini diadopsi dari penelitian Rizal (2008) dengan beberapa modifikasi berdasarkan SPKN.
4. Lama bekerja ( $X_3$ ) merupakan pengalaman individu yang akan menentukan pertumbuhan dalam pekerjaan dan jabatan serta keterampilan dan pengetahuan seseorang setelah mengerjakan suatu hal. Indikator :banyaknya tugas pemeriksaan yang telah dilakukan, pengalaman kerja dan banyaknya pelatihan yang telah diikutinya. Instrumen yang digunakan untuk mengukur kecakapan profesional ini diadopsi dari penelitian Sukriahdkk(2009) dengan beberapamodifikasi berdasarkan SPKN.

#### 4.4 Metode Analisis Data

Sebelum melakukan pengujian dengan regresi linear berganda, terlebih dahulu dilakukan Uji Asumsi Klasik, antara lain :Uji Normalitas, Uji Autokorelasi, Uji *Heterokedastisitas*, Uji Multikolinearitas, Analisis Regresi Linear Berganda, Koefisien Korelasi ( $R$ )&Determinasi ( $R^2$ ) dan Uji Hipotesis

### V. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### 5.1 Hasil Analisis

##### Uji Asumsi Klasik

##### Uji Normalitas

**Tabel 5.1 Test of Normality**

	Unstandardized Residual
df	87
Kolmogorov-Smirnov <sup>a</sup>	.068
Asymp. Sig. (2-tailed)	.200 <sup>a</sup>

Sumber :Hasil Olah Data SPSS, 2014

Dari Tabel diatas, terlihat bahwa nilai Sig. (2-tailed) dalam One-SampleKolmogorov-Smirnov Test adalah 0,200 ( $> 0,05$ ), sehingga  $H_0$  diterima. Ini berarti bahwa data yang diuji menyebar normal / terdistribusi normal.

##### Uji Autokorelasi

**Tabel5.2 Model Summary<sup>b</sup>**

Model	Durbin-Watson
1	1.649 <sup>a</sup>

Sumber :Hasil Olah Data SPSS, 2014

Berdasarkan pada diatas, nilai DW yang dihasilkan adalah sebesar 1,649, maka dapat disimpulkan bahwa data penelitian berada di daerah ragu-ragu.

##### Uji Multikolinearitas

**Tabel 5.3 Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Collinearity Statistic	
	Tolerance	VIF
KecakapanProfesional	.997	1.003
Independensi	.993	1.007
Lama Bekerja	.994	1.006

Sumber :Hasil Olah Data SPSS, 2014

Dengan melihat nilaiVIF pada tabel diatas, setiap variabel independen dibawah 10, yaitu kecakapan profesional sebesar 1,003, independensi sebesar 1.007, lama bekerja sebesar 1.006, maka dapat disimpulkan bahwa variabel penelitian bebas efek multikolinearitas.



## Uji Heteroskedastisitas

**Tabel 5.4 Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Sig.
1 (Constant)	.090
Kecakapan Profesional	.367
Independensi	.854
Lama Bekerja	.428

Sumber :HasilOlah Data SPSS, 2014

Berdasarkan diatas, nilai signifikansi untuk masing-masing variabel independen terhadap nilai absolute residual berada di atas 0,05, sehingga dapat disimpulkan tidak terdapat gejala heteroskedastisitas pada data penelitian ini.

## Analisis Regresi Linear Berganda

**Tabel 5.5 Coefficients<sup>a</sup>**

Model	B	t	Sig.
1 (Constant)	10.711	2.634	.011
Kecakapan Profesional	.576	4.220	.000
Independensi	.715	2.692	.009
Lama Bekerja	.108	1.104	.275

Sumber :HasilOlah Data SPSS, 2014

Dari Tabel di atas, maka dapat diketahui bahwa model regresi yang diperoleh adalah :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

$$Y = 10.711 + 0.576 X_1 + 0.715 X_2 + 0.108 X_3$$

## Koefisien Korelasi dan Determinasi

**Tabel 5.6 Model Summary**

Model	R Square	Adjusted Square
1	.289	.243

Sumber :HasilOlah Data SPSS, 2014

Berdasarkan diatas, dapat dilihat perbandingan hasil dari uji koefisien determinasi, dimana jika dilihat dari nilai adjusted R squarenya, hasil uji dengan variabel moderasi lebih baik daripada hasil uji tanpa variabel moderasi, hal tersebut dapat kita lihat dari perbandingan nilai adjusted R square.

Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel indepen (kecakapan profesional, independensi, dan lama bekerja) terhadap variabel dependennya (hasil pemeriksaan auditor internal) digunakan Nilai adjusted R<sup>2</sup> tanpa variabel moderasi yaitu sebesar 0,243, memiliki arti bahwa 24,3% perubahan hasil pemeriksaan auditor internal dapat dijelaskan oleh variabel kecakapan profesional, independensi, lama bekerja. Sedangkan sisanya 75,7% dipengaruhi oleh variabel lain diluar model.

### 5.3.6 Uji Hipotesis Hasil Uji F

**Tabel 5.7 ANOVA<sup>b</sup>**

Model	Sum of Square	Df	F	Sig.
1 Regression	88.281	3	6.240	.001 <sup>a</sup>
Residual	216.939	83		
Total	305.220	86		

Sumber :Hasil Olah Data SPSS, 2014

## Hasil uji t

**Tabel 5.8 Coefficients<sup>a</sup>**

Model	B	t	Sig.
1 (Constant)	10.711	2.634	.011
Kecakapan Profesional	.576	4.220	.000
Independensi	.715	2.692	.009
Lama Bekerja	.108	1.104	.275

Sumber :Hasil Olah Data SPSS, 2014

## **5.2 Pembahasan**

### **5.2.1 Pengaruh Kecakapan Profesional terhadap Hasil Pemeriksaan Auditor Internal**

Hipotesis pertama menyatakan bahwa kecakapan profesional berpengaruh signifikan terhadap hasil pemeriksaan auditor internal. Hasil pengujian statistik menunjukkan nilai signifikansi variabel kompetensi =  $0.000 < 0,05$ , maka dapat dinyatakan bahwa  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. secara parsial kecakapan profesional berpengaruh signifikan terhadap hasil pemeriksaan auditor internal.

Hasil penelitian ini mendukung hipotesis pertama bahwa kecakapan profesional berpengaruh terhadap kualitas hasil pemeriksaan. Hal ini berarti kualitas hasil pemeriksaan dapat dicapai jika auditor memiliki kecakapan profesional yang baik. Kecakapan profesional tersebut terdiri dari dua dimensi yaitu pengalaman dan pengetahuan. Auditor sebagai ujung tombak pelaksanaan tugas audit memang harus senantiasa meningkatkan pengetahuan yang telah dimiliki, agar penerapan pengetahuan dapat maksimal dalam praktiknya. Penerapan pengetahuan yang maksimal tentunya akan sejalan dengan semakin bertambahnya pengalaman yang dimiliki. Sesuai dengan standar umum bahwa auditor disyaratkan memiliki pengalaman kerja yang cukup dalam profesi yang ditekuninya, serta dituntut untuk memenuhi kualifikasi teknis dan berpengalaman dalam bidang industri yang digeluti kliennya.

### **5.2.2 Pengaruh Independensi terhadap Hasil Pemeriksaan Auditor Internal**

Hasil statistic pada analisis regresi linier berganda, dapat dilihat bahwa nilai signifikansi variabel independensi ( $X_2$ )  $0,009 > 0,05$  maka dapat dinyatakan bahwa  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima, Dengan demikian independensi (variabel  $X_2$ ) berpengaruh signifikan terhadap hasil pemeriksaan auditor internal (variabel  $Y$ ).

Hasil pengujian hipotesis ini tidak sejalan dengan pendapat elfarini (2007), Sukriah *dkk* (2009), Dan Efendy (2010) yang menyimpulkan bahwa independensi berpengaruh tidak signifikan terhadap kualitas hasil pemeriksaan, sehingga independensi yang dimiliki aparat inspektorat tidak menjamin apakah yang bersangkutan akan melakukan audit secara berkualitas. Memang tidak mudah menjaga tingkat independensi agar tetap sesuai dengan jalur yang seharusnya. Diduga karena independensi aparat inspektorat masih terpengaruh dengan penentu kebijakan yang dapat mengintervensi hasil pemeriksaan, disamping itu kerjasama dengan klien yang terlalu lama bisa menimbulkan kerawanan atas independensi yang dimiliki auditor karena auditor dan *auditee* sama-sama di lingkungan pegawai yang sama sehingga menimbulkan hubungan interpersonal baik hubungan kekerabatan atau relasi kepentingan lainnya dan seringnya kepala daerah melakukan mutasi antar satuan kerja perangkat daerah. Belum lagi jika auditor melakukan pemeriksaan, mereka mendapatkan berbagai fasilitas yang disediakan *auditee* selama penugasan audit yang bisa saja mempengaruhi independensi dalam pemeriksaan, meskipun aparat acap kali mendapat fasilitas dari *auditee*, namun aparat tetap menganggap bahwa audit yang baik tetap harus dilaksanakan.

### **5.2.3 Pengaruh Lama Bekerja terhadap Hasil Pemeriksaan Auditor Internal**

Dari hasil perhitungan pada tabel 5.28 didapat nilai  $t$  hitung antara lama bekerja terhadap hasil pemeriksaan auditor sebesar 1.104 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,275. Dengan nilai signifikasinya yang lebih besar dari 0,05 maka variabel lama bekerja tidak berpengaruh terhadap hasil pemeriksaan auditor.

Hal ini menunjukkan beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya lama bekerja tidak berpengaruh terhadap hasil pemeriksaan auditor internal pada inspektorat kabupaten/kota di Sulawesi Utara karena kurangnya pelatihan/bimtek yang dilaksanakan oleh BPKP yang mana pelaksanaannya

cuma 2 kali dalam setahun sehingga minimnya pengetahuan auditor internal mengenai auditing dan masih sedikit latar belakang pendidikan auditor mengenai akuntansi dan audit, dan faktor lain adanya mutasi aparat auditor internal yang berpengalaman yang sudah mengikuti berbagai pelatihan terlebih dalam mengenai audit dan akuntansi sehingga digantikan dengan auditor yang tidak memiliki cukup pengalaman maka akan menyebabkan kualitas audit terhadap hasil pemeriksaan laporan keuangan rendah. Sesuai dengan tabel 5.5 (Komposisi Responden Lama Bekerja) menunjukkan auditor yang lama bekerja diatas 10 tahun masih sangat sedikit yaitu cuma 6 orang auditor, sedangkan lama bekerja auditor 4-6 tahun sangat besar yaitu 45 orang auditor, sehingga dapat disimpulkan bahwa auditor yang belum berpengalaman atau yang masih baru menjabat sebagai auditor internal pada inspektorat disebabkan karena adanya faktor politik dan hubungan keluarga sehingga menyebabkan penempatan sebagai aparat inspektorat di kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Utara tidak sesuai dengan keahlian/kompetensinya.

## VI. KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Kecakapan profesional berpengaruh terhadap hasil pemeriksaan auditor internal, sehingga semakin baik tingkat kecakapan profesional, seperti penguasaan standar akuntansi dan auditing, wawasan tentang pemerintahan dan pengalaman seperti yang didapat melalui training akuntansi dan training auditing maka akan semakin baik hasil pemeriksaan yang dilakukannya.
2. Independensi berpengaruh terhadap hasil pemeriksaan auditor internal, sehingga semakin meningkatnya independensi seorang auditor akan meningkatkan hasil pemeriksaan auditor internal, artinya kualitas audit dapat dicapai jika auditor memiliki independensi yang baik.
3. Lama bekerja tidak berpengaruh terhadap hasil pemeriksaan auditor, disebabkan karena kurangnya pelatihan/bimtek yang dilaksanakan untuk menunjang pengetahuan auditor dalam auditing dan akuntansi yang mana cuma 2 kali dalam setahun dilaksanakan, serta adanya mutasi aparat inspektorat kabupaten/kota di provinsi Sulawesi Utara yang sudah berpengalaman dan yang sudah mengikuti berbagai pelatihan dalam hal auditing dan akuntansi tergantikan dengan yang tidak memiliki cukup pengalaman, sehingga kualitas audit terhadap pemeriksaan laporan keuangan menjadi rendah.

### Saran

Setelah melakukan dan melihat hasil dari penelitian ini, maka penulis dapat memberikan beberapa saran. Adapun saran-saran tersebut adalah sebagai berikut :

1. Penempatan pegawai di lingkup Inspektorat Kabupaten/Kota di Sulawesi Utara sebaiknya berdasarkan fungsi dan keahlian yang dimiliki.
2. Peneliti menganjurkan agar penentu kebijakan perlu terus menjagadan meningkatkan keahlian aparat inspektorat melalui pemberian pelatihan-pelatihan/Bimtek sertakesempatan untuk mengikuti kursus-kursus atau peningkatan pendidikan profesi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agoes, Sukrisno. 2004. *Auditing (Pemeriksaan Akuntan)* Oleh Kantor Akuntan Publik. Jilid 1, Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Alim, M.N., T. Hapsari, dan L. Purwanti. 2007. *Pengaruh Kompetensi dan Independensi terhadap Kualitas Audit dengan Etika Auditor sebagai Variabel Moderasi*. Simposium Nasional Akuntansi X. Makassar.
- Direktorat Jenderal Keuangan Daerah (DJKD), 2013. *300 Kepala Daerah Terjerat Kasus Korupsi*, diakses 25 April 2014, [http://djkd.kemendagri.go.id/?jenis=news&p=detail\\_berita&id=861](http://djkd.kemendagri.go.id/?jenis=news&p=detail_berita&id=861)
- Effendi, Muh. Taufiq, 2010. *Pengaruh Kompetensi, Independensi, dan Motivasi Terhadap Kualitas Audit Aparat Inspektorat Dalam Pengawasan Keuangan Daerah (Studi Empiris pada Pemerintah Kota Gorontalo)*. (Tesis tidak dipublikasikan).
- Konsorsium Organisasi Profesi Audit Internal. 2004. *Standar Profesi Audit Internal*. Ditetapkan tanggal 12 Mei 2004. Berlaku mulai 1 Januari 2005. Jakarta. [www.internalauditing.or.id](http://www.internalauditing.or.id)

- Kuncoro, 2003. *Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi : Bagaimana Meneliti dan Menulis Tesis?*, Erlangga, Jakarta.
- Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia No. 01 Tahun 2007 tentang *Standar Pemeriksaan Keuangan Negara*. Badan Pemeriksaan Keuangan RI tahun 2007.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 64 Tahun 2007, tentang *Pedoman Teknis Organisasi dan Tata kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota*. Jakarta. 2007.
- No. 13 Tahun 2006, tentang *Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta. 2006.
- Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara nomor PER/05/M.PAN/03/2008. *Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah*. Jakarta.
- Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 6 Tahun 2011. Tentang *Uraian Tugas Inspektorat Provinsi Sulawesi Utara*.
- Rahman, Ahmad Taufik. 2009. Jurnal. *Persepsi Auditor Mengenai Pengaruh Kompetensi, Independensi dan Due Profesional Care Terhadap Kualitas Audit*. Fakultas Ekonomi Universitas Soedirman.
- Siagian, P. Sondang. 2004. *Audit Manajemen*. Penerbit Bumi Aksara.
- Tim Peneliti UNSRAT, Pemda SULUT, dan staf Bank Dunia, 2011. *Analisis Keuangan Publik Provinsi Sulawesi Utara 2011, Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pembangunan di Bumi Nyiur Melambai*. Kantor Bank Dunia Jakarta.
- Yayasan Pendidikan Internal Auditor. 2003. *Audit TI : Siapa yang Diuntungkan? E-Bizz Asia*. Vol. II No. 17. Mei-Juni.

# **PENGARUH KINERJA KEUANGAN KABUPATEN/ KOTA TERHADAP ALOKASI BELANJA MODAL DI PROVINSI SULAWESI UTARA**

**Sylvia Febriany Gerungan**  
**David P.E. Saerang**  
**Winston Pontoh**

sylviagerungan@gmail.com

## **ABSTRACT**

*The regional autonomy policy gives more chance to local government for managing their own financial. To determine the success of local government in managing their own financial, Financial Performance Analysis can be used. The objective of this research is to determine the influence of regional financial performance toward the capital expenditure allocation in forward years of regency/city of North Sulawesi. The data analysis method used in this research is regression. The results show that, simultaneously, the Regional Financial Independence ratio, Regional Financial Dependence ratio, Local Original Revenue Effectiveness ratio, Capital Expenditure Effectiveness ratio, Efficiency ratio, and Expenditure Harmony ratio significantly effect the Capital Expenditure Allocation. Partially, the Regional Financial Independence ratio and Efficiency ratio, significantly, have a negative effect toward the Capital Expenditure Allocation. While, the Local Original Revenue Effectiveness ratio and Expenditure Harmony ratio have a positive effect toward the Capital Expenditure Allocation. The Regional Financial Dependence ratio and Capital Expenditure Effectiveness have no significant effect toward the Capital Expenditure Allocation.*

*Keywords: Financial Performance, Regional Financial Independence, Regional Financial Dependence, Effectiveness, Efficiency, Expenditure Harmony, Capital Expenditure.*

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Sejak diberlakukannya Undang-Undang No. 22 tahun 1999 dan Undang-Undang No. 25 tahun 1999, yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang No. 32 tahun 2004 dan Undang-Undang No. 33 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah, kewenangan pemerintah daerah menjadi lebih besar dalam mengelola sumber daya dan keuangan daerahnya sendiri. Berkurangnya campur tangan pemerintah pusat diharapkan dapat meningkatkan kemandirian pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerahnya. Kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerahnya dapat diukur dengan analisis kinerja keuangan daerah. Kinerja keuangan terdiri dari rasio-rasio keuangan. Rasio-rasio keuangan ini digunakan untuk: menilai kemandirian keuangan daerah dalam membiayai penyelenggaraan otonomi daerah; mengukur efektivitas dan efisiensi dalam merealisasikan pendapatan daerah; mengukur sejauh mana aktivitas pemerintah daerah dalam membelanjakan pendapatan daerahnya; mengukur kontribusi masing-masing sumber pendapatan dalam pembentukan pendapatan daerah; melihat pertumbuhan/perkembangan perolehan pendapatan dan pengeluaran yang dilakukan selama periode waktu tertentu (Halim, 2007:230).

Seperti halnya rasio-rasio pada perusahaan swasta, rasio-rasio keuangan daerah merupakan perbandingan angka-angka dalam laporan keuangan pemerintah daerah. Namun, dikarenakan adanya perbedaan jenis dan struktur laporan keuangan pemerintah daerah dengan perusahaan swasta, maka rasio-rasio keuangan daerah memiliki sedikit perbedaan. Rasio-rasio yang lazim digunakan dalam analisis kinerja keuangan pemerintah daerah, merupakan perbandingan angka-angka dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Rasio-rasio yang sering digunakan dalam analisis kinerja keuangan pemerintah daerah adalah Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas PAD, Rasio Efisiensi Keuangan Daerah, Rasio Keserasian Belanja Dan Rasio Pertumbuhan.

Kinerja pengelolaan keuangan daerah di Provinsi Sulawesi Utara secara umum berada di atas rata-rata. Pendapatan pemerintah daerah Sulawesi Utara terus meningkat, namun sebagian besar pendapatan tersebut merupakan dana perimbangan dari pemerintah pusat. Komposisi belanja pemerintah daerah secara umum mengalami perbaikan di mana porsi belanja modal terus meningkat, namun komposisi belanja terbesar masih didominasi oleh belanja pegawai. Pendapatan Asli Daerah (PAD) kabupaten dan kota di Sulawesi Utara relatif rendah dan ketergantungan pendapatan akan transfer pemerintah pusat semakin besar. Hal ini kurang selaras dengan tujuan otonomi daerah. Pemerintah provinsi dan kebanyakan kabupaten dan kota di Sulawesi Utara memiliki SiLPA yang besar. Ini menggambarkan bahwa pemerintah daerah kurang dapat menyerap anggaran yang ada dan masih bisa melakukan program dan kegiatan yang penting dalam pelayanan kepada masyarakat (Bank Dunia, 2011).

Belanja modal merupakan angka yang memberi gambaran tentang upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan pembangunan daerahnya. Untuk mendorong pembangunan daerah dan pertumbuhan ekonomi, pemerintah daerah perlu memberikan porsi yang lebih besar pada belanja modal dalam komposisi belanja daerah. Belanja modal yang disebut juga belanja pembangunan, mempunyai dampak positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Menurut Priyo Hari Adi (2006) pertumbuhan ekonomi yang selama ini terjadi sangat ditentukan oleh faktor belanja pembangunan daerah. Pembangunan infrastruktur dan fasilitas-fasilitas publik dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan dapat menjadi daya tarik bagi para investor. Hal ini dapat memberikan peluang pada peningkatan pendapatan per-kapita daerah dan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Semakin besar alokasi belanja modal berarti pemerintah semakin serius dalam membangun daerah dan mensejahterakan masyarakat. Namun saat ini komposisi belanja masih didominasi oleh belanja operasional terutama belanja pegawai. Pada kabupaten dan kota Provinsi Sulawesi Utara porsi belanja modal masih tergolong kecil dibandingkan dengan belanja operasional. Rasio belanja modal terhadap total belanja tahun 2011 rata-rata untuk semua kabupaten/kota Provinsi Sulawesi Utara adalah 27,69%, dan rasio belanja modal terbesar ada di kabupaten Bolaang Mongondow Timur yaitu sebesar 49,16%.

Penelitian ini dilakukan untuk melihat pengaruh kinerja keuangan terhadap alokasi belanja modal pada kabupaten dan kota provinsi sulawesi utara. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini meliputi: Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah, Rasio Efektifitas PAD, Rasio Efektivitas Belanja Modal, Rasio Efisiensi Keuangan Daerah, Dan Rasio Keserasian Belanja. Beberapa variabel telah digunakan oleh penelitian-penelitian sebelumnya, seperti Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas PAD, dan Rasio Efisiensi. Sedangkan beberapa variabel ditambahkan untuk memperluas referensi tentang rasio-rasio yang memiliki pengaruh terhadap pengalokasian belanja modal. Rasio Efektivitas Belanja Modal ditambahkan, untuk melihat apakah semakin efektif penyerapan anggaran belanja modal akan mempengaruhi penetapan anggaran belanja modal tahun berikutnya. Rasio Keserasian belanja ditambahkan untuk melihat apakah pengalokasian belanja modal dipengaruhi oleh tren belanja modal di tahun-tahun sebelumnya.

## **1.2. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang dapat diformulasikan beberapa masalah antara lain sebagai berikut:

- 1) Apakah Kemandirian Keuangan Daerah berpengaruh secara signifikan terhadap Alokasi Belanja Modal?
- 2) Apakah Ketergantungan Keuangan Daerah berpengaruh secara signifikan terhadap Alokasi Belanja Modal?
- 3) Apakah Efektivitas PAD berpengaruh secara signifikan terhadap Alokasi Belanja Modal?
- 4) Apakah Efektivitas Belanja Modal berpengaruh secara signifikan terhadap Alokasi Belanja Modal?
- 5) Apakah Efisiensi Keuangan Daerah berpengaruh secara signifikan terhadap Alokasi Belanja Modal?
- 6) Apakah Keserasian Belanja berpengaruh secara signifikan terhadap Alokasi Belanja Modal?

- 7) Apakah Kemandirian Keuangan Daerah, Ketergantungan Keuangan Daerah, Efektivitas PAD, Efektivitas Belanja Modal, Efisiensi, dan Keserasian Belanja berpengaruh secara signifikan terhadap Alokasi Belanja Modal?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memperoleh bukti empiris bahwa:

- 1) Kemandirian Keuangan Daerah berpengaruh terhadap Alokasi Belanja Modal
- 2) Ketergantungan Keuangan Daerah berpengaruh terhadap Alokasi Belanja Modal
- 3) Efektivitas PAD berpengaruh terhadap Alokasi Belanja Modal
- 4) Efektivitas Belanja Modal berpengaruh terhadap Alokasi Belanja Modal
- 5) Efisiensi Keuangan Daerah berpengaruh terhadap Alokasi Belanja Modal
- 6) Keserasian Belanja berpengaruh terhadap Alokasi Belanja Modal
- 7) Kemandirian Keuangan Daerah, Ketergantungan Keuangan Daerah, Efektivitas PAD, Efektivitas Belanja Modal, Efisiensi Keuangan Daerah, Keserasian Belanja berpengaruh terhadap Alokasi Belanja Modal.

### **1.4. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

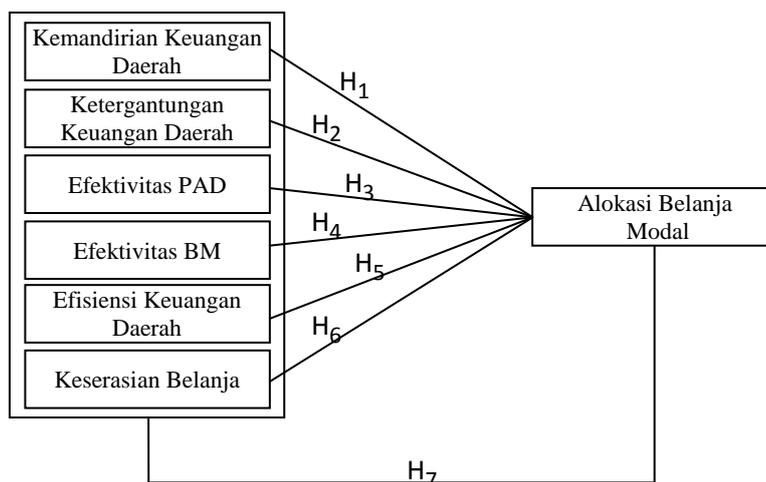
- 1) Bisa menjadi bahan pertimbangan bagi para pengambil kebijakan di jajaran pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Utara dalam pengelolaan keuangan daerah, khususnya dalam hal peningkatan kinerja keuangan daerah dan dalam hal pengalokasian belanja modal.
- 2) Dapat menambah literatur bagi pihak-pihak yang akan melakukan studi terkait atau penelitian selanjutnya.

### **1.5. Tinjauan Pustaka**

Ardhini dan Handayani (2011) melakukan penelitian tentang pengaruh rasio keuangan daerah terhadap belanja modal untuk pelayanan publik dalam perspektif teori keagenan. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: kemandirian daerah, efektivitas keuangan daerah, efisiensi keuangan daerah, dan Silpa. Sedangkan Variabel dependennya adalah belanja modal dan pertumbuhan ekonomi. Dari pengujian yang dilakukan dengan analisis regresi berganda diperoleh hasil yang menyatakan bahwa rasio kemandirian berpengaruh positif tidak signifikan terhadap rasio belanja modal untuk pelayanan publik. Sedangkan rasio efektivitas dan SiLPA berpengaruh positif signifikan terhadap alokasi belanja modal untuk pelayanan public. Rasio Efisiensi berpengaruh negatif namun signifikan terhadap alokasi belanja modal untuk pelayanan public.

Penelitian yang dilakukan Sularso dan Restianto (2011) pada kabupaten/kota di Jawa Tengah bertujuan untuk menganalisis pengaruh kinerja keuangan terhadap alokasi belanja modal dan pertumbuhan ekonomi. Penelitian ini menggunakan metode *Structural Equation Modeling* (SEM), dengan sampel seluruh kabupaten/kota di Jawa Tengah yang berjumlah 35 kabupaten/kota. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengalokasian belanja modal yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota di Jawa Tengah dipengaruhi oleh kinerja keuangan khususnya rasio ketergantungan keuangan, rasio kemandirian keuangan, rasio efektivitas PAD dan derajat kontribusi BUMD. Sebaliknya rasio derajat desentralisasi tidak memiliki pengaruh terhadap alokasi belanja modal. Lebih lanjut alokasi belanja modal memberikan pengaruh yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini berarti bahwa salah satu fungsi anggaran pemerintah daerah yakni sebagai stimulus perekonomian telah berjalan. Hasil analisis mengindikasikan bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi secara tidak langsung adalah kinerja keuangan daerah. Pengaruh tidak langsung terbesar adalah efektivitas PAD. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa dengan otonomi daerah, muncul indikator lain yang mendukung pertumbuhan ekonomi yaitu kinerja keuangan daerah.

## 1.6. Kerangka Konseptual



## 1.7. Hipotesis

- H1 : Kemandirian Keuangan Daerah berpengaruh secara signifikan terhadap Alokasi Belanja Modal
- H2 : Ketergantungan Keuangan Daerah berpengaruh secara signifikan terhadap Alokasi Belanja Modal
- H3 : Efektivitas PAD berpengaruh secara signifikan terhadap Alokasi Belanja Modal
- H4 : Efektivitas Belanja Modal berpengaruh secara signifikan terhadap Alokasi Belanja Modal
- H5 : Efisiensi Keuangan Daerah berpengaruh secara signifikan terhadap Alokasi Belanja Modal
- H6 : Keserasian Belanja berpengaruh secara signifikan terhadap Alokasi Belanja Modal
- H7 : Kemandirian Keuangan Daerah, Ketergantungan Keuangan Daerah, Efektivitas PAD, Efektivitas Belanja Modal, Efisiensi Keuangan Daerah dan Keserasian Belanja berpengaruh secara signifikan terhadap Alokasi Belanja Modal

## LANDASAN TEORI

### 2.1. Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dalam ketentuan umumnya, menyatakan bahwa keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan daerah tersebut. Kemampuan pemda dalam mengelola keuangan dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang langsung maupun tidak langsung mencerminkan kemampuan pemda dalam membiayai pelaksanaan tugas-tugas pemerintah, pembangunan, dan pelayanan sosial masyarakat. Pemda sebagai pihak yang diserahi tugas menjalankan roda pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan daerahnya untuk dinilai apakah pemda berhasil menjalankan tugasnya dengan baik atau tidak. Salah satu alat untuk menganalisis kinerja pemda dalam mengelola keuangan daerahnya adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakannya (Halim, 2007:230).

Hasil analisis rasio keuangan ini selanjutnya digunakan sebagai tolok ukur dalam:

1. Menilai kemandirian keuangan daerah dalam membiayai penyelenggaraan otonomi daerah.
2. Mengukur efektivitas dan efisiensi dalam merealisasikan pendapatan daerah.
3. Mengukur sejauh mana aktivitas pemerintah daerah dalam membelanjakan pendapatannya.
4. Mengukur kontribusi masing-masing sumber pendapatan dalam pembentukan pendapatan daerah.
5. Melihat pertumbuhan/perkembangan perolehan pendapatan dan pengeluaran yang dilakukan selama periode waktu tertentu.

Adapun pihak-pihak yang berkepentingan dengan rasio keuangan pada APBD ini adalah:

1. DPRD sebagai wakil dari pemilik daerah (masyarakat).
2. Pihak eksekutif sebagai landasan dalam menyusun APBD berikutnya.
3. Pemerintah pusat/provinsi sebagai bahan masukan dalam membina pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah.
4. Masyarakat dan kreditor, sebagai pihak yang akan turut memiliki saham pemda, bersedia memberikan pinjaman ataupun membeli obligasi.

Menurut Mahmudi (2011:169) beberapa rasio keuangan untuk mengukur kinerja keuangan pemerintah, terdiri dari: Derajat Desetrasalisasi, Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah, Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas PAD, Rasio Efisiensi PAD, Rasio Efektivitas Pajak, Rasio Efisiensi Pajak, Derajat Kontribusi BUMD. Selain itu terdapat juga rasio aktivitas untuk organisasi pemerintah yang berupa Rasio Keserasian Belanja.

### 2.2.1. Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah dihitung dengan cara membandingkan jumlah penerimaan Pendapatan Asli Daerah dibagi dengan jumlah pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan provinsi serta pinjaman daerah. Semakin tinggi angka rasio ini menunjukkan pemerintah daerah semakin tinggi kemandirian keuangan daerahnya (Mahmudi, 2011:170).

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah (PAD)}}{(\text{Transfer Pusat} + \text{Propinsi}) + \text{Pinjaman}} \times 100\%$$

### 2.2.2. Ketergantungan Keuangan Daerah

Rasio ketergantungan keuangan daerah dihitung dengan cara membandingkan jumlah pendapatan transfer yang diterima pemerintah daerah dengan total pendapatan daerah. Semakin tinggi rasio ini maka semakin besar tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat dan/atau pemerintah provinsi. Rasio ini dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Ketergantungan} = \frac{\text{Pendapatan Transfer}}{\text{Total Pendapatan}} \times 100\%$$

### 2.2.3. Efektivitas

Rasio efektivitas pendapatan dihitung dengan cara membandingkan realisasi pendapatan dengan target penerimaan pendapatan yang dianggarkan. Rasio ini dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efektivitas Pendapatan} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pendapatan}}{\text{Target Penerimaan Pendapatan}} \times 100\%$$

Rasio efektivitas pendapatan menunjukkan kemampuan pemerintah dalam memobilisasi penerimaan pendapatan sesuai dengan yang ditargetkan. Secara umum, nilai efektivitas pendapatan dapat dikategorikan sebagai berikut:

Sangat efektif	> 100%
Efektif	100%
Cukup efektif	90% - 99%
Kurang efektif	75% - 89%
Tidak efektif	< 75%

Rasio ini juga dapat digunakan untuk melihat efektivitas belanja, yaitu dengan membandingkan realisasi belanja dan target belanja.

### 2.2.4. Efisiensi

Rasio efisiensi pendapatan dihitung dengan cara membandingkan biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi penerimaan pendapatan. Rasio efisiensi pendapatan dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Realisasi Pendapatan}} \times 100\%$$

Semakin kecil nilai rasio efisiensi ini maka semakin baik kinerja pemerintah dalam melakukan pemungutan pendapatan. Secara umum, nilai rasio efisiensi pendapatan dapat dikategorikan sebagai berikut:

Sangat efisien	< 60%
Efisien	60% - 80%
Cukup efisien	80% - 90%
Kurang efisien	90% - 100%
Tidak efisien	< 100%

### 2.2.5. Keserasian Belanja

Rasio Keserasian Belanja menggambarkan bagaimana pemda memprioritaskan alokasi dananya pada belanja rutin dan belanja pembangunan secara optimal. Semakin tinggi persentase dana yang dialokasikan untuk belanja rutin berarti persentase belanja investasi (pembangunan) yang digunakan untuk menyediakan sarana dan prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil.

$$\text{Rasio Belanja Rutin terhadap APBD} = \frac{\text{Total Belanja Rutin}}{\text{Total APBD}}$$

$$\text{Rasio Belanja Pembangunan terhadap APBD} = \frac{\text{Total Belanja Pembangunan}}{\text{Total APBD}}$$

Belum ada tolok ukur yang pasti berapa besarnya rasio belanja rutin maupun pembangunan terhadap APBD yang ideal, karena sangat dipengaruhi oleh dinamisasi kegiatan pembangunan dan besarnya kebutuhan investasi yang diperlukan untuk mencapai pertumbuhan yang ditargetkan (Halim, 2007:235).

### 2.2.6. Pertumbuhan

Rasio Pertumbuhan mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang telah dicapai dari periode ke periode berikutnya. Dengan diketahuinya pertumbuhan untuk masing-masing komponen sumber pendapatan dan pengeluaran, dapat digunakan mengevaluasi potensi-potensi mana yang perlu mendapat perhatian.

$$r = \frac{P_n - P_o}{P_o} \times 100\%$$

Keterangan:

- $P_n$  : Data yang dihitung pada tahun ke-n
- $P_o$  : Data yang dihitung pada tahun ke-o
- r : Pertumbuhan

## 2.2. Belanja Modal

Menurut Warren (2008:450), Belanja Modal adalah biaya akuisisi atas aset tetap, biaya atas penambahan atau perbaikan pada aset tetap sendiri yang meningkatkan nilai total aset, atau memperpanjang umur manfaatnya. Menurut PP nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, aset tak berwujud. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Belanja Modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (duabelas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya.

Standar Akuntansi Pemerintahan mendefinisikan aset tetap sebagai aset berwujud yang mempunyai masa mafaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk

digunakan, dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas.

Klasifikasi aset tetap adalah sebagai berikut:

1. Tanah
2. Peralatan dan Mesin
3. Gedung dan Bangunan
4. Jalan, Irigasi dan Jaringan
5. Aset Tetap Lainnya
6. Konstruksi dalam Pengerjaan.

Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria berikut:

1. Berwujud
2. Mempunyai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan
3. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal
4. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas
5. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan

Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

## **METODE PENELITIAN**

### **3.1. Jenis dan Sumber Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif yaitu data-data pada laporan realisasi anggaran dan APBD. Berdasarkan sumbernya data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder karena data diperoleh dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah (BPKBMD) Provinsi Sulawesi Utara, dan dari situs resmi Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan.

### **3.2. Teknik Pengumpulan Data**

Laporan keuangan pemerintah kabupaten dan kota Provinsi Sulawesi Utara diperoleh dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah (BPKBMD) Provinsi Sulawesi Utara, dan dari situs resmi Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan.

### **3.3. Populasi dan Sampel**

Populasi dalam penelitian ini adalah laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) kabupaten dan kota di Provinsi Sulawesi Utara yang berjumlah 15. Sampel dari penelitian ini adalah data *time series* LKPD yang berupa APBD dan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) kabupaten dan kota di Provinsi Sulawesi Utara mulai dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2011.

**Sampel Penelitian**

<b>No.</b>	<b>Nama Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah Sampel</b>	<b>Sampel data ekstrim</b>	<b>Sampel yang digunakan</b>
1	Kab. Bolaang Mongondow	5	1	4
2	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	3	-	3
3	Kab. Bolaang Mongondow Timur	3	-	3
4	Kab. Bolaang Mongondow Utara	4	-	4
5	Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro	4	-	4
6	Kab. Kep. Talaud	5	-	5
7	Kab. Minahasa	5	-	5

8	Kab. Minahasa Selatan	5	-	5
9	Kab. Minahasa Tenggara	4	-	4
10	Kab. Minahasa Utara	5	-	5
11	Kab. Sangihe	5	1	4
12	Kota Bitung	5	-	5
13	Kota Kotamobagu	4	-	4
14	Kota Manado	5	-	5
15	Kota Tomohon	5	-	5
<b>Total Sampel</b>		<b>67</b>	<b>2</b>	<b>65</b>

Dalam pengujian asumsi klasik khususnya uji normalitas, ditemukan 2 sampel yang memiliki data ekstrim, yaitu data yang memiliki nilai terlampaui besar dibandingkan dengan data yang lain dalam kelompok variabel yang sama. Kedua sampel ini dieliminasi karena dapat menyebabkan data tidak terdistribusi normal. Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini semula berjumlah 67 sampel, setelah dilakukan eliminasi 2 sampel yang memiliki data ekstrim, jumlah sampel yang digunakan menjadi 65 sampel.

### 3.4. Definisi dan Pengukuran Variabel

Variabel-variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kemandirian Keuangan Daerah ( $X_1$ ), variabel ini adalah variabel independen yang merupakan perbandingan antara PAD dengan Transfer Pusat/Provinsi dan Pinjaman, dinyatakan dalam skala rasio.
2. Ketergantungan Keuangan Daerah ( $X_2$ ), variabel ini adalah variabel independen yang merupakan perbandingan antara Pendapatan Transfer dengan Total Pendapatan Daerah, dinyatakan dalam skala rasio.
3. Efektivitas PAD ( $X_3$ ), variabel ini adalah variabel independen yang merupakan perbandingan antara Realisasi Penerimaan PAD dengan Anggaran PAD, dinyatakan dalam skala rasio.
4. Efektivitas Belanja Modal ( $X_4$ ), variabel ini adalah variabel independen yang merupakan perbandingan antara Realisasi Belanja Modal dengan Anggaran Belanja Modal, dinyatakan dalam skala rasio.
5. Efisiensi Keuangan Daerah ( $X_5$ ), variabel ini adalah variabel independen yang merupakan perbandingan antara Realisasi Total Belanja dengan Realisasi Total Pendapatan, dinyatakan dalam skala rasio.
6. Keserasian Belanja ( $X_6$ ), variabel ini adalah variabel independen yang merupakan perbandingan antara Realisasi Belanja Modal dengan Realisasi Total Belanja, dinyatakan dalam skala rasio.
7. Alokasi Belanja Modal ( $Y$ ), variabel ini adalah variabel dependen yang merupakan perbandingan antara Anggaran Belanja Modal dengan Anggaran Total Belanja, dinyatakan dalam skala rasio. Alokasi Belanja Modal yang digunakan dalam penelitian ini adalah data belanja modal pada APBD di tahun berikutnya.

### 3.5. Metode Analisis

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi sederhana dan regresi linier berganda. Analisis regresi sederhana digunakan untuk mengukur pengaruh antara satu variabel independen terhadap variabel dependen. Analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengukur pengaruh antara lebih dari satu variabel independen terhadap variabel dependen. Rumus analisis regresi berganda yaitu:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + b_5X_5 + b_6X_6$$

$Y$  : Alokasi Belanja Modal

$X_1$  : Kemandirian Keuangan Daerah

$X_2$  : Ketergantungan Keuangan Daerah

$X_3$  : Efektivitas PAD

$X_4$  : Efektivitas BM

- X<sub>5</sub> : Efisiensi Keuangan Daerah  
 X<sub>6</sub> : Keserasian Belanja  
 a : Konstanta  
 b : Koefisien regresi

Sebelum melakukan analisis regresi, terlebih dahulu perlu dilakukan pengujian asumsi klasik yang meliputi pengujian normalitas, linearitas, homoskedastisitas, multikolinearitas, dan autokorelasi (Santoso, 2010:203).

a. Uji Normalitas

Alat uji ini digunakan untuk mengetahui apakah dalam sebuah model regresi nilai residu dari regresi mempunyai distribusi yang normal. Jika distribusi dari nilai-nilai residual tersebut tidak dapat dianggap berdistribusi normal maka dikatakan ada masalah terhadap asumsi normalitas. Pengujian ini secara praktis dilakukan lewat pembuatan grafik normal probability plot.

b. Uji Homoskedastisitas

Alat uji ini digunakan untuk mengetahui apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varians residual dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varian residual dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka hal tersebut disebut homoskedastisitas. Dan jika varians berbeda, disebut sebagai heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah tidak terjadi heteroskedastisitas.

c. Uji Multikolinearitas

Alat uji ini digunakan untuk mengetahui apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi antar-variabel independen. Jika terjadi korelasi maka dinamakan terdapat problem Multikolinearitas (Multiko). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen.

d. Uji Autokorelasi

Uji Autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam suatu model regresi liner ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pada periode t-1 atau sebelumnya. Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi. Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### 4.1. Pengujian Asumsi Klasik

#### 4.2.1 Multikolinieritas

Uji Multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi yang tinggi atau sempurna antarvariabel independen. Uji Multikolinieritas dilakukan dengan melihat nilai *Tolerance* dan *Variance Inflation Factor* (VIF). Sebuah model regresi yang tidak terjadi multikolinieritas antarvariabel independennya ditandai dengan nilai *Tolerance* > 0,10 dan VIF < 10. Tabel 4.1. menunjukkan nilai *Tolerance* semua variabel independen berada di atas 0,10 dan nilai VIF di bawah 10. Maka dapat disimpulkan tidak terdapat multikolinieritas pada kelima variabel independen dalam penelitian ini. Pada Tabel 4.2. menunjukkan *Pari-wise correlation* antarvariabel independen semuanya di bawah 0,80 sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat multikolinieritas antarvariabel independen.

**Tabel 4.1. Uji Multikolinieritas 1**

Coefficients<sup>a</sup>

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	35.194	22.349		1.575	.121		
	KmD	-.857	.317	-.236	-2.070	.043	.694	1.441
	KtgD	-.222	.162	-.143	-1.369	.176	.828	1.208
	Efektivitas	.026	.023	.132	1.159	.251	.700	1.429
	EfkBM	.075	.031	.261	2.420	.019	.775	1.290
	Efisiensi	-.087	.172	-.056	-.507	.614	.749	1.335
	KsB	.432	.110	.464	3.940	.000	.650	1.539

a. Dependent Variable: ABM

Sumber: Data Olahan

**Tabel 4.2. Uji Multikolinieritas 2**

**Coefficient Correlations<sup>a</sup>**

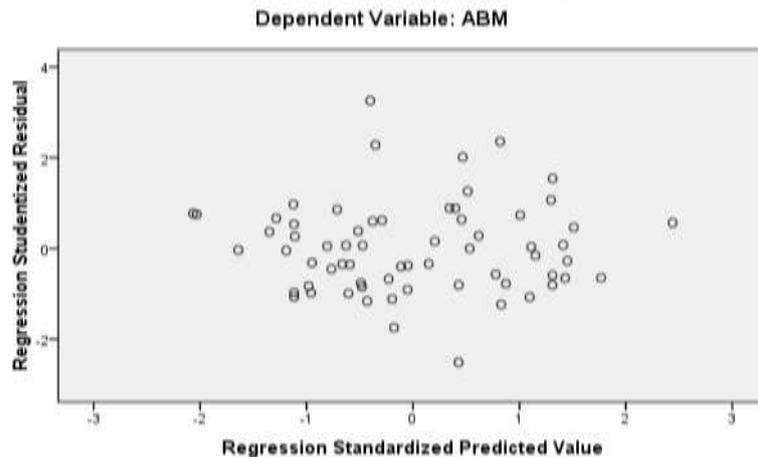
Model			KsB	Efisiensi	KtgD	EfkBM	Efektivitas	KmD
1	Correlations	KsB	1.000	-.098	.221	.050	-.476	.396
		Efisiensi	-.098	1.000	-.149	.398	.247	-.272
		KtgD	.221	-.149	1.000	-.125	-.140	.385
		EfkBM	.050	.398	-.125	1.000	.219	.017
		Efektivitas	-.476	.247	-.140	.219	1.000	-.187
		KmD	.396	-.272	.385	.017	-.187	1.000
	Covariances	KsB	.012	-.002	.004	.000	-.001	.014
		Efisiensi	-.002	.029	-.004	.002	.001	-.015
		KtgD	.004	-.004	.026	.000	.000	.020
		EfkBM	.000	.002	.000	.001	.000	.000
		Efektivitas	-.001	.001	.000	.000	.001	-.001
	KmD	.014	-.015	.020	.000	-.001	.101	

a. Dependent Variable: ABM

**4.2.2** Sumber: Data Olahan

Untuk mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas pada model regresi, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Scatterplot* dan uji Glejser. Grafik *Scatterplot* menunjukkan titik-titik tidak menyebar secara acak, sehingga dapat disimpulkan terjadi heteroskedastisitas pada model regresi. Namun, metode grafik memiliki kelemahan yang cukup signifikan oleh karena jumlah observasi mempengaruhi hasil plotting. Untuk itu pengujian dilanjutkan dengan menggunakan metode statistik yaitu uji Glesjer.

**Gambar 4.1. Grafik Scatterplot**



Sumber: Data Olahan

Uji Glesjer dilakukan dengan meregresikan nilai absolute residual ( $AbsU_i$ ) terhadap variabel independen. Jika hasilnya signifikan, maka mengindikasikan terdapat heteroskedastisitas dalam model regresi (Jenie, 2012:26).

**Tabel 4.3. Uji Glesjer**Coefficients<sup>a</sup>

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	36.225	13.294		2.725	.008
	KmD	-.322	.189	-.253	-1.709	.093
	KtgD	-.144	.096	-.203	-1.495	.140
	Efektivitas	-.008	.013	-.087	-.587	.559
	EfkBM	-.018	.018	-.139	-.992	.325
	Efisiensi	-.128	.102	-.179	-1.255	.214
	KsB	-.049	.065	-.115	-.754	.454

a. Dependent Variable: Abesliji

Sumber: Data Olahan

Hasil uji Glesjer menunjukkan nilai signifikansi variabel independen berada di atas 0,01 yaitu sebesar 0,93; 0,140; 0,559; 0,325; 0,214 dan 0,454. Hal ini berarti tidak terdapat heteroskedastisitas dalam model regresi ini.

### 4.2.3 Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam suatu model regresi linier terdapat korelasi antar kesalahan pengganggu (residual) pada periode t dengan kesalahan pada periode t-1. Jika terjadi korelasi, maka dinamakan terdapat permasalahan autokorelasi. Salah satu cara yang umum digunakan untuk mendeteksi adanya autokorelasi dalam regresi linier berganda adalah Uji Durbin Watson (Janie, 2012:30). Suatu model regresi dinyatakan tidak terdapat permasalahan autokorelasi apabila:

$$d_u < d < 4 - d_u$$

Di mana:

d = nilai Durbin Watson hitung

$d_u$  = nilai batas atas/ upper Durbin Watson tabel

**Tabel 4.4. Uji Durbin Watson**Model Summary<sup>b</sup>

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.691 <sup>a</sup>	.477	.423	7.35600	1.876

a. Predictors: (Constant), KsB, Efisiensi, KtgD, EfikBM, EfikPAD, KmD

b. Dependent Variable: ABM

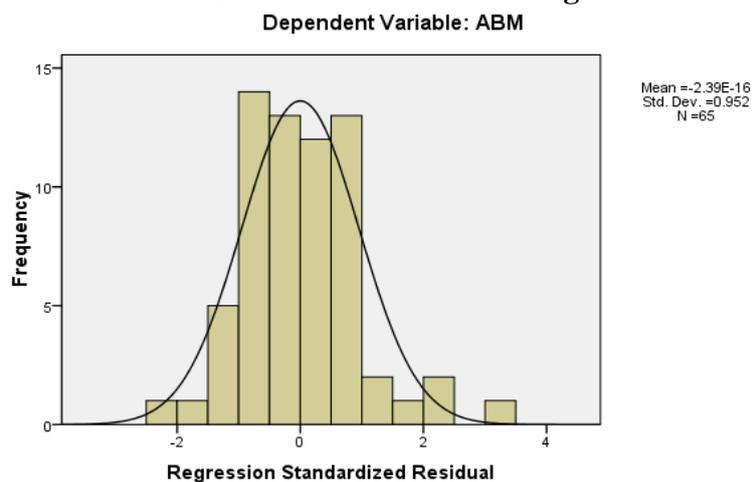
Sumber: Data Olahan

Hasil uji Durbin Watson adalah sebesar 1,876. Nilai ini lebih besar bila dibandingkan dengan batas bawah ( $d_l$ ) tabel Durbin Watson yaitu sebesar 1,404 dan batas atas ( $d_u$ ) sebesar 1,804. Karena  $1,804 < 1,876 < 4 - 1,804$  maka dapat disimpulkan tidak terdapat autokorelasi dalam model regresi ini.

### 4.2.4 Normalitas

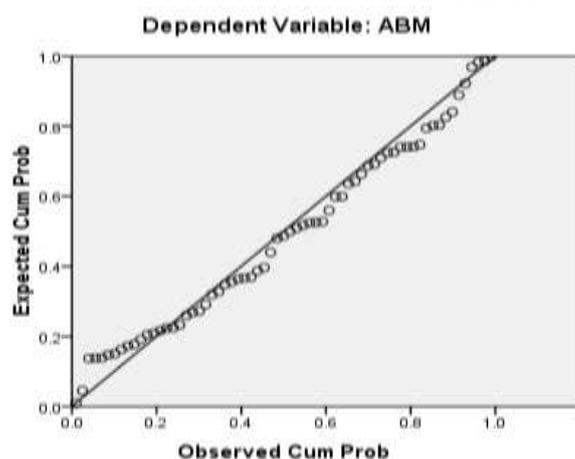
Grafik Histogram Uji Normalitas memberikan pola distribusi yang tidak normal. Sedangkan grafik normal plot terlihat titik-titik menyebar di sekitar garis diagonal serta penyebarannya mengikuti arah garis diagonal tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa data telah terdistribusi normal.

**Gambar 4.2. Grafik Histogram**



Sumber: Data Olahan

**Gambar 4.3. Grafik Normal Plot**



Sumber: Data Olahan

Uji statistik juga perlu dilakukan untuk melengkapi pengujian dengan grafik histogram dan grafik normal plot. Uji statistik yang dilakukan dalam penelitian ini adalah Uji Kolmogorov Smirnov (KS).

**Tabel 4.5. Uji Kolmogorov Smirnov**

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		65
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	7.00270149
Most Extreme Differences	Absolute	.094
	Positive	.073
	Negative	-.094
Kolmogorov-Smirnov Z		.761
Asymp. Sig. (2-tailed)		.609

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Besarnya nilai Kolmogorov-Smirnov adalah 0,761 dengan tingkat signifikansi jauh di atas 0,05 yaitu 0,609. Dengan kata lain bahwa nilai KS tidak signifikan, berarti residual terdistribusi secara normal.

### 4.3. Pengujian Hipotesis

#### 4.3.1 Uji Parsial

Pengujian secara parsial dilakukan dengan menggunakan analisis regresi linier sederhana. Hasil yang diperoleh adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.6. Hasil Uji Parsial**

Variabel Independen	Sig.	t-hit	Model Regresi	R	Kesimpulan
KmD	0,001	- 3,357	ABM = 30,897 – 1,084 KmD	0,389	H1 Diterima
KtgD	0,609	- 0,515	ABM = 36,316 – 0,100 KtgD	0,065	H2 Ditolak
EfkPAD	0,011	2,631	ABM = 19,938 + 0,062 EfkPAD	0,315	H3 Diterima
EfkBM	0,105	- 2,137	ABM = 65,998 – 0,407 EfkbM	0,260	H4 Ditolak
Efisiensi	0,036	- 2,137	ABM = 65,998 – 0,407 Efisiensi	0,260	H5 Diterima
KsB	0,000	5,580	ABM = 11,571 – 0,535 KsB	0,575	H6 Diterima

Sumber: Data Olahan

##### 4.3.1.1 Pengaruh Kemandirian Keuangan Daerah terhadap Alokasi Belanja Modal

Berdasarkan hasil uji statistik Variabel Kemandirian Keuangan Daerah memiliki probabilitas signifikansi sebesar 0,001 lebih kecil dari  $\alpha = 0,05$  dan t-hitung 3,357 lebih besar dari t-tabel 1,998. Ini berarti Variabel Kemandirian Keuangan Daerah berpengaruh secara signifikan terhadap Alokasi Belanja Modal. Nilai t-hitung negatif menunjukkan bahwa Variabel Kemandirian Keuangan Daerah memiliki pengaruh negatif terhadap Alokasi Belanja Modal. Maka dapat disimpulkan variabel Kemandirian Keuangan Daerah berpengaruh signifikan negatif terhadap Alokasi Belanja Modal. Model regresi dari pengaruh Variabel Kemandirian Keuangan Daerah terhadap Alokasi Belanja Modal adalah  $Y = 30,897 - 1,084X$ . Model regresi ini berarti jika Variabel Kemandirian Keuangan Daerah dianggap konstan maka Alokasi Belanja Modal adalah sebesar 30,897%. Jika variabel Kemandirian Keuangan Daerah mengalami kenaikan sebesar 1% maka Alokasi Belanja Modal akan mengalami penurunan sebesar 1,084%. Nilai R sebesar 0,389 memiliki arti bahwa 38,90% Variabel Alokasi Belanja Modal dapat dijelaskan dengan variabel Kemandirian Keuangan Daerah, sedangkan 61,10% dijelaskan oleh faktor-faktor lain di luar model.

##### 4.3.1.2 Pengaruh Ketergantungan Keuangan Daerah terhadap Alokasi Belanja Modal

Berdasarkan hasil uji statistik Variabel Ketergantungan Keuangan Daerah memiliki probabilitas signifikansi sebesar 0,609 lebih besar dari  $\alpha = 0,05$  dan nilai t-hitung sebesar 0,515 lebih kecil dari t-tabel 1,998. Ini berarti variabel Ketergantungan Keuangan Daerah tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap Alokasi Belanja Modal. Model regresi dari pengaruh Variabel Ketergantungan Keuangan Daerah terhadap Alokasi Belanja Modal adalah  $Y = 36,316 - 0,1X$ . Model regresi ini berarti jika variabel Ketergantungan Keuangan Daerah dianggap konstan maka Alokasi Belanja Modal adalah sebesar 36,316%. Jika variabel Ketergantungan Keuangan Daerah mengalami kenaikan sebesar 1% maka Alokasi Belanja Modal akan mengalami penurunan sebesar 0,1%. Nilai R sebesar 0,065 memiliki arti bahwa 6,5% variabel Alokasi Belanja Modal dapat dijelaskan dengan variabel Ketergantungan Keuangan Daerah, sedangkan 93,5% dijelaskan oleh faktor-faktor lain di luar model.

##### 4.3.1.3 Pengaruh Efektivitas PAD terhadap Alokasi Belanja Modal

Berdasarkan hasil uji statistik Variabel Efektivitas PAD memiliki probabilitas signifikansi sebesar 0,011 lebih kecil dari  $\alpha = 0,05$  dan nilai t-hitung sebesar 2,631 lebih besar dari t-tabel 1,998. Ini

berarti variabel Efektivitas PAD berpengaruh secara signifikan terhadap Alokasi Belanja Modal. Nilai t-hitung positif menunjukkan bahwa variabel Efektivitas PAD memiliki pengaruh positif terhadap Alokasi Belanja Modal. Maka dapat disimpulkan variabel Efektivitas PAD berpengaruh signifikan positif terhadap Alokasi Belanja Modal. Model regresi dari pengaruh variabel Efektivitas PAD terhadap Alokasi Belanja Modal adalah  $Y = 19,938 + 0,062X$ . Model regresi ini berarti jika variabel Efektivitas PAD dianggap konstan maka Alokasi Belanja Modal adalah sebesar 19,938%. Jika variabel Efektivitas PAD mengalami kenaikan sebesar 1% maka Alokasi Belanja Modal akan mengalami kenaikan sebesar 0,062%. Nilai R sebesar 0,315 memiliki arti bahwa 31,5% Variabel Alokasi Belanja Modal dapat dijelaskan dengan variabel Kemandirian Keuangan Daerah, sedangkan 68,5% dijelaskan oleh faktor-faktor lain di luar model.

#### **4.3.1.4 Pengaruh Efektivitas Belanja Modal terhadap Alokasi Belanja Modal**

Berdasarkan hasil uji statistik variabel Efektivitas Belanja Modal memiliki probabilitas signifikansi sebesar 0.105 lebih besar dari  $\alpha = 0,05$  dan nilai t-hitung sebesar 1,645 lebih kecil dari t-tabel 1,998. Ini berarti variabel Efektivitas Belanja Modal tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap Alokasi Belanja Modal. Model regresi dari pengaruh variabel Efektivitas Belanja Modal terhadap Alokasi Belanja Modal adalah  $Y = 21,229 + 0,058X$ . Model regresi ini berarti jika variabel Efektivitas Belanja Modal dianggap konstan maka Alokasi Belanja Modal adalah sebesar 21,229%. Jika variabel Efektivitas Belanja Modal mengalami kenaikan sebesar 1% maka Alokasi Belanja Modal akan mengalami kenaikan sebesar 0,058%. Nilai R sebesar 0,203 memiliki arti bahwa 20,3% variabel Alokasi Belanja Modal dapat dijelaskan dengan variabel Efektivitas Belanja Modal, sedangkan 79,7% dijelaskan oleh faktor-faktor lain di luar model.

#### **4.3.1.5 Pengaruh Efisiensi terhadap Alokasi Belanja Modal**

Berdasarkan hasil uji statistik variabel Efisiensi memiliki probabilitas signifikansi sebesar 0,036 lebih kecil dari lebih kecil dari  $\alpha = 0,05$  dan nilai t-hitung sebesar 2,137 lebih besar dari t-tabel 1,998. Ini berarti variabel Efisiensi berpengaruh secara signifikan terhadap Alokasi Belanja Modal. Nilai t-hitung negatif menunjukkan bahwa variabel Efisiensi memiliki pengaruh negatif terhadap Alokasi Belanja Modal. Maka dapat disimpulkan variabel Efisiensi berpengaruh signifikan negatif terhadap Alokasi Belanja Modal. Model regresi dari pengaruh variabel Efisiensi terhadap Alokasi Belanja Modal adalah  $Y = 65,998 - 0,407X$ . Model regresi ini berarti jika variabel Efisiensi dianggap konstan maka Alokasi Belanja Modal adalah sebesar 65,998%. Jika variabel Efisiensi mengalami kenaikan sebesar 1% maka Alokasi Belanja Modal akan mengalami penurunan sebesar 0,407%. Nilai R sebesar 0,260 memiliki arti bahwa 26% variabel Alokasi Belanja Modal dapat dijelaskan dengan variabel Efisiensi, sedangkan 74% dijelaskan oleh faktor-faktor lain di luar model.

#### **4.3.1.6 Pengaruh Keserasian Belanja terhadap Alokasi Belanja Modal**

Berdasarkan hasil uji statistik variabel Keserasian Belanja memiliki probabilitas signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari  $\alpha = 0,05$  dan nilai t-hitung sebesar 5.580 lebih besar dari t-tabel 1,998. Ini berarti variabel Keserasian Belanja berpengaruh secara signifikan terhadap Alokasi Belanja Modal. Nilai t-hitung positif berarti variabel Keserasian Belanja memiliki pengaruh positif terhadap Alokasi Belanja Modal. Maka dapat disimpulkan variabel Keserasian Belanja berpengaruh signifikan positif terhadap Alokasi Belanja Modal. Model regresi dari pengaruh variabel Keserasian Belanja terhadap Alokasi Belanja Modal adalah  $Y = 11.571 + 0,535X$ . Model regresi ini berarti jika variabel Keserasian Belanja dianggap konstan maka Alokasi Belanja Modal adalah sebesar 11,571%. Jika terjadi kenaikan variabel Keserasian Belanja mengalami kenaikan sebesar 1% maka Alokasi Belanja Modal akan mengalami kenaikan sebesar 0,535%. Nilai R sebesar 0,575 memiliki arti bahwa 57,5% Variabel Alokasi Belanja Modal dapat dijelaskan dengan variabel Keserasian Belanja, sedangkan 42,5% dijelaskan oleh faktor-faktor lain di luar model.

### 4.3.2 Uji Simultan

#### 4.3.2.1 Koefisien Determinasi

**Tabel 4.7. Koefisien Determinasi**  
Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.691 <sup>a</sup>	.477	.423	7.35600

a. Predictors: (Constant), EfKBM, KtgD, KsB, Efisiensi, Efektivitas, KmD

Sumber: Data Olahan

Nilai Adjusted R Square sebesar 0,423 yang artinya 42,30% variabel Alokasi Belanja Modal dapat dijelaskan oleh variabel independen Kemandirian Keuangan Daerah, Ketergantungan Keuangan Daerah, Efektivitas PAD, Efektivitas Belanja Modal, Efisiensi dan Keserasian Belanja. Sedangkan sisanya sebesar 57,7% dijelaskan oleh faktor-faktor lain di luar model.

#### 4.3.2.2 Uji F

Berdasarkan Tabel 4.8. nilai F hitung sebesar 8,814 sedangkan F tabel sebesar 2,2596. Karena F hitung > F tabel maka dapat disimpulkan bahwa variabel independen secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen. Probabilitas pada tabel ANOVA menunjukkan nilai 0,000 yang jauh lebih kecil dari  $\alpha = 0,05$  sehingga dapat disimpulkan bahwa secara bersama-sama variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

**Tabel 4.8. Uji F**

ANOVA<sup>b</sup>

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	2861.528	6	476.921	8.814	.000 <sup>a</sup>
	Residual	3138.421	58	54.111		
	Total	5999.949	64			

a. Predictors: (Constant), KsB, Efisiensi, KtgD, EfKBM, Efektivitas, KmD

b. Dependent Variable: ABM

Sumber: Data Olahan

### 4.3.3 Uji t

**Tabel 4.9. Uji t**

Coefficients<sup>a</sup>

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	35.194	22.349		1.575	.121
	KmD	-.657	.317	-.236	-2.070	.043
	KtgD	-.222	.162	-.143	-1.369	.176
	Efektivitas	.026	.023	.132	1.159	.251
	EfKBM	.075	.031	.261	2.420	.019
	Efisiensi	-.087	.172	-.056	-.507	.614
	KsB	.432	.110	.464	3.940	.000

a. Dependent Variable: ABM

Sumber: Data Olahan

Hasil uji t menunjukkan terdapat 3 (tiga) variabel independen yang memiliki probabilitas signifikansi dibawah  $\alpha = 0,05$  yaitu Kemandirian Keuangan Daerah sebesar 0,043; Efektivitas Belanja Modal sebesar 0,019; dan Keserasian Belanja sebesar 0,000. Sedangkan 3 (tiga) variabel independen yang lain probabilitas signifikansinya berada di atas  $\alpha = 0,05$  yaitu Ketergantungan Keuangan Daerah sebesar 0,176; Efektivitas PAD sebesar 0,251; dan Efisiensi sebesar 0,614. Ini berarti variabel Kemandirian Keuangan Daerah, Efektivitas Belanja Modal dan Keserasian Belanja berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen Alokasi Belanja Modal, sedangkan variabel Ketergantungan Keuangan Daerah, Efektivitas PAD dan Efisiensi tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen Alokasi Belanja Modal. Model persamaan regresinya adalah sebagai berikut:

$$\text{ABM} = 35,194 - 0,657 \text{ KmD} - 0,222 \text{ KtgD} + 0,026 \text{ Efektivitas PAD} + 0,075 \text{ EfKB} - 0,087 \text{ Efisiensi} + 0,432 \text{ KsB}$$

Interpretasi dari persamaan di atas adalah:

1. Konstanta (a) sebesar 35,194 menyatakan bahwa jika variabel independen dianggap konstan, maka Alokasi Belanja Modal sebesar 35,194%
2. Koefisien KmD sebesar -0,657 menunjukkan bahwa apabila terjadi perubahan variabel Kemandirian Keuangan Daerah sebesar 1%, maka Alokasi Belanja Modal akan turun sebesar 0,657% dengan asumsi variabel lainnya tetap atau sama dengan nol.
3. Koefisien KtgD sebesar -0,222 menunjukkan bahwa apabila terjadi perubahan variabel Ketergantungan Keuangan Daerah sebesar 1%, maka Alokasi Belanja Modal akan turun sebesar 0,222% dengan asumsi variabel lainnya tetap atau sama dengan nol.
4. Koefisien Efektivitas PAD sebesar 0,026 menunjukkan bahwa apabila terjadi perubahan variabel Efektivitas PAD sebesar 1%, maka Alokasi Belanja Modal akan naik sebesar 0,026% dengan asumsi variabel lainnya tetap atau sama dengan nol.
5. Koefisien EfKB sebesar 0,075 menunjukkan bahwa apabila terjadi perubahan variabel Efektivitas Belanja Modal sebesar 1%, maka Alokasi Belanja Modal akan naik sebesar 0,075% dengan asumsi variabel lainnya tetap atau sama dengan nol.
6. Koefisien Efisiensi sebesar -0,087 menunjukkan bahwa apabila terjadi perubahan variabel Efisiensi sebesar 1%, maka Alokasi Belanja Modal akan turun sebesar 0,087% dengan asumsi variabel lainnya tetap atau sama dengan nol.
7. Koefisien KsB sebesar 0,432 menunjukkan bahwa apabila terjadi perubahan variabel Keserasian Belanja sebesar 1%, maka Alokasi Belanja Modal akan naik sebesar 0,432% dengan asumsi variabel lainnya tetap atau sama dengan nol.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### 5.1. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengujian Hipotesis 1 ( $H_1$ ) dengan analisis regresi sederhana Kemandirian Keuangan Daerah berpengaruh signifikan terhadap Alokasi Belanja Modal, maka hipotesis diterima.
2. Pengujian Hipotesis 2 ( $H_2$ ) dengan analisis regresi sederhana Ketergantungan Keuangan Daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap Alokasi Belanja Modal, maka hipotesis ditolak.
3. Pengujian Hipotesis 3 ( $H_3$ ) dengan analisis regresi sederhana Efektivitas PAD berpengaruh signifikan terhadap Alokasi Belanja Modal, maka hipotesis diterima.
4. Pengujian Hipotesis 4 ( $H_4$ ) dengan analisis regresi sederhana Efektivitas Belanja Modal tidak berpengaruh signifikan terhadap Alokasi Belanja Modal, maka hipotesis ditolak.
5. Pengujian Hipotesis 5 ( $H_5$ ) dengan analisis regresi sederhana Efisiensi Keuangan Daerah berpengaruh signifikan terhadap Alokasi Belanja Modal, maka hipotesis diterima.
6. Pengujian Hipotesis 6 ( $H_6$ ) dengan analisis regresi sederhana Keserasian Belanja berpengaruh signifikan terhadap Alokasi Belanja Modal, maka hipotesis diterima.
7. Pengujian Hipotesis 7 ( $H_7$ ) dengan melakukan uji F variabel Kemandirian Keuangan Daerah, Ketergantungan Keuangan Daerah, Efektivitas PAD, Efektivitas Belanja Modal, Efisiensi, dan Keserasian Belanja secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Alokasi Belanja Modal, maka hipotesis diterima.

## 5.2. Saran

Setelah melihat hasil penelitian ini, saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk Pemerintah Daerah, agar berupaya meningkatkan kinerja keuangan daerah karena dapat memberikan dampak pada peningkatan alokasi belanja modal yang merupakan cerminan pembangunan daerah. Pemerintah juga sebaiknya lebih jeli dalam menggali potensi-potensi daerah yang dapat meningkatkan PAD, sehingga dapat tercipta keuangan daerah yang mandiri sesuai dengan tujuan otonomi daerah. Pendapatan transfer dari pemerintah pusat yang masih cukup besar diharapkan dapat dimanfaatkan dengan sabaik-baiknya, tidak hanya untuk membiayai belanja operasional tetapi juga untuk belanja modal. Pemerintah daerah sebagai pihak eksekutif yang menyusun APBD, sebaiknya lebih memperhatikan pengalokasian belanja modal di tahun-tahun yang akan datang terutama belanja modal yang berhubungan langsung dengan kebutuhan masyarakat, seperti pembangunan infrastruktur serta sarana dan prasarana yang dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik.
- 2) Untuk penelitian selanjutnya, sebaiknya menambah sampel dengan memperluas periode pengamatan dan/atau memperluas objek penelitian. Penelitian selanjutnya juga bisa menambah atau mengganti variabel independen, baik berupa variabel keuangan maupun non keuangan, sehingga hasil penelitian yang diperoleh nantinya akan lebih komprehensif dan akurat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Priyo Hari. 2006. *Hubungan Antara Pertumbuhan Ekonomi Daerah, Belanja Pembangunan dan Pendapatan Asli Daerah (Studi pada Kabupaten dan Kota Se Jawa-Bali)*. Simposium Akuntansi 9. Padang.
- Ardini dan Sri Handayani. 2011. *Pengaruh Rasio Keuangan Daerah Terhadap Belanja Modal Untuk Pelayanan Publik Dalam Perspektif Teori Keagenan (Studi pada Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah)*. Jurnal Akuntansi Universitas Diponegoro. Semarang.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Utara. 2012. *Sulawesi Utara Dalam Angka 2012*.
- Bank Indonesia. 2011. *Analisis Keuangan Publik Provinsi Sulawesi Utara 2011: Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pembangunan di Bumi Nyiur Melambai*. Jakarta.
- Bastian, Indra. 2007. *Sistem Akuntansi Sektor Publik*. Salemba Empat. Jakarta.
- Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan. *Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah*. <http://www.djpk.depkeu.go.id>
- Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan. *Laporan Realisasi Anggaran*. <http://www.djpk.depkeu.go.id>
- Darwanto dan Yulia Yustikasari. 2007. *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal*. Simposium Akuntansi X. Makasar.
- Fahmi, Irham. 2011. *Analisis Kinerja Keuangan*. Alfabeta. Bandung.
- Fees, Warren Reeve. 2008. *Pengantar Akuntansi Edisi 21*. Salemba Empat. Jakarta.
- Halim, Abdul. 2007. *Akuntansi Keuangan Daerah. Edisi 3*. Salemba Empat. Jakarta.
- Jenie, Dyah Nirmala Arum. 2012. *Statistik Deskriptif dan Regresi Linier Berganda Dengan SPSS*. Semarang University Press. Semarang
- Mahmudi. 2011. *Akuntansi Sektor Publik*. UII Press Yogyakarta. Yogyakarta.
- Mahsun, Mohamad. 2009. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik. Edisi Pertama*. BPFE-Yogyakarta. Yogyakarta.
- Mursyidi. 2009. *Akuntansi Pemerintahan di Indonesia*. Refika Aditama. Bandung.
- Prakosa, Kesit Bambang. 2004. *Analisis Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Prediksi Belanja Daerah (Studi Empirik di Wilayah Propinsi Jawa Tengah dan DIY)*. JAAI Vol. 8, No. 2.

- Republik Indonesia. 2003. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003. Tentang Keuangan Negara.
- \_\_\_\_\_. 2004. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara.
- \_\_\_\_\_. 2004. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
- \_\_\_\_\_. 2004. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- \_\_\_\_\_. 2005. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- \_\_\_\_\_. 2000. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah.
- \_\_\_\_\_. 2010. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- \_\_\_\_\_. 2007. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13/2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Santoso, Singgih. 2010. *Statistik Parametrik*. PT Elex Media Komputindo. Jakarta.
- Setiaji, Wirawan dan Priyo Hari Adi. 2007. *Peta Kemampuan Keuangan Daerah Sesudah Otonomi Daerah: Apakah Mengalami Pergeseran? (Studi pada Kabupaten/Kota se-Jawa-Bali)*. Simposium Nasional Akuntansi X. Makasar.
- Simanjuntak, Gunawan. 2009. *Pengaruh Transfer Pemerintah Pusat Terhadap Belanja Modal Pemerintah Kabupaten/Kota di Sumatera Utara*. Skripsi. Universitas Sumatera Utara. Medan
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Bisnis*. Alfabeta. Bandung.
- Sularso, Havid dan Yanuar E. Restianto. 2011. *Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Alokasi Belanja Modal dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Jawa Tengah*. Media Riset Akuntansi FEIS Universitas Bakrie. Vol. 1, No. 2. Jakarta.
- Sulistyowati, Diah. 2011. *Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Alokasi Belanja Modal*. Skripsi. Universitas Diponegoro. Semarang.

# ANALISIS SISTEM AKUNTANSI INSTANSI PADA KANTOR PERWAKILAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL PROVINSI SULAWESI UTARA

**Yefie Ignasia Worung**  
**Jenny Morasa**  
**Jantje Tinangon**

[yefie.ignasia@gmail.com](mailto:yefie.ignasia@gmail.com)

## ABSTRACT

*The central government is a party that is given the responsibility and rights to run the government systems, and social services to the society. In order to fulfill these duties, central government needs a system that can assist the government in carrying out its functions. Accounting Institution System is one embodiment of the systems of government that regulate the flow of goods, services and funds into supporting the implementation of the government's job.*

*The purpose of this study is to analyze the suitability of the SAI management system procedures and regulations, analyze the course of the reconciliation process, and analyze the use of information systems related to Accounting Institution System on BKKBN SULUT.*

*The analytical method used is descriptive comparative method which is a method for finding answers fundamentally about causation by analyzing factors of occurrence or the appearance of certain phenomena.*

*The results showed that the organizational structure has described the separation of responsibilities and authority, especially the things related to the SAI that consist of SAK and SIMAK-BMN, the implementation of the SAI in BKKBN SULUT has not been fully implemented in accordance with applicable regulations, both internal and external reconciliation generally been accomplished by the procedure and only experienced by technical errors, while the information relating to the SAI system has been implemented properly and structured.*

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Salah satu perwujudan prosedur pengelolaan dana pemerintah pusat adalah Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (SAPP) yang membawahi Sistem Akuntansi Instansi (SAI) dan Sistem Akuntansi Bendahara Umum Negara (SA-BUN). SAPP diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat. Melalui prosedur dan sistem inilah dana negara digunakan, dimanfaatkan, dan dipertanggungjawabkan dengan baik.

Proses pengelolaan SAK dan SIMAK-BMN sangat dipengaruhi oleh pengelolaan di setiap tingkat struktural karena prinsip penggabungan laporan yang dilakukan secara berjenjang. Salah satu contoh adalah proses pelaporan SAK. Laporan yang dihasilkan oleh setiap satuan kerja atau Unit Akuntansi Pengguna Anggaran (UAKPA) digabungkan oleh unit akuntansi di atasnya pada tingkat Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah (UAPPA-W). Laporan tingkat wilayah digabungkan lagi di tingkat Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Eselon I (UAPPA-E1). Laporan antar tingkat Eselon I digabungkan di tingkat Unit Akuntansi Pengguna Anggaran (UAPA) sehingga dihasilkan Laporan Keuangan K/L. Selanjutnya setiap K/L menyampaikan Laporan Keuangan kepada Menteri Keuangan. Laporan tingkat K/L, menjadi bahan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).

Konsekuensi dari pengelolaan SAK dan SIMAK-BMN adalah akan terjadi akumulasi kesalahan jika tingkatan paling bawah atau UAKPA menyajikan data yang tidak akurat. Selain itu, kondisi setiap kantor perwakilan yang tidak seragam sangat berpengaruh menimbulkan keragaman kualitas laporan yang dihasilkan. Contoh keragaman kondisi dapat dilihat dari sebaran kualitas maupun pendidikan Sumber

Daya Manusia (SDM) di setiap kantor perwakilan K/L yang sudah pasti berbeda-beda.

Walaupun telah ada aplikasi sistem yang mengelola keuangan dan barang jasa tetapi bukan berarti semua sudah terawasi dan terlaksana dengan baik. Akhirnya semua harus kembali ke Peraturan dan Undang-Undang (UU) yang menaungi proses pengelolaan hal-hal tersebut. Sistem prosedur di tubuh organisasi itu sendiri yang perlu di jaga agar tidak keluar dari jalur yang sebenarnya, sebab aplikasi sistem hanyalah alat. SDM lah yang memegang kontrol penuh terhadap aplikasi sistem. Bintang yang banyak pada aplikasi sistem bukanlah salah aplikasi tersebut tapi salah SDM nya karena data pendukung tidak lengkap. Stok barang dalam aplikasi sistem yang kurang tepat bukanlah salah aplikasi tersebut tapi salah SDM nya yang lalai dalam perhitungan stok barang.

Berbagai uraian di atas menjadi bahan pertimbangan penulis untuk melakukan penelitian mengenai **Sistem Akuntansi Instansi, baik secara manual maupun komputerisasi di salah satu instansi Pemerintah Pusat, yaitu Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Propinsi Sulawesi Utara.**

Pada tahun 2011, BKKBN memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Tetapi pada tahun 2012 turun menjadi Wajar Dengan Pengecualian lalu kemudian meningkat lagi menjadi Wajar Tanpa Pengecualian pada tahun 2013. Sebuah instansi yang beberapa kali mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian oleh BPK secara umum prosedur yang dilakukan harusnya sudah benar. Tetapi, secara kasat mata pelayanan BKKBN yang diberikan kepada masyarakat terlihat belum optimal. Hal ini ditunjukkan dengan pelayanan Keluarga Berencana yang belum merata dan pendistribusian alat dan obat-obatan yang belum maksimal. Hal inilah yang mendorong penulis untuk melakukan penelitian mengenai Sistem Akuntansi Instansi pada Satuan Kerja BKKBN Propinsi Sulawesi Utara.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka penelitian ini merumuskan masalah sebagai berikut.

1. Apakah Sistem Akuntansi Instansi pada Perwakilan BKKBN Propinsi Sulawesi Utara secara umum telah sesuai dengan sistem prosedur pengelolaan keuangan yang berlaku?
2. Apakah Proses Rekonsiliasi pada Perwakilan BKKBN Propinsi Sulawesi Utara telah dilaksanakan dengan benar?
3. Apakah penggunaan Sistem Informasi yang berhubungan dengan Sistem Akuntansi Instansi pada Perwakilan BKKBN Propinsi Sulawesi Utara telah berjalan dengan baik?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini untuk

1. menganalisis kesesuaian pengelolaan Sistem Akuntansi Instansi pada Perwakilan BKKBN Propinsi Sulawesi Utara dengan sistem prosedur pengelolaan keuangan yang berlaku.
2. Untuk menganalisis Proses Rekonsiliasi pada Perwakilan BKKBN Propinsi Sulawesi Utara.
3. Untuk menganalisis penggunaan Sistem Informasi yang berhubungan dengan Sistem Akuntansi Instansi pada Perwakilan BKKBN Propinsi Sulawesi Utara.

## **TINJAUAN PUSTAKA dan KERANGKA PEMIKIRAN**

### **2.1. Sistem Akuntansi Instansi**

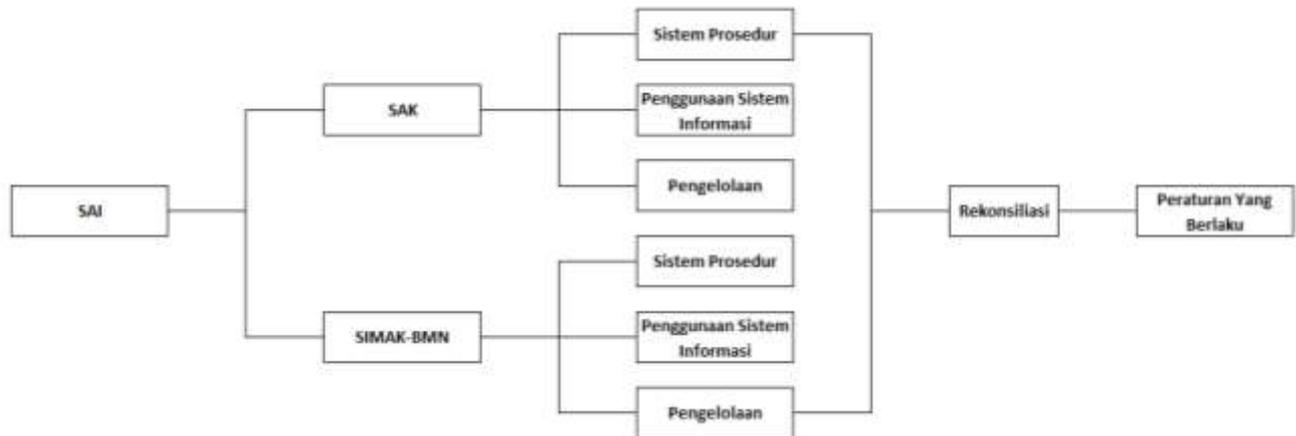
Sistem Akuntansi Instansi merupakan sistem akuntansi yang dilaksanakan oleh K/L selaku pengguna anggaran. SAI memproses data transaksi keuangan, barang, dan transaksi lain yang dilaksanakan oleh K/L (Mahmudi, 2011:216).

SAI terdiri dari dua sub sistem yaitu Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) yaitu subsistem dari SAI yang menghasilkan informasi mengenai LRA, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan milik K/L dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN) yaitu subsistem dari SAI yang merupakan serangkaian prosedur yang saling berhubungan untuk mengolah dokumen sumber dalam rangka menghasilkan informasi untuk menyusun Neraca dan Lapoaran Barang Milik Negara serta laporan manajerial lainnya menurut ketentuan yang berlaku.

## 2.2. Kerangka Pemikiran

Dalam Penelitian ini, Penulis fokus kepada Sistem Akuntansi Instansi dengan meneliti kedua unsur sistem yang ada di dalamnya yaitu SAK dan SIMAK-BMN. SAK dan SIMAK-BMN memiliki alur tersendiri dalam proses pelaksanaannya, dan penulis mencoba meneliti hal tersebut. pelaksanaan SAK dan SIMAK-BMN pada akhirnya akan berujung kepada Rekonsiliasi yang bertujuan untuk menyamakan data antara kedua sistem tersebut atau biasa disebut dengan Rekonsiliasi Internal, serta menyamakan data antara SAI dengan Sistem yang ada pada Kementerian Keuangan, dalam hal ini KPPN.

**Gambar 2.1**  
**Kerangka Berpikir**



Sumber : Data Olahan (2015)

SAI yang membawahi SAK dan SIMAK BMN akan memiliki *output* yang baik apabila Sistem Prosedur, Penggunaan Sistem Informasi, dan Pengelolaannya dilaksanakan dengan baik. Oleh karena itu, penulis menganalisis SAI dengan melihat ketiga hal tersebut. Sistem Prosedur, Penggunaan Sistem Informasi, dan Pengelolaannya akan terlihat jelas pada proses rekonsiliasi yang dilaksanakan setiap bulannya. Apabila proses rekonsiliasi terlaksana dengan lancar tanpa ada hambatan kekurangan data dan ketidaksesuaian jumlah, maka secara umum SAI telah dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

## METODE PENELITIAN

### 3.1 Jenis dan Sumber Data

Jenis penelitian ini termasuk penelitian Deskriptif. Penelitian deskriptif menurut Mohammad Nazir (2006:54) adalah suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian ini : untuk membuat deskriptif / gambaran, melukiskan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. Data yang akan digunakan dalam penelitian adalah data primer dan data sekunder.

### 3.2 Prosedur Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, data dikumpulkan melalui tiga tahap. Pada tahap pertama peneliti akan melakukan studi pustaka yaitu dengan mencari literatur yang berhubungan dengan penelitian yang akan dilakukan. Pada tahap kedua peneliti mengumpulkan data dengan Metode dokumentasi lalu pada tahap ketiga peneliti melakukan wawancara dengan pejabat atau pegawai yang berhubungan langsung dengan penelitian ini.

### 3.3 Teknik Analisis Data

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif komparatif. Deskriptif komparatif adalah suatu jenis metode penelitian yang ingin mencari jawab secara mendasar tentang sebab

akibat dengan menganalisis faktor-faktor terjadinya atau munculnya fenomena tertentu (Mohammad Nazir, 2003:58).

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **4.1 Hasil Penelitian**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Data-data SAI berasal dari kompilasi SAK dan SIMAK-BMN. Pada BKKBN Propinsi Sulawesi Utara, pejabat SAI bertanggung jawab langsung kepada Kepala Satuan Kerja (Kesatker) dalam hal ini Kepala Perwakilan BKKBN Propinsi Sulawesi Utara.

UAKPA melakukan proses penyusunan laporan keuangan. Dalam proses penyusunan laporan keuangan ini menggunakan aplikasi komputer yang disebut dengan aplikasi SAKPA (Sistem Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran). dalam Pelaksanaannya menggunakan dokumen sumber antara lain ; DIPA, revisi DIPA, SPM (Surat Perintah Membayar) yang ditanda tangani oleh Pejabat Penguji dan Perintah Pembayaran, SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) yang dikeluarkan oleh KPPN berdasarkan SPM yang diajukan kepada KPPN. Pengelolaan Akuntansi Barang milik negara menggunakan SIMAK-BMN oleh Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Dengan Laporan BMN yang dihasilkan kemudian dilakukan rekonsiliasi kepada Unit Akuntansi Keuangan untuk penyusunan neraca SAKPA.

Pelaksanaan rekonsiliasi data antara satker di BKKBN Propinsi SULUT dengan KPPN selaku Bendahara Umum Negara (BUN) dimulai dengan Rekonsiliasi Internal. Rekonsiliasi Periode Berjalan dilakukan dengan membandingkan nilai persediaan, BMN intrakomptabel per akun neraca per jenis transaksi dan akun pembalik jurnal korolari dari SPM belanja modal yang diinput di SIMAK-BMN dengan akun – akun neraca yang terkait dengan BMN dan jurnal korolari dari belanja modal yang diinput di SAKPA yang dibukukan pada bulan sesuai dengan isian parameter bulan (Contoh : rekonsiliasi bulan April berarti yang di rekon adalah nilai persediaan, BMN intrakomptabel per akun dan jenis transaksi, akun korolari dari transaksi yang dibukukan dan diposting di bulan April).

Rekonsiliasi eksternal adalah rekonsiliasi data antara satker di lingkungan BKKBN dengan KPPN selaku BUN. Rekonsiliasi ini dilaksanakan dengan tujuan pencocokan data transaksi keuangan yang diproses oleh aplikasi SAI oleh satker di lingkungan BKKBN dengan aplikasi SA-BUN yang dikelola oleh KPPN. Pelaksanaan rekonsiliasi dilaksanakan setiap bulan, dengan penyampaian BAR paling lama 7 hari kerja bulan berikutnya.

### **4.2 Pembahasan**

Perwakilan BKKBN Propinsi Sulawesi Utara merupakan salah satu instansi vertikal yang ada di daerah. Dari pengamatan yang dilakukan penulis, Perwakilan BKKBN Propinsi Sulawesi Utara hanya memiliki satu satker walaupun pelaksanaan kegiatannya sampai di tingkat Kabupaten dan Kota. Perwakilan BKKBN Propinsi Sulawesi Utara bermitra dengan sedikitnya empat kota dan sebelas kabupaten yang ada di Sulawesi utara. Dana yang disalurkan ke setiap Kota dan Kabupaten adalah Dana APBN Murni. Sistem pelaporan keuangan hanya dilakukan di tingkat Propinsi. Oleh karena itu, UAKPA dan UAPPA-W adalah sama. dalam hal ini, penanggung jawab dan Pengelola SAI bertugas juga sebagai Penanggung Jawab UAKPA dan UAKPB.

Sesuai ketentuan, dana APBN murni seharusnya dikelola penuh oleh Perwakilan BKKBN SULUT. Namun pada kenyataannya, Perwakilan BKKBN SULUT sering memberikan dana ke Kabupaten kota untuk dikelola oleh mereka sendiri tapi dalam pengawasan Perwakilan BKKBN Sulawesi Utara. Hal ini jelas saja melanggar ketentuan tetapi mereka mengaku akan sangat kelimpungan apabila mengelola dana untuk kota dan kabupaten sendiri sebab hanya ada satu Satker saja.

Dalam internalnya, Satker BKKBN SULUT telah menetapkan dan memisahkan petugas pelaksana SAI yaitu petugas SAK yang disebut dengan UAKPA dan petugas BMN yang disebut dengan UAKPB. Namun Penanggung Jawab SAI adalah petugas UAKPA itu sendiri.

UAKPA dan UAKPB dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh staf bendahara untuk mengetahui lebih rinci tentang jumlah uang yang keluar melalui SPP, SPM dan SP2D.

LRA disampaikan secara teratur setiap bulannya. Menurut wawancara dengan penanggungjawab SAI, BKKBN selalu mengirimkan data-data kepada KPPN maupun Eselon I tepat waktu setiap bulannya.

Secara umum, sistem prosedur yang berkaitan dengan SAK telah dilakukan dengan baik oleh

BKKBN SULUT. Kendala-kendala yang sering terjadi adalah kendala teknis seperti lupa menginput SPM ke dalam sistem, atau salah menginput nomor SPM dan SP2D.

BKKBN menyusun rekapan transaksi persediaan dalam laporan persediaan setiap bulan. Hal ini sangat membantu dalam pengelolaan BMN. Apabila ada barang persediaan yang rusak, maka dicatat dan dibuat laporan barang dengan kondisi yang rusak berat dan telah diusulkan penghapusannya. Salah satu contoh barang dengan kondisi ini adalah obat-obatan yang rusak akibat banjir dan tidak bisa terpakai lagi, dan mobil yang rusak dibakar masa di salah satu kabupaten. Sedangkan apabila ada barang persediaan yang hilang, maka dibuat laporan barang hilang tahunan yang diusulkan penghapusannya.

Selanjutnya, berdasarkan data yang diperoleh, BKKBN membuat laporan mutasi BMN maupun barang persediaan di Neraca sehingga kita bisa melihat nominal BMN dan barang persediaan tersebut. Laporan ini dibuat setiap semester. Terdapat beberapa macam laporan, seperti Laporan Mutasi Barang Rinci dan Ringkas yang sudah dilampirkan bersama tulisan ini.

Pada akhir periode, petugas UAKPB melakukan pengecekan Barang milik negara dan mencatat perubahan-perubahan yang terjadi terkait dengan BMN. Akhir periode yang dimaksudkan disini adalah periode tahunan, sehingga BKKBN SULUT cukup kesulitan menghitung semua BMN yang ada. Sudah diusulkan pada awal tahun 2014 untuk melakukan perhitungan BMN setiap bulan dan membuat laporan rekapan setiap semester tetapi rupanya hal ini belum berjalan dengan baik. Pada akhir tahun 2014 baru dilakukan perhitungan kembali BMN yang ada sehingga *history* keluar masuk barang fisik per bulan tidak tercatat dengan baik. Memang setiap barang masuk dan keluar selalu dicatat dalam sistem. Tetapi *stock opname* di gudang atau di lapangan yang hanya setahun sekali membuat stok yang ada di sistem dan stok *real* nya berbeda.

Rekonsiliasi internal dilaksanakan setiap akhir bulan. Tetapi yang di rekonsiliasi adalah data dari kedua aplikasi SAI, bukan data *real* dengan data aplikasi sehingga belum tentu jumlah persediaan atau uang yang ada di sistem adalah sama dengan jumlah dan nilai *real*.

Proses rekonsiliasi membutuhkan banyak data pendukung, tetapi seringkali data pendukung kurang lengkap sehingga rekonsiliasi memakan waktu lebih lama dari yang seharusnya, padahal masih ada tahapan rekonsiliasi eksternal dengan BPK yang sedang menunggu. Seringkali SPM dan SP2D tidak lengkap saat dilakukan rekonsiliasi. SPM dan SP2D yang dipegang oleh beberapa orang menjadi kendala dalam proses ini. seharusnya SPM dan SP2D diserahkan kepada satu orang sehingga pada saat diperlukan, data tersebut lebih mudah ditemukan.

Rekonsiliasi eksternal yang dimulai dari penyerahan data dari Satker ke KPPN selaku BUN berlangsung setiap awal bulan, dan BKKBN SULUT mengklaim bahwa mereka selalu tepat waktu menyerahkan Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) dan ADK yang sudah di *backup* sebelumnya serta dokumen pendukung rekonsiliasi yang dibutuhkan. Dari hasil pengamatan penulis, patuhnya Satker BKKBN SULUT dalam hal rekonsiliasi ke KPPN dikarenakan KPPN Manado menetapkan peraturan berupa sanksi penghambatan pencairan dana jika belum melaksanakan rekonsiliasi.

Setelah BAR diserahkan, dilakukan rekonsiliasi antara SAI yang ada di Satker dengan SA-BUN yang dikelola oleh KPPN. Proses rekonsiliasi bisa saja memakan waktu agak lama yang disebabkan oleh ketidaksamaan data atau jumlah pada kedua sistem ini. selama ada ketidaksamaan data atau jumlah pada SAI dan SA-BUN maka rekonsiliasi dinyatakan belum selesai. Oleh karena itu, Satker harus mencari titik kejanggalan yang mengakibatkan ketidaksamaan tersebut. Untuk melacak kejanggalan yang ada, Satker menggunakan data ADK yang sudah di *backup* sebelumnya.

Ketidaksamaan data biasanya disebabkan karena *Human Error* (Kesalahan Manusia), yaitu kesalahan dalam perekaman data SPM dan SP2D. kesalahan yang terjadi misalnya salah dalam pengetikan kode SPM dan SP2D contoh : No. 5036I diketik 50361. Salah ketik antara huruf I dengan angka 1 sudah dapat membuat status TIDAK SAMA. Kesalahan tersebut bisa dibilang kesalahan kecil karena hanya tinggal mengubah kode saja kemudian me *restore* ulang data. Dan kesalahan ini tidak mengubah dan mempengaruhi nilai akhir dari laporan keuangan. Dengan kata lain laporan telah SAMA tapi SALAH.

Dari wawancara penulis dengan salah satu pejabat SAI, sering terjadi kesalahan seperti ini. Salah satu contoh yang sering terjadi adalah kesalahan pembebanan dalam belanja antara dua bagian. Pada satker ini, setiap bidang atau kegiatan mempunyai beberapa kode SPM dan SP2d yang sama. Seringkali

karena *Human Error*, belanja untuk bidang atau kegiatan A, terinputkan pada belanja untuk bidang atau kegiatan B karena keduanya memiliki beberapa kode atau akun yang sama.

Apabila KPPN mengetahui hal ini pada rekonsiliasi pada bulan di awal tahun, maka biasanya KPPN langsung mengembalikan ADK atau datanya kepada Satker untuk diperbaiki. Namun seringkali kesalahan ini diketahui pada saat rekonsiliasi akhir tahun karena itu Satker harus menilik kembali data-data dari awal tahun untuk mencari kesalahan yang menyebabkan nilai akhir Tidak Sama.

Selain itu salah satu penyebab adalah mengenai pajak. Misalnya pajak honor. Pembagian Honor di BKKBN SULUT terdiri atas dua jenis yaitu Honor Pembantu Operasional dan Honor Pembantu Kegiatan yang menghasilkan output, dan pajak dari honor tersebut ditanggung oleh BKKBN SULUT. Yang sering terjadi kesalahan adalah pada pencatatan pembayaran Honor Pembantu Kegiatan yang menghasilkan output. Misalnya jumlah honor untuk satu orang dalam kegiatan Hari Keluarga Berencana adalah Rp.2.000.000,- (Dua Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) ditambah pajak sebesar 5% atau Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah). Sering terjadi bahwa jumlah nominal pajak tidak diinputkan ke SAI karena SSP nya tercecer. Yang diinputkan hanyalah jumlah honor nya saja. Sehingga pada saat rekonsiliasi, data yang ada dalam SAI dan SA-BUN dinyatakan tidak sama.

Sebagian besar kesalahan dalam rekonsiliasi memang ada pada Satker, tetapi kadang KPPN juga bisa melakukan kekeliruan. Hal ini biasanya terjadi pada kasus SSP. Bisa jadi pada saat Bendahara Satker menyeter pajak di kantor pos atau bank, para petugas kantor pos atau bank tersebut lupa mengirimkan lembaran SSP untuk kantor KPPN sehingga KPPN tidak mencatatnya dalam SA-BUN, dan pada saat rekonsiliasi hasilnya menjadi tidak sama.

## **PENUTUP**

### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan pengaruh penerapan GCG terhadap DER, DAR dan ROE, NPM maka dapat disimpulkan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan SAI pada Satuan Kerja Perwakilan BKKBN Propinsi Sulawesi Utara belum sepenuhnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sistem Prosedur SAK dan SIMAK-BMN serta hal-hal teknis memang sudah dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan yang ada. Tetapi ada beberapa hal yang terjadi di lapangan yang tidak sesuai dengan ketentuan. Misalnya masih ada yang mencoba merubah PAGU anggaran padahal sudah tercatat di KPPN, dan pengelolaan dana bantuan yang disalurkan kepada masyarakat masih belum terkontrol dengan baik. Buktinya penyimpangan pada bantuan sosial masih terjadi. Selain itu penyimpangan juga terjadi pada tahun 2012 yang menyebabkan opini BPK yang pada tahun sebelumnya adalah WTP menurun menjadi WDP. Hal ini disebabkan karena BKKBN menyewakan *Guest House* yang sedianya adalah untuk penggunaan internal kepada masyarakat, tetapi pendapatan sewa tidak dimasukkan ke dalam Pendapatan resmi BKKBN.
2. Rekonsiliasi pada umumnya sudah berjalan dengan baik. Kesalahan memang ada tetapi sebagian besar merupakan kesalahan teknis.
3. Sistem Informasi sudah dilaksanakan dengan baik. SAK dan SIMAK BMN berperan penting dalam proses rekonsiliasi yaitu memudahkan satker untuk membandingkan, mencocokkan serta menganalisis data yang ada pada SAKPA dan SIMAK-BMN. Pada rekonsiliasi internal juga, disesuaikan stok barang persediaan yang ada pada aplikasi persediaan dan SIMAK-BMN serta SAKPA. Setiap tahun aplikasi di *update* dan dilakukan pembaharuan secara berkala.

### **5.2 Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan ini, peneliti dapat memberikan saran sebagai acuan bagi pihak yang berkepentingan:

1. Teknis dari Sistem Akuntansi Instansi pada Perwakilan BKKBN SULUT pada umumnya sudah berjalan sesuai dengan ketentuan, tetapi ada baiknya petugas atau operator SAK dan SIMAK-BMN salah satunya adalah staf keuangan sehingga dapat meminimalisir kesalahan penginputan data akibat kesalahan komunikasi dengan bagian keuangan
2. Pengelolaan keuangan secara manual juga harus lebih diperhatikan, terutama mengenai dana yang

disalurkan kepada masyarakat lewat bantuan sosial maupun dana kegiatan sehingga kegiatan fiktif dan bantuan sosial yang ditarik kembali tidak akan terjadi lagi

3. Sebaiknya penanggungjawab SPM diserahkan kepada satu orang saja sehingga pada saat penginputan, tidak ada SPM yang tercecer dan terpecah pada beberapa orang. Begitu juga dengan surat setoran pajak, sebaiknya setelah bendahara selesai menyetorkan ke kantor pos atau bank, SSP segera diserahkan kepada operator SAI untuk kemudian inputkan ke dalam sistem.

#### DAFTAR PUSTAKA

- BPK. Peraturan Menteri Keuangan No. 171 tahun 2007. [PDF] (<http://jdih.bpk.go.id/wp-content/uploads/2012/03/2007-PMK-171-SAPKPP.rar>, diakses tanggal 2 Februari 2014)
- BPPK. Depkeu. Laporan Keuangan PKKIP (Pelaporan Keuangan Pemerintah) [PPTX] ([http://www.bppk.depkeu.go.id/webanggaran/index.php/unduh/doc\\_details/118--laporan-keuangan-pkkip](http://www.bppk.depkeu.go.id/webanggaran/index.php/unduh/doc_details/118--laporan-keuangan-pkkip), diakses tanggal 2 Februari 2014)
- BPPKDepkeu. Strategi Pengadaan Barang. [PDF] ([http://www.bppk.depkeu.go.id/bdk/palembang/attachments/204\\_Strategi%20Pengadaan%20Barang.pdf](http://www.bppk.depkeu.go.id/bdk/palembang/attachments/204_Strategi%20Pengadaan%20Barang.pdf), diakses tanggal 2 Februari 2014)
- BPKP. Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (SAPP). [PDF] (<http://www.bpkp.go.id/sesma/konten/285/Sistem-Akuntansi-Pemerintah-Pusat-SAPP.bpkp>, diakses tanggal 6 Januari 2014)
- Forum Dosen Akuntansi Sektor Publik. 2006. Standar Akuntansi Pemerintahan Telaah Kritis PP Nomor 24 Tahun 2005. BPFE Yogyakarta.
- Kemenag. Aplikasi SIMAK-BMN [PDF] (<http://www.lpmpjateng.go.id/web/index.php/arsip/artikel/670-seputar-pengadaan-barang-dan-jasa-pemerintah>, diakses tanggal 6 Februari 2014)
- KSAP. Standar Akuntansi Pemerintahan. [PDF] (<http://www.ksap.org/sap/standar-akuntansi-pemerintahan/>, diakses tanggal 5 Januari 2014)
- KSAP. Peraturan Pemerintah No 71. Tahun 2010. [PDF] ([http://www.ksap.org/pp%2071/PP\\_71\\_TAHUN\\_2010.pdf](http://www.ksap.org/pp%2071/PP_71_TAHUN_2010.pdf), diakses tanggal 5 Januari 2014)
- KSAP. Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual. [PDF] ([http://www.ksap.org/pp%2071/LAMPIRAN1/lampiran%201\\_1.pdf](http://www.ksap.org/pp%2071/LAMPIRAN1/lampiran%201_1.pdf), diakses tanggal 5 Januari 2014)
- KSAP. Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Kas Menuju Akrual.. [PDF] ([http://www.ksap.org/pp%2071/LAMPIRAN2/Lampiran\\_II\\_SAP\\_Berbasis\\_Kas\\_Menuju\\_Akrual.pdf](http://www.ksap.org/pp%2071/LAMPIRAN2/Lampiran_II_SAP_Berbasis_Kas_Menuju_Akrual.pdf), diakses tanggal 5 Januari 2014)
- KSAP. Presentasi Implementasi SAP Pada Pemerintah Pusat – KSAP. [PPS] ([www.ksap.org/Seminar/presentasi\\_pempus\\_090805.pps](http://www.ksap.org/Seminar/presentasi_pempus_090805.pps), diakses tanggal 5 Januari 2014)
- Kemenag. Ringkasan Penyusunan RKAKL. [PDF] (<http://rocan.kemenag.go.id/download/Ringkasan%20Penyusunan%20RKAKL.pdf>, diakses tanggal 8 Januari 2014)
- Mursyidi. 2009. Akuntansi Pemerintahan Di Indonesia. Edisi Kedua. PT Refika Aditama.
- Mahsun M, Sulistiyowati F, Purwanugraha H.A. 2013. Akuntansi Sektor Publik. Edisi Ketiga. BPFE Yogyakarta.
- LPMPJateng. Seputar Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. [PDF] (<http://www.lpmpjateng.go.id/web/index.php/arsip/artikel/670-seputar-pengadaan-barang-dan-jasa-pemerintah>, diakses tanggal 6 Februari 2014)
- PU. Peraturan Menteri Keuangan No. 196 Tahun 2009. [PDF] ([http://www.pu.go.id/satminkal/itjen/peraturan/keu/pmk\\_196\\_2009%20BELANJA%20SUBSIDI%20BELANJA%20LAIN-LAIN.pdf](http://www.pu.go.id/satminkal/itjen/peraturan/keu/pmk_196_2009%20BELANJA%20SUBSIDI%20BELANJA%20LAIN-LAIN.pdf), diakses tanggal 2 Februari 2014)
- Solihin, D. 2006. Pendanaan Pusat dan Daerah. PT Artifa Duta Prakarsa
- Zarkasyi, Moh. Wahyudi. 2008. Good Corporate Governance. Alfabeta. Bandung.

**ANALISIS KUALITAS APARAT PENGAWAS INTERN PEMERINTAH DALAM  
PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH  
(Studi pada Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara)**

**Josua H.R.Lumbantobing  
David P.E. Saerang  
Heince Wokas**

[josua\\_lumbantobing@yahoo.com](mailto:josua_lumbantobing@yahoo.com)

**Abstract**

*This study aimed to analyze the quality of internal government regulatory authorities. A common problem in this study is the finding of the audit that is not detected by the inspectorate apparatus as an internal auditor, but was found by the external auditor, the Supreme Audit Agency (BPK).*

*The method used in this research is descriptive qualitative. As in qualitative research, the authors use the method of in-depth interviews and Forum Group of Discussion with informants who have knowledge related to this research.*

*The results show, that became key points of analysis of internal audit quality authorities Southeast Minahasa regency government is to meet the needs of the Inspectorate competent authorities by providing technical guidance, education and ongoing training to improve quality. Not doing too frequent mutations, mutation should be done in accordance with the competence of the employees. While that is key to improving the quality of the Inspectorate is a strong commitment of the Head of Region for the creation of good and clean government to push for a more active role Inspectorate. The existence of the fulfillment of the budget for the Inspectorate of 1%.*

*This study certainly has limitations that can not be ignored. Therefore, further research is needed as a future research agenda.*

*Keywords: Analysis of The Quality of Government Internal Control Officers, APIP.*

**PENDAHULUAN**

Kabupaten Minahasa Tenggara berdasarkan Undang-Undang No. 9 Tahun 2007 tanggal 6 Januari 2007, ditetapkan sebagai daerah otonomi yang baru. Selama berdirinya Kabupaten ini, Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Sulawesi Utara dari tahun 2008 sampai dengan 2012 selalu menghasilkan opini tidak memberikan pendapat (*disclaimer*).

Opini Tidak Memberikan Pendapat (*disclaimer*) yang diperoleh selama 5 (lima) tahun berturut-turut tersebut antara lain disebabkan oleh permasalahan yang berulang diantaranya mengenai pengelolaan pajak, pengelolaan belanja barang dan jasa, pengelolaan belanja bantuan dan hibah, keterlambatan penyelesaian pekerjaan, pengelolaan aset tetap, pengelolaan piutang, pengelolaan pendapatan asli daerah, pengelolaan kas, pengelolaan belanja modal, pengelolaan utang, pengelolaan belanja pegawai, dan pengelolaan persediaan.

Sampai dengan bulan Juli 2013 (semester I Tahun 2013) dari 252 rekomendasi diantaranya sebanyak 88 rekomendasi telah ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi, 48 rekomendasi telah ditindaklanjuti namun belum sesuai rekomendasi dan sisanya sebanyak 116 rekomendasi belum ditindaklanjuti.

Mengapa hal ini dapat terjadi? Lemahnya pengendalian internal dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan salah satu penyebab terjadinya ketidakefisienan dan ketidakefektifan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan tentunya berdampak pada pemborosan anggaran dan keuangan daerah. Disamping itu, akibat lemahnya pengendalian internal dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, ada sebagian oknum di lingkungan pemerintahan daerah yang tidak atau belum siap dengan berlakunya otonomi daerah, terutama berkaitan dengan masalah etika dan moral dari oknum pejabat pemerintahan daerah tersebut yang rendah. Di sisi lain, masih menjadi tanda tanya besar di kalangan profesi audit internal mengenai sejauh mana peran serta dari fungsi pengawasan termasuk para

pejabat pengawas yang berada di lingkungan fungsi pengawasan atau inspektorat daerah, baik tingkat provinsi, kabupaten, maupun kota, terutama dalam upaya untuk mengawal berbagai kegiatan dan program pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memenuhi prinsip tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan.

Fenomena tersebut mendorong penulis untuk melakukan penelitian dengan judul : “Analisis Kualitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah Dalam Pengawasan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara”.

## **LANDASAN TEORI**

### **2.1 Grand Theory: Teori Harapan**

Teori harapan ini sangat berhubungan dengan variabel yang diteliti yaitu motivasi, dimana APIP akan mengeluarkan seluruh kemampuan terbaiknya apabila tujuan dan harapan mereka untuk memperoleh penghargaan atas kinerja yang telah mereka tunjukkan terpenuhi. Penghargaan tersebut dapat berupa anggaran yang diberikan kepada Inspektorat harus sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2008 yang nantinya digunakan untuk meningkatkan kualitas auditor APIP dengan memberikan bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan, peningkatan infrastruktur penunjang bagi APIP guna mendukung kegiatan pengawasan keuangan daerah serta peningkatan kesejahteraan bagi auditor APIP. Apabila semua harapan diatas dapat dipenuhi maka bukan tidak mungkin kualitas APIP dapat sedikit demi sedikit meningkat.

### **2.2 Teori Behaviorisme**

Teori behaviorisme berkaitan dengan komitmen yang kuat dari pemimpin lembaga dalam hal ini Bupati dan Inspektur yang memotivasi para Aparat Pengawas Intern Pemerintah untuk mengerahkan seluruh kemampuan terbaiknya guna terciptanya *clean and good governance* di Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara.

### **2.3 Pengelolaan Keuangan Daerah**

Sejalan dengan era reformasi, akuntansi sektor publik mulai mendapat perhatian yang serius. Terdapat tuntutan yang lebih besar dari masyarakat untuk dilakukan transparansi dan akuntabilitas publik oleh lembaga-lembaga sektor publik. Dalam pemerintahan sendiri sudah mulai ada perhatian yang lebih besar terhadap penilaian kelayakan praktek manajemen pemerintahan yang mencakup perlunya dilakukan perbaikan sistem akuntansi manajemen, sistem akuntansi keuangan, perencanaan keuangan, sistem pengawasan dan pemeriksaan, serta berbagai implikasi finansial atas kebijakan-kebijakan yang dilakukan pemerintah. Organisasi sektor publik termasuk pemerintah saat ini tengah menghadapi tekanan untuk lebih efisien, memperhitungkan biaya ekonomi dan biaya sosial, serta dampak negatif atas aktivitas yang dilakukan. Berbagai tuntutan tersebut menyebabkan akuntansi dapat dengan cepat diterima dan diakui sebagai ilmu yang dibutuhkan untuk mengelola urusan-urusan publik. Akuntansi sektor publik pada awalnya merupakan aktivitas yang terspesialisasi dari suatu profesi yang relatif kecil. Namun demikian saat ini akuntansi sektor publik sedang mengalami proses untuk menjadi disiplin ilmu yang lebih dibutuhkan dan substansial keberadaannya (Mardiasmo, 2009).

### **2.4 Pengawasan Keuangan Daerah**

Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan diperlukan untuk menjamin agar pelaksanaan kegiatan pemerintahan berjalan sesuai dengan rencana dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, dalam rangka mewujudkan *good governance* dan *clean government*, pengawasan juga diperlukan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta bersih dan bebas dari praktik-praktik KKN. Pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan tersebut dapat dilakukan melalui pengawasan melekat, pengawasan masyarakat, dan pengawasan fungsional (Cahyat, 2004).

### **2.5 Kualitas Pengawasan Internal**

Kualitas auditor menurut Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No. Per/05/M.Pan/03/2008 tanggal 31 maret 2008 adalah auditor yang melaksanakan tupoksi dengan efektif, dengan cara mempersiapkan kertas kerja pemeriksaan, melaksanakan perencanaan, koordinasi dan penilaian efektifitas tindak lanjut audit, serta konsistensi laporan audit.

## 2.6 Kompetensi

Dalam standar audit APIP disebutkan bahwa audit harus dilaksanakan oleh orang yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis cukup sebagai auditor. Dengan demikian, auditor belum memenuhi persyaratan jika ia tidak memiliki pendidikan dan pengalaman yang memadai dalam bidang audit. Dalam audit pemerintahan, auditor dituntut untuk memiliki dan meningkatkan kemampuan atau keahlian bukan hanya dalam metode dan teknik audit, akan tetapi segala hal yang menyangkut pemerintahan seperti organisasi, fungsi, program, dan kegiatan

## 2.7 Motivasi

Dari berbagai jenis teori motivasi, teori yang sekarang banyak dianut adalah teori kebutuhan. Teori ini beranggapan bahwa tindakan manusia pada hakikatnya adalah untuk memenuhi kebutuhannya. Ahli yang mencoba merumuskan kebutuhan-kebutuhan manusia, di antaranya adalah Abraham Maslow.

Maslow merumuskan lima jenjang kebutuhan manusia, sebagaimana dijelaskan sebagai berikut (Wahjosumidjo, 1987):

- 1) Kebutuhan mempertahankan hidup (Physiological Needs). Manifestasi kebutuhan ini tampak pada tiga hal yaitu sandang, pangan, dan papan. Kebutuhan ini merupakan kebutuhan primer untuk memenuhi kebutuhan psikologis dan biologis.
- 2) Kebutuhan rasa aman (Safety Needs). Manifestasi kebutuhan ini antara lain adalah kebutuhan akan keamanan jiwa, di mana manusia berada, kebutuhan keamanan harta, perlakuan yang adil, pensiun, dan jaminan hari tua.
- 3) Kebutuhan social (Social Needs). Manifestasi kebutuhan ini antara lain tampak pada kebutuhan akan perasaan diterima oleh orang lain (sense of belonging), kebutuhan untuk maju dan tidak gagal (sense of achievement), kekuatan ikut serta (sense of participation).
- 4) Kebutuhan akan penghargaan/prestise (esteem needs), semakin tinggi status, semakin tinggi pula prestisenya. Prestise dan status ini dimanifestasikan dalam banyak hal, misalnya mobil mercy, kamar kerja yang full AC, dan lain-lain.
- 5) Kebutuhan mempertinggi kapasitas kerja (self actualization), kebutuhan ini bermanifestasi pada keinginan mengembangkan kapasitas mental dan kerja melalui seminar, konferensi, pendidikan akademis, dan lain-lain.

## 2.8 Independensi

Pernyataan standar umum kedua dalam SPKN adalah: “Dalam semua hal yang berkaitan dengan pekerjaan pemeriksaan, organisasi pemeriksa dan pemeriksa harus bebas dalam sikap mental dan penampilan dari gangguan pribadi, ekstern, dan organisasi yang dapat mempengaruhi independensinya”. Dengan pernyataan standar umum kedua ini, organisasi pemeriksa dan para pemeriksanya bertanggung jawab untuk dapat mempertahankan independensinya sedemikian rupa, sehingga pendapat, simpulan, pertimbangan atau rekomendasi dari hasil pemeriksaan yang dilaksanakan tidak memihak dan dipandang tidak memihak oleh pihak manapun.

## KERANGKA KONSEPTUAL

Indikator aparat pengawas internal pemerintah (APIP) yang baik menurut Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (MENPAN) No. Per/05/M.Pan/03/2008 tanggal 31 Maret 2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) adalah:

- a. Auditor APIP harus mempunyai tingkat pendidikan formal minimal Strata Satu (S1) atau yang setara.
- b. Kompetensi teknis yang harus dimiliki oleh auditor adalah auditing, akuntansi, administrasi pemerintahan dan komunikasi.

- c. Auditor harus mempunyai sertifikasi jabatan fungsional auditor (JFA) dan mengikuti pendidikan dan pelatihan profesional berkelanjutan (*continuing professional education*).
- d. Auditor harus menggunakan keahlian profesionalnya dengan cermat dan seksama (*due professional care*) dan secara hati-hati (*prudent*) dalam setiap penugasan.
- e. Auditor harus mematuhi Kode Etik yang ditetapkan.

Berdasarkan kerangka konseptual penelitian, hasil-hasil penelitian terdahulu, serta kerangka pemikiran teoritis tentang faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kualitas audit yang dilaksanakan oleh auditor internal, maka dikembangkan proposisi dengan penjelasan sebagai berikut :

#### 1. Kompetensi terhadap kualitas APIP

Kompetensi auditor adalah kemampuan auditor untuk mengaplikasikan pengetahuan dan pengalaman yang dimilikinya dalam melakukan audit sehingga auditor dapat melakukan audit dengan teliti, cermat, *intuitif*, dan obyektif. Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa audit harus dilaksanakan oleh orang yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis cukup sebagai auditor. Dengan demikian, auditor belum memenuhi persyaratan jika ia tidak memiliki pendidikan dan pengalaman yang memadai dalam bidang audit. Dalam audit pemerintahan, auditor dituntut untuk memiliki dan meningkatkan kemampuan atau keahlian bukan hanya dalam metode dan teknik audit, akan tetapi segala hal yang menyangkut pemerintahan seperti organisasi, fungsi, program, dan kegiatan pemerintah.

#### 2. Motivasi terhadap kualitas APIP

Sebagaimana dikatakan oleh Goleman (2001), hanya motivasi yang akan membuat seseorang mempunyai semangat juang yang tinggi untuk meraih tujuan dan memenuhi standar yang ada. Dengan kata lain, motivasi akan mendorong seseorang, termasuk auditor, untuk berprestasi, komitmen terhadap kelompok serta memiliki inisiatif dan optimisme yang tinggi. Respon atau tindak lanjut yang tidak tepat terhadap laporan audit dan rekomendasi yang dihasilkan akan dapat menurunkan motivasi aparat untuk menjaga kualitas audit.

#### 3. Independensi terhadap kualitas APIP

Independensi auditor merupakan salah satu faktor yang penting untuk menghasilkan audit yang berkualitas. Karena jika auditor kehilangan independensinya, maka laporan audit yang dihasilkan tidak sesuai dengan kenyataan yang ada sehingga tidak dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan (Supriyono, 1988).

## **METODE PENELITIAN**

Dalam suatu penelitian, metode penelitian merupakan cara untuk mengumpulkan data dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang spesifik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan bersifat deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan metode wawancara, Forum Group of Discussion (FGD) dan studi kepustakaan.

Maksud dari dipilihnya penelitian dengan jenis kualitatif deskriptif yaitu agar hasil yang dicapai dari penelitian ini juga dapat menjadi rekomendasi yang baik, jelas, dan berimbang bagi para pembuat keputusan serta untuk mendukung perencanaan di dalam organisasi. Melalui penelitian ini, penulis juga bermaksud untuk menjelaskan bagaimana dan langkah-langkah apa saja yang dapat diambil oleh Inspektorat Daerah Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara sebagai badan publik dalam mengusahakan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, yang kemudian menjadi evaluasi untuk meningkatkan dan mempertahankan kualitas dan prestasi peran Inspektorat dalam rangka menciptakan pengelolaan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara.

## **HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

Kompetensi seorang auditor bagai sebuah pedang bagi seorang satria. Semakin tinggi kompetensinya, maka semakin tajam pedang yang dipakainya. Tanpa pedang yang tajam, kecil kemungkinan sang satria akan mampu menebas habis musuh-musuhnya. Tanpa kompetensi yang

memadai, kecil kemungkinan seorang pengawas akan mampu menjalankan tugas dan perannya secara efektif.

Kompetensi seseorang dipengaruhi oleh tiga hal, yaitu Pengetahuan (knowledge), Keterampilan (skill), dan Perilaku (attitude). Ungkapan ini tidak banyak berubah sejak masa lalu hingga masa kini. Yang berubah adalah substansi materi pengetahuan, keterampilan, dan perilaku apa yang harus dimiliki agar sesuai kompetensi yang dibutuhkan saat menjalankan tugas dan fungsinya. Demikian halnya dengan aparat pengawasan intern, perubahan peran, fungsi, serta dimensi penugasan menuntut aparat pengawasan intern untuk selalu mengasah dan meng-update knowledge, skill, dan attitudenya.

Efektivitas kegiatan audit dan reviu Laporan Keuangan (LK) Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) pada Inspektorat Kabupaten Minahasa Tenggara yang salah satu tujuannya adalah untuk menilai efektivitas struktur dan tata kelola yang mendukung fungsi audit dan reviu LK. Salah kriteria yang dibangun adalah bahwa struktur dan tata kelola APIP yang mendukung fungsi audit dan reviu LK harus memadai dengan satu sub kriteria yang digunakan adalah sumber daya pendukung yang memadai. Sumber daya dimaksud adalah jumlah tenaga pengawas (auditor/P2UPD) tersedia dan telah dihitung berdasarkan analisis kebutuhan, kompetensi tenaga pengawas (auditor/P2UPD) sesuai persyaratan dan tenaga pengawasan (auditor/P2UPD) telah mendapatkan pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan sesuai kebutuhan.

Inspektorat Kabupaten Minahasa Tenggara belum memiliki tenaga pengawas yang bersertifikasi Jabatan Fungsional Auditor (JFA) maupun Jabatan Fungsional Pejabat Pengawas Urusan Pemerintah Daerah (P2UPD). Pada tahun 2011, sebanyak 4 orang pegawai Inspektorat ditetapkan dalam Inpassing jabatan P2UPD, namun sampai saat ini belum diangkat dengan Surat Keputusan Bupati Minahasa Tenggara sehingga belum dapat diakui sebagai P2UPD.

Pengawasan oleh tenaga pengawas Inspektorat selama ini dilakukan oleh tenaga pengawas yang tidak sesuai dengan kompetensi yang dimilikinya. Hal ini tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor PER/04/M.PAN/03/2008 tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah mengenai kompetensi dimana dinyatakan bahwa Auditor harus memiliki pengetahuan, keahlian, pengalaman dan keterampilan yang diperlukan untuk melaksanakan tugas.

Pada tahun 2010 dan 2011 terdapat penerimaan CPNS untuk formasi auditor sebanyak 5 orang. Penerimaan untuk formasi auditor dimaksudkan untuk ditempatkan pada Inspektorat namun terdapat 2 orang yang berlatar belakang pendidikan akuntansi dan teknik penempatannya pada kelurahan. Pegawai yang dipindahkan ke Inspektorat tidak mempertimbangkan kompetensi dan latar belakang pendidikan pegawai yang bersangkutan sesuai dengan kebutuhan fungsi pengawasan. Bahkan dalam satu tim, mulai dari Inspektur Pembantu (Irban) Wilayah sampai dengan staf pelaksana baru semua, sehingga kinerja tim tidak maksimal. Bagaimana tim bisa bekerja maksimal apabila mereka tidak tahu apa yang harus mereka lakukan. Karena semua anggota tim baru sehingga entry briefing yang seharusnya dilakukan setiap kali sebelum tim melakukan pemeriksaan/pengawasan tidak berjalan.

Pada Tahun 2012 terdapat dua kali pendidikan dan pelatihan antara lain bimbingan teknis pengawasan bidang tenaga kerja dan transmigrasi yang diikuti oleh dua orang pegawai dan Diklat Audit PNPM Mandiri Pedesaan yang diikuti oleh 3 orang pegawai. Sedangkan untuk Tahun 2014 semester III belum ada bimtek-bimtek/diklat-diklat. Selain itu, Inspektorat belum menentukan jumlah jam diklat minimal yang harus dipenuhi oleh para pegawai.

Kebijakan Inspektur memberangkatkan hampir seluruh pegawai di Inspektorat membutuhkan biaya kontribusi diklat yang cukup besar. Kebijakan ini sendiri kurang efektif karena hanya satu kali diklat akan tetapi menggunakan dana yang besar. Seharusnya dana yang digunakan untuk

memberangkatkan seluruh pegawai tersebut bisa digunakan untuk melakukan bimtek atau diklat di Pemkab sebanyak 2-3 kali dengan mendatangkan instruktur dari Jakarta.

Inspektur diangkat dan diberhentikan oleh Bupati, karena diangkat dan diberhentikan oleh Bupati, maka independensi Inspektorat itu diragukan. Inspektorat dituntut untuk mengikuti apa maunya Bupati, jika Bupati suruh A, maka Inspektorat harus lakukan sesuai yang Bupati perintahkan.

Independensi aparat pengawas Inspektorat juga tergantung dari kompetensi pengawas itu sendiri. Pengawas yang memiliki kompetensi yang baik hasil dari pembinaan serta pelatihan-pelatihan dengan sendirinya memiliki kode etik yang tinggi dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sebagai auditor. Seorang pengawas (auditor) minimal harus setingkat lebih tinggi kemampuannya dibandingkan dengan yang diawasi (auditan), kalau sama maka pengawas dapat dengan mudah ditipu atau dikerjai oleh auditan, karena auditan lebih menguasai apa yang dia kerjakan.

Dalam semua hal yang berkaitan dengan pekerjaan pemeriksaan, organisasi pemeriksa dan pemeriksa, harus bebas dalam sikap mental dan penampilan dari gangguan pribadi, ekstern, dan organisasi yang dapat mempengaruhi independensinya.

Independensi merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi oleh pemeriksa. Independensi sangat menentukan kredibilitas pemeriksa dan laporan hasil pemeriksaan yang dihasilkan oleh pemeriksa tersebut. Pemeriksa memang harus memiliki kemampuan dan keahlian sesuai dengan bidang yang dibutuhkan untuk memeriksa, tetapi apabila pemeriksa tersebut tidak independen, maka seberapa hebatnya laporan hasil pemeriksaan yang dihasilkan, pada akhirnya pengguna laporan tetap akan meragukan kredibilitas laporan tersebut.

Sedemikian pentingnya independensi, sehingga dapat dikatakan bahwa independensi melekat pada diri pemeriksa yang bersangkutan. Bahkan dapat dikatakan bahwa independensi harus ada terlebih dahulu sebelum pemeriksa itu ada. Pendapat ini tidak berlebihan apabila kita menilik kembali pada latar belakang munculnya penugasan pemeriksaan atau audit dalam konsep stewardship.

Mengingat sedemikian tingginya nilai independensi ini dalam pemeriksaan, maka SPKN sangat bersikap tegas, kalau tidak mau dikatakan keras. Apabila pemeriksa mengalami gangguan independensi, maka pemeriksa tersebut harus menolak penugasan pemeriksaan. Minimal, apabila pemeriksa tidak dapat menolak penugasan, gangguan independensi dimaksud harus dimuat dalam laporan hasil pemeriksaan.

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2008 tentang Kebijakan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2009 pada lampiran huruf D Kebijakan Operasional Pengawasan angka 11 yang menyatakan bahwa Pemerintah Daerah diwajibkan mengalokasikan pemanfaatan 1 (Satu Perseratus) dari APBD Tahun 2009 untuk Inspektorat Provinsi, Kabupaten/Kota guna mendukung peran dan fungsi Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 2, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional, pemerintah daerah harus mengalokasikan pemanfaatan anggaran 1% dari total anggaran belanja pemerintah daerah. Kondisi yang terjadi pada anggaran Inspektorat adalah kurang dari 1% yaitu 0,91% untuk Tahun Anggaran 2012 dan 0,93% untuk tahun anggaran 2013.

Untuk menjaga serta meningkatkan motivasi Inspektorat, Bupati, secara bertahap mulai memperhatikan kesejahteraan para pegawai Inspektorat dengan secara bertahap memenuhi semua harapan Inspektorat guna menghasilkan aparat auditor yang berkualitas sehingga menghasilkan audit yang berkualitas.

Terkait kendaraan operasional, para tenaga pengawas tidak diberikan fasilitas tersebut. Dalam kegiatan audit, kendaraan yang digunakan adalah kendaraan pribadi yang dimiliki oleh para tenaga pengawas tanpa diberikan uang sewa kendaraan. Keterangan dari staf pengawas, untuk kendaraan pribadi

yang digunakan dalam kegiatan pengawasan hanya diberikan uang untuk pembelian bahan bakar minyak yang jumlahnya tidak tentu setiap kali pelaksanaan audit.

Inspektorat tidak memiliki sarana prasarana yang digunakan untuk kegiatan pembuatan laporan hasil pemeriksaan dan pemeriksaan fisik pekerjaan seperti komputer, laptop, printer, alat ukur ketebalan aspal (cordrill) dan alat ukur lapisan tembok (hammer test). Sehingga kualitas audit Inspektorat berbeda jauh jika dibandingkan dengan kualitas audit BPK. Inspektorat sudah berusaha mengajukan pengadaan prasarana, akan tetapi tidak pernah disetujui oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

Berdasarkan Kartu Inventaris Barang (KIB), Inspektorat memiliki sarana dan prasarana pendukung audit dengan keterangan kondisi masih baik berupa 2 unit laptop, 8 unit printer, 7 unit Komputer PC, 1 unit proyektor, 1 unit sepeda motor dan 1 unit mobil. Laptop dikuasai oleh Inspektur dan Sekretaris Inspektorat, komputer dan printer terletak di masing-masing ruangan. Jumlah tersebut masih kurang memadai jika dibandingkan jumlah tenaga pengawas yang ada pada Inspektorat. Keterangan dari para tenaga pengawas diketahui bahwa dalam pelaksanaan kegiatan audit, para tenaga pengawas menggunakan laptop pribadi dan sebagian tidak menggunakan laptop.

Kondisi tersebut mengakibatkan Pegawai/Pengawas di Inspektorat tidak dapat menjalankan kegiatan audit dan revidi laporan keuangan secara memadai. Koordinasi antar Tim Pemeriksa Wilayah dalam Pembuatan laporan atas hasil pengawasan yang dilakukan juga menjadi terganggu akibat dari kurangnya infrastruktur yang tersedia sehingga mengakibatkan mereka harus bergantian membuat Laporan Hasil Pemeriksaan tersebut yang berakibat terlambat selesainya pembuatan Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat diserahkan kepada auditee sehingga tidak up-to date lagi untuk ditindaklanjuti.

Kamera sebagai salah satu alat minimal yang harus dipunyai Inspektorat baru diadakan di tahun 2014. Terkait dengan perolehan informasi mengenai peraturan-peraturan terbaru dan hubungan komunikasi dengan pihak luar terkait kegiatan audit dan revidi laporan keuangan, Inspektorat baru memiliki jaringan internet yang sangat penting dalam mendukung kegiatan tersebut di tahun 2014.

Komitmen Bupati dalam pelaksanaan tugas yang dilakukan Inspektorat sebagai salah satu lembaga teknis daerah yang merupakan unsur pengawas di Kabupaten Minahasa Tenggara sangat mutlak harus dipenuhi. Komitmen Bupati dapat dilihat dari ketersediaan anggaran yang memadai, pemenuhan jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai, dan tanggung jawab Kepala Daerah dalam menindaklanjuti seluruh laporan hasil pengawasan.

Ketegasan Kepala Daerah dalam hal ini Bupati sangat penting dalam menjalankan roda pemerintahan. Ketegasan itu dapat dilihat dari sikap Bupati apakah berani atau tidak menindak aparat di bawahnya baik itu Sekretaris Daerah (Sekda), para Asisten, para staf ahli, para Kepala Dinas, para Kepala Badan, para Kepala Kantor maupun para Kepala Bagian yang tidak bekerja dengan baik, tidak mampu membenahi pelaporan keuangan SKPD maupun bagian yang dia pimpin serta tidak mampu membereskan setiap temuan-temuan dari Inspektorat maupun Badan Pemeriksa Keuangan.

Hubungan yang harmonis antara Bupati dan Wakil Bupati dalam menjalankan roda pemerintahan sangat penting, supaya bawahan Pada periode Bupati dan Wakil Bupati terdahulu tidak terjalin hubungan yang harmonis dalam menjalankan roda pemerintahan, sehingga Wakil Bupati yang pada waktu itu sebagai koordinator pengawasan tidak bisa berbuat banyak dan tidak bisa melaporkan hasil pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan Inspektorat. Karenanya Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat hanya tertinggal di Inspektorat, tidak diserahkan kepada para Kepala SKPD untuk ditindaklanjuti. Karena tidak ada tindak lanjut maka LHP Inspektorat dianggap BPK tidak ada. Walaupun Inspektur berganti pola kerjanya tetap sama karena LHP dibuat tetapi tetap tidak ada tindak lanjutnya, sehingga kerja Inspektorat menjadi sia-sia. Karena hasil kerja dianggap sia-sia, maka pada saat Inspektur dijabat oleh Joseph Kolompoy sampai dengan Jonas Kalumata, laporan Inspektorat hanya sampai Pokok-Pokok Hasil Pemeriksaan (P2HP).

Rapat koordinasi untuk membersihkan setiap temuan yang ada baik temuan BPK maupun temuan aparat Inspektorat sangat diperlukan supaya pengelolaan keuangan setiap SKPD jadi lebih baik dan teratur. Komitmen Bupati membuat pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara lebih baik dengan mengejar opini BPK WTP berusaha diwujudkan dengan menggelar “JSRK (Jumat Siang Rapat koordinasi)” secara rutin.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **6.1 KESIMPULAN**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kondisi kualitas aparat Inspektorat Kabupaten Minahasa Tenggara dalam menghasilkan audit yang berkualitas pula. Berdasarkan hasil penelitian maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

- a. Jumlah dan Kompetensi Tenaga Pengawas pada Inspektorat Kabupaten Minahasa Tenggara Kurang dan Belum Mendukung Kegiatan Audit;
- b. Kurangnya pemberian bimbingan teknis (bimtek), pendidikan dan pelatihan (diklat) kepada para tenaga pengawas;
- c. Infrastruktur Penunjang dan Pendukung yang Dimiliki APIP Belum Mendukung Kegiatan Audit dan Reviu Laporan Keuangan;
- d. Anggaran yang diberikan kepada Inspektorat sebagai pendukung kegiatan pengawasan kurang dari 1% dari anggaran belanja Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara;
- e. Komitmen Kepala Daerah terdahulu bagi terciptanya Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah yang clean and good governance kurang.

### **6.2 SARAN**

- a. Mencukupi kebutuhan jumlah pegawai pada bidang pengawasan dengan apa yang ada sekarang dimaksimalkan, dengan mengikutsertakan para pegawai Inspektorat dalam kegiatan bimbingan teknis (bimtek) serta pendidikan dan pelatihan (diklat) baik itu Jabatan Fungsional Auditor (JFA) yang diadakan oleh BPKP sebagai koordinator maupun jabatan fungsional Pejabat Pengawas Urusan Pemerintah Daerah (P2UPD) yang diadakan oleh Inspektorat Jenderal Departemen Dalam Negeri (Itjen Depdagri);
- b. Agar Inspektur sebagai anggota Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) melarang apabila staf pengawasnya baik auditor maupun P2UPD dipindahkan ke Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lain, kecuali mereka yang dipromosikan untuk menjabat sekretaris di SKPD lain atau menduduki jabatan eselon 2;
- c. Agar Inspektur menginstruksikan Kepala BKDD dalam melakukan pola mutasi pegawai pada Inspektorat Kabupaten Minahasa Tenggara agar memperhatikan kompetensi pegawai;
- d. Agar Inspektur Kabupaten Minahasa Tenggara lebih cermat dalam pengadaan sarana dan prasarana pendukung kegiatan audit dan reviu Laporan Keuangan;
- e. Agar Bupati Minahasa Tenggara memenuhi anggaran untuk Inspektorat sebesar 1 % dari Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Minahasa Tenggara sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2008 secara terus-menerus;
- f. Agar Bupati Minahasa Tenggara terus menjaga serta meningkatkan komitmennya atas pelaporan keuangan pemerintah daerah yang lebih baik sehingga terciptanya clean and good governance dengan terus melaksanakan program “JSRK (Jumat Siang Rapat Koordinasi)”.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Afiah, Nunuy Nur. 2009. Pengaruh Kompetensi Anggota DPRD dan Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah terhadap Pelaksanaan Sistem Informasi Akuntansi. *October 2009 Research Days*. Bandung: Fakultas Ekonomi Universitas Padjadjaran.

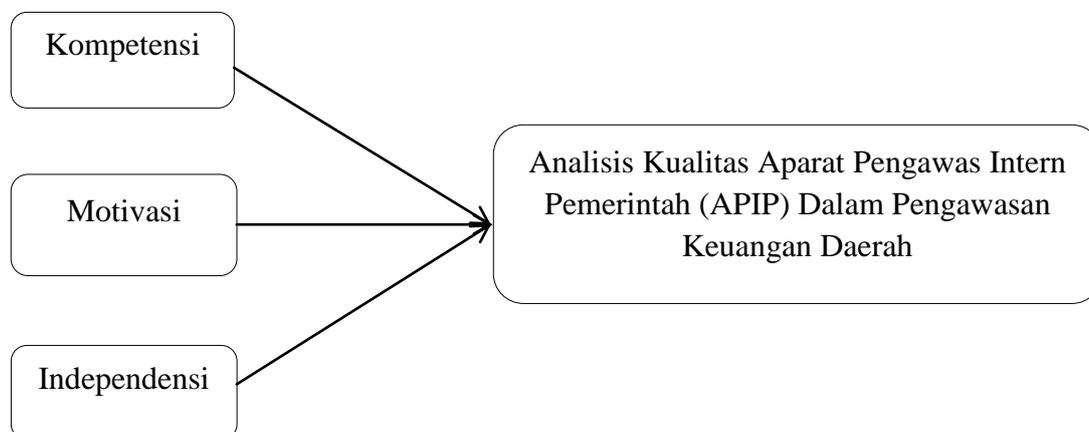
- Alim, M.N., T. Hapsari, dan L. Purwanti. 2007. Pengaruh Kompetensi dan Independensi terhadap Kualitas Audit dengan Etika Auditor sebagai Variabel Moderasi. *Simposium Nasional Akuntansi X*. Makassar
- Arens, A.A., J.K. Loebbecke. 2000. *Auditing: An Integrated Approach*. Eight Edition. New Jersey: Prentice Hall International Inc.
- Arikunto, S. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Cetakan Ke dua belas, edisi revisi V. Jakarta : Rineka Cipta
- Ashari, Ruslan. 2011. Pengaruh Keahlian, Independensi, Dan Etika Terhadap Kualitas Auditor Pada Inspektorat Provinsi Maluku Utara. Skripsi. Universitas Hasanuddin Makasar.
- Atkinson, Rita L., dkk. 1999. *Pengantar Psikologi Jilid 1*. Jakarta: Penerbit Erlangga. Sobur, Alex. 2009. *Psikologi Umum*. Bandung : Pustaka Setia
- Bedrad, J. dan Michelene, Chi. T.H 1998, Expertise in Auditing of Accounting Practice & Theory.
- Basuki dan Krisna, Y. Mahardani. 2006. "Pengaruh Tekanan Anggaran Waktu terhadap Perilaku Disfungsional Auditor dan Kualitas Audit pada Kantor Akuntan Publik di Surabaya." *Jurnal Manajemen Akuntansi & Sistem Informasi MAKSI UNDIP (Agustus): vol. 6, No. (2), 177-256*.
- Beattie, V., and S. Fearnley. 1995. The Importance of Audit Firm Characteristics and the Drivers of Auditor Change in UK Listed Companies. *Accounting and Business Research* 25:227-239.
- BPK. 2013. Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Kegiatan Audit dan Reviu Laporan Keuangan oleh Inspektorat Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun Anggaran 2012 dan Semester I Tahun Anggaran 2013.
- BPKP. 1998. *Modul Diklat Peningkatan Kemampuan APFP Provinsi DI Yogyakarta*. Unit Pengelola Pendidikan dan Latihan Pengawasan Perwakilan BPKP DI Yogyakarta.
- Brown. Clifford D. & K. Raghunandan, 1997. *Audit Quality in Audits of Federal Programs by Non-Federal Auditors: A Reply*. *Accounting Horizon Vol.11 No.1. American Accounting Association*.
- Cahyat, A. 2004. Sistem Pengawasan terhadap Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten. Pembahasan Peraturan Perundangan di Bidang Pengawasan. *Governance Brief Number 3*
- DeAngelo, LE, 1981, *Auditor Size and Audit Quality*, *Journal of Accounting and Economics* December 1981.
- Deis, D.R dan G.A. Groux. 1992. *Determinants of Audit Quality in The Public Sector*. *The Accounting Review*. Juli. p. 426 – 479.
- Hasbara, Dona M. 2012. Usaha Peningkatan Kualitas Audit yang Dilakukan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). Skripsi. Fakultas Ekonomi UI.
- Elfarini, Cristina. 2007. Pengaruh Kompetensi dan Independensi Auditor Terhadap Kualitas Audit. Skripsi. Fakultas Ekonomi UNNES.
- Goleman, D. 2001. *Working White Emotional intelligence*. (terjemahan Alex Tri Kantjono W). Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama
- Harhinto, T. 2004. Pengaruh Keahlian dan Independensi terhadap Kualitas Audit, Studi Empiris pada KAP di Jawa Timur. *Tesis tidak dipublikasikan*. Universitas Diponegoro Semarang.
- Haryanto, Sahmuddin, dan Arifuddin. 2007. *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi pertama. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang
- Ida, Suraida. 2005. Pengaruh Etika, Kompetensi, Pengalaman Audit dan Risiko Audit terhadap Skeptisisme Profesional Auditor dan Ketepatan Pemberian Opini Akuntan Publik. *Sosiohumaniora*, Vol. 7 No. 3, November 2005: 186-202.
- Kusharyanti. 2003. "Temuan penelitian mengenai kualitas audit dan kemungkinan topik penelitian di masa datang". *Jurnal Akuntansi dan Manajemen (Desember)*. Hal.25-60
- Lowenshon, S., Johnson E.L., dan Elder J.R. 2005. *Auditor Specialization and Perceived Audit Quality, Auditee Satisfaction, and Audit Fees in the Local Government Audit Market*
- Malayu S.P. Hasibuan, (1996), *Organisasi&Motivasi, Dasar Peningkatan Produktivitas*, Bumi Aksara, Jakarta
- Makmun, A.S., 2003, *Panduan Studi Psikologi Pendidikan*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya.
- Mardiasmo, 2002, *Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah*, Yogyakarta: Penerbit Andi
- Mardiasmo. 2006. Pewujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik: Suatu Sarana Good Governance. *Jurnal Akuntansi Pemerintah* Vol. 2, No. 1

- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik* Edisi 4. Penerbit Andi. Yogyakarta
- Mayangsari, S. 2003. Pengaruh Keahlian Audit dan Independensi terhadap Pendapat Audit: Suatu Kuasieksperimen. *Jurnal Riset Akuntansi Indonesia* Vol. 6 No. 1. Januari
- Messier, F.W., V.S. Glover, dan F.D. Prawitt. 2005. *Jasa Audit dan Assurance: Suatu Pendekatan Sistematis*. Diterjemahkan oleh Nuri Hinduan. Edisi 4 Buku 1 & 2. Penerbit Salemba Empat. Jakarta
- Mock, T. J., and M. Samet. 1982. A Multi-attribute Model for Audit Evaluation. *Proceedings of the VI University of Kansas Audit Symposium*, May 20 21, School of Business, University of Kansas. Kansas KS.
- Moekijat. 2002. *Dasar-Dasar Motivasi*, Pioner Jaya, Jakarta
- Efendy, Muh. T. Pengaruh kompetensi independensi dan motivasiterhadap kualitas audit aparat Inspektorat dalam pengawasan keuangan daerah. Tesis. Universitas Diponegoro. Semarang.
- Mulyadi. 1992. *Pemeriksaan Akuntan*. Yogyakarta: Badan Penerbit STIE YKPN Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2007. *Standar Pemeriksaan Keuangan Negara*. Jakarta
- Nurbarani, Myrna, Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Surakarta. Tesis. Universitas Diponegoro. Semarang
- Peraturan Kepala BPKP Nomor KEP-971/K/SU/2005 tentang Pedoman Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Auditor di Lingkungan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah
- Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara nomor PER/05/M.PAN/03/2008. *Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah*. Jakarta.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah.
- Peraturan Bupati Minahasa Tenggara Nomor 05 Tahun 2009. *Tentang Penjabaran Tugas Pokok Dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Minahasa Tenggara*. Sulawesi Utara.
- Pramono, E.S. 2003. Transformasi Peran Internal Auditor dan Pengaruhnya bagi Organisasi. *Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi* Vol. 3 No.2 Agustus.
- Pramudito, Agung. 2014. Pengaruh Kualitas Pemeriksaan Oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah (Apip) Terhadap Level Of Reliance Pemeriksa Badan Pemeriksa Keuangan Kepada APIP. Skripsi. Universitas Diponegoro Semarang.
- Pusdiklatwas BPKP. 2005. Kode Etik dan Standar Audit. Edisi Keempat.
- Robbins, S.P., T.A. Judge. 2008. *Perilaku Organisasi*, edisi 12. Jakarta: Salemba Empat.
- Rohman, A. 2007. Pengaruh Peran Manajerial Pengelola Keuangan Daerah dan Fungsi Pemeriksaan Intern terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. *Jurnal Manajemen Akuntansi dan Sistem Informasi* Vol. 7 No. 2. Januari.
- Rustandi, R. Achmad. 1985. *Gaya Kepemimpinan – Pendekatan Bakat Situasional*, PT. Armico, Bandung
- Saifuddin. 2004. Pengaruh Kompetensi dan Independensi Terhadap Opini Audit Going Concern (Studi Kuasieksperimen pada Auditor dan Mahasiswa). Semarang. Tesis tidak dipublikasikan. Universitas Diponegoro. Semarang
- Samelson, D., Lowenshon, S., and Johnson, L. 2006. *The Determinants of Perceived Audit Quality and Auditee Satisfaction in Local Government*. *Journal of Public Budgeting, Accounting, & Financial Management*, Vol. 18, No. 2
- Sarundajang, 2004. Pembukaan Sosialisasi Peraturan Perundang – Undangan Bidang Pengawasan, Jakarta.
- Schroeder, M., I. Solomon, and D. Vickery. 1986. Audit Quality: The Perceptions of Audit Committee Chairpersons and Audit Partners. *Auditing: A Journal of Practice and Theory* 5 (2):86-94.
- Sososutikno, C. 2003. Hubungan Tekanan Anggaran Waktu dengan Perilaku Disfungsional serta Pengaruhnya terhadap kualitas Audit. *Simposium Nasional Akuntansi VI*. Surabaya
- Sri Lastanti, Hexana. 2005. Tinjauan Terhadap Kompetensi dan Independensi Akuntan Publik : Refleksi Atas Skandal Keuangan. *Media Riset Akuntansi, Auditing dan Informasi* Vol.5 No.1 April 2005.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Penerbit Alfabeta. Bandung
- Sukriah, Akram dan Inapty, Akram, dan Inapty. 2009. “Pengaruh Pengalaman Kerja, Independensi, Obyektifitas, Integritas dan Kompetensi Terhadap Kualitas Hasil Pemeriksaan”. Simposium Nasional Akuntansi XII. Palembang.

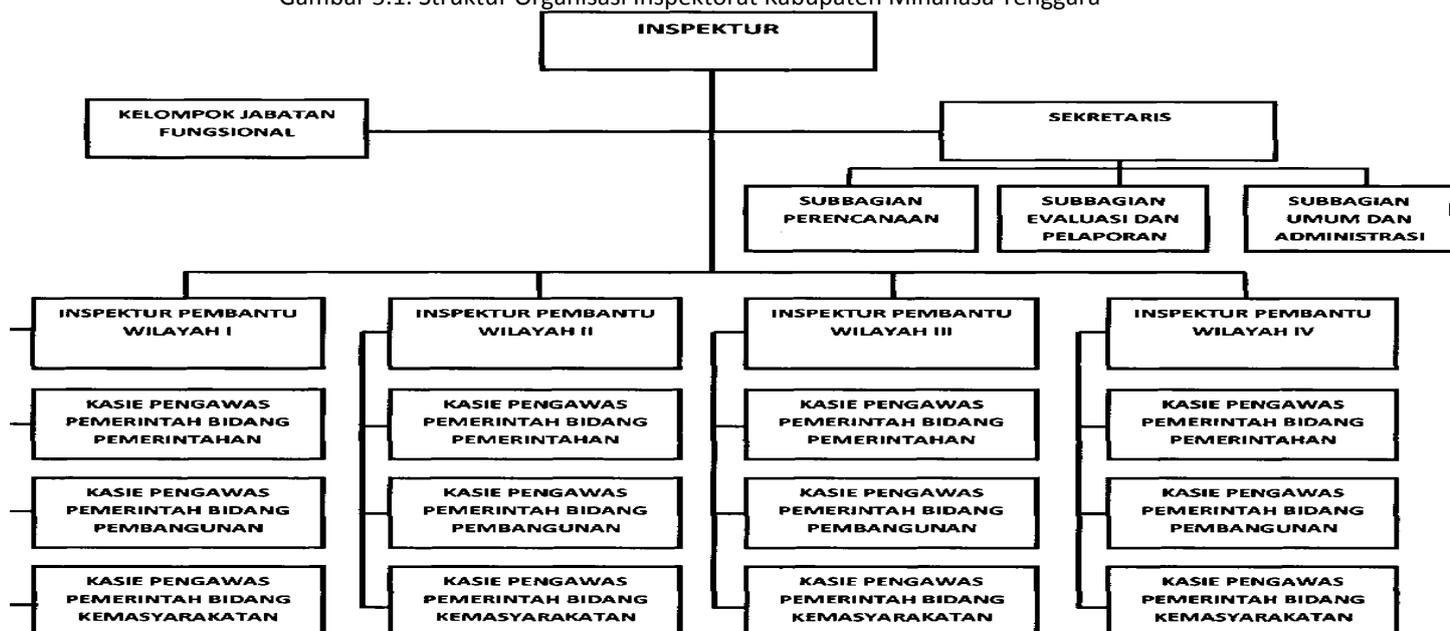
- Sunarsip, 2001, Coorporat Governance Audit : Paradigma Baru Profesi Akuntansi dalam Mewujudkan Good Coorporate Gvernance, *Media Akuntansi*, No. 17/Th. VII.pp. II-VII
- Supriyono, R.A. 1988. Pemeriksaan Akuntan (Auditing) Faktor-faktor yang Mempengaruhi Independensi Penampilan Akuntan Publik. Penerbit BPFE. Yogyakarta
- Surya Dharma,(2005), Manajemen Kinerja; falsafah Teori dan Penerapannya, Cetakan I, Penerbit Pustaka Pelajar,Yogyakarta.
- Susmanto, Bintang. 2008. Pengawasan Intern pada Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat. Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat.  
<http://www.menkokesra.go.id/content/view/117/323/>
- Sutton, S. G. 1993. Toward an Understanding of the Factors Affecting Audit Quality and the Audit Process. *Decision Sciences* 24 (1):88-105.
- Suwandi. 2005. Pengaruh Kejelasan Peran dan Motivasi Kerja terhadap Efektivitas Pelaksanaan Tugas Jabatan Kepala Sub Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Propinsi Jawa Timur. *Tesis tidak dipublikasikan*. Universitas Airlangga Surabaya.
- Tampubolon, R. 2005. *Risk and Systems-Based Internal Audit*. Penerbit Elex Media Komputindo. Jakarta
- Wahjosumidjo. 1987. *Kepemimpinan dan Motivasi*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Warming-Rasmussen, B., and L. Jensen. 1998. Quality Dimensions in External Audit Services - An External User Perspective. *European Accounting Review* 7 (1):65-82.
- Wibowo,(2007), Manajemen Kinerja, Edisi Dua, Penerbit PT.Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Zawitri, Sari. 2009. Analisis Faktor-Faktor Penentu Kualitas Audit Yang Dirasakan dan Kepuasan *Auditee* di Pemerintahan Daerah. Tesis. Universitas Diponegoro. Semarang.

## TABEL DAN GAMBAR

Gambar 3.1  
Kerangka Konseptual



Gambar 5.1. Struktur Organisasi Inspektorat Kabupaten Minahasa Tenggara



Tabel 5.1. Hasil Perhitungan Analisis Beban Kerja

Rincian perhitungan pada lampiran

No	Jabatan	Kebutuhan	Jumlah Yang ada	Selisih
1	Auditor Ahli Utama/P2UPD Utama	1	0	-1
2	Auditor Ahli Madya/P2UPD Madya	2	0	-2
3	Auditor Ahli Muda/P2UPD Muda	6	0	-6
4	Auditor Ahli Pertama/ Auditor Terampil/P2UPD Pertama	18	0	-18
5	Non Auditor/Non P2UPD	0	29	29
<b>Jumlah</b>		<b>27</b>	<b>29</b>	<b>2</b>

Sumber LHP APBP BPK

Tabel 5.3. Anggaran dan Realisasi Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase
2012	72.500.000,00	72.225.000,00	99,62
2013	123.500.000,00	-	-
2014 (semester III)	102.000.000,00	82.500.000,00	80,88

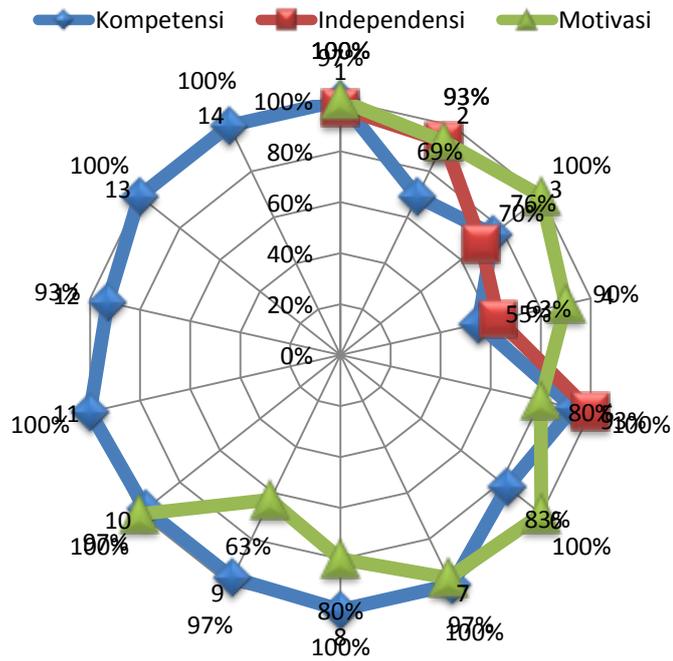
Sumber DPPKAD

Tabel 5.4. Perbandingan Anggaran Pemda dengan Anggaran Inspektorat

No.	Tahun	Anggaran Pemda (Rp)	Anggaran Inspektorat (Rp)	Persentase anggaran Inspektorat pada Pemda (%)
1	2012	426.828.954.882,05	3.875.120.938,00	0,91
2	2013	462.882.110.146,00	4.295.809.827,00	0,93
3	2014	528.937.317.900,00	5.289.373.179,00	1,00

Sumber DPPKAD

**Gambar 5.2. Jaring Laba-Laba antara Kompetensi, Independensi dan Motivasi dalam Hubungannya dengan Kualitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah**



# PENGARUH UKURAN PERUSAHAAN, PROFITABILITAS PERUSAHAAN, SOLVABILITAS PERUSAHAAN DAN LIKUIDITAS PERUSAHAAN TERHADAP PENUNDAAN AUDIT PADA PERUSAHAAN *CONSUMER GOODS* YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA

Nikita Melisa Rattu  
David Paul Elia Saerang  
Grace Nangoi

[Nikitarattu@ymail.com](mailto:Nikitarattu@ymail.com)

## ABSTRACT

*Presentation of information can be useful when presented accurately and timely when needed by users of financial statements. Audit report is financial statements audited by the auditor. The information contained in the financial statements referred helpful if presented accurately and timely, which is available when needed by the users of financial statements, such as creditors, investors, governments, communities and other parties as a basis for making a decision .*

*The data used are secondary data, the financial statements of nine companies from food and beverage sub-sectors listed in Indonesia Stock Exchange in 2010-2013. To prove the hypothesis, used multiple regression testing*

*partial test concluded that the profitability, solvency, Company Size and Liquidity not significantly affect audit delay in the sub-sector firms in the food and beverage IDX. Simultaneous testing concluded that the profitability, solvency, Company Size and Liquidity simultaneously no significant effect on the Audit Delay companies sector food and beverage sub IDX*

**Keywords:** *Audit delay, Company Size, Profitability, Liquidity Company, Company Solvency*

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Semakin berkembangnya dunia usaha di Indonesia menyebabkan perusahaan-perusahaan besar membutuhkan sumber pendanaan dari luar. Salah satu sumber tersebut adalah penerbitan saham kepada masyarakat luas, yang disebut dengan *go public*. Perusahaan *go public* wajib menerbitkan laporan keuangan pada setiap akhir periode akuntansi sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat, khususnya investor dan calon investor.

Penyajian informasi keuangan dapat bermanfaat bilamana disajikan secara akurat dan tepat waktu pada saat dibutuhkan oleh pemakai laporan keuangan. Laporan audit adalah laporan keuangan yang telah di audit oleh auditor. Nilai dan ketepatan waktu pelaporan keuangan merupakan faktor penting bagi kemanfaatan laporan keuangan. Laporan keuangan tersebut terdiri dari neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan. Ketepatan waktu ini terkait dengan manfaat dari laporan keuangan itu sendiri dan merupakan unsur penting dalam pengambilan keputusan investasi. Karakteristik kualitatif merupakan ciri khas yang membuat informasi dalam laporan keuangan berguna bagi pengguna. Terdapat empat karakteristik kualitatif pokok yaitu : dapat dipahami, relevan, keandalan, dan dapat diperbandingkan.

Informasi yang terkandung dalam laporan keuangan disebut bermanfaat jika disajikan secara akurat dan tepat waktu, yakni tersedia saat dibutuhkan oleh para pengguna laporan keuangan, seperti kreditor, investor, pemerintah, masyarakat dan pihak-pihak lain sebagai dasar pengambilan suatu keputusan. Menurut Givoly dan Palmon (2000:Vol VII No 3) dalam Aryati (2005), nilai dari ketepatan waktu pelaporan keuangan merupakan faktor penting bagi kemanfaatan laporan keuangan tersebut. Sementara Halim (2000) menyebutkan bahwa ketepatan waktu penyajian laporan keuangan dan laporan audit (*timeliness*) menjadi prasyarat utama bagi peningkatan harga saham perusahaan tersebut...

Ketertundaan laporan keuangan ini dapat berdampak negatif pada reaksi pasar. Makin lama masa tunda, maka relevansi laporan keuangan makin diragukan. Chambers dan Penman (2001) dalam Subekti (2004) menunjukkan bahwa pengumuman laba yang terlambat menyebabkan *abnormal returns* negatif

sedangkan pengumuman laba yang lebih cepat menunjukkan hasil sebaliknya. Hal ini terjadi dikarenakan investor pada umumnya menganggap keterlambatan pelaporan keuangan merupakan pertanda buruk bagi kondisi kesehatan perusahaan

Makin lama auditor menyelesaikan pekerjaan auditnya, semakin lama pula *audit delay*. Namun bisa jadi auditor memperpanjang masa auditnya dengan menunda penyelesaian audit laporan keuangan karena alasan tertentu, semisal pemenuhan standar untuk meningkatkan kualitas audit oleh auditor yang akhirnya menuntut waktu lebih lama sebagaimana tercantum dalam Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) dari Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) tentang Standar Pekerjaan Lapangan yang mengatur prosedur dalam penyelesaian pekerjaan lapangan bagi auditor, bahwa auditor perlu memiliki perencanaan atas aktivitas yang akan dilakukan. Juga perlu pemahaman yang memadai atas struktur pengendalian internal, diikuti dengan pengumpulan bukti-bukti kompeten yang diperoleh melalui inspeksi, pengamatan, pengajuan pertanyaan, dan konfirmasi sebagai dasar dalam menyatakan pendapat atas laporan keuangan.

### **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian sebelumnya, maka perumusan masalahnya adalah sebagai berikut

1. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap audit delay?
2. Apakah profitabilitas perusahaan berpengaruh terhadap audit delay?
3. Apakah solvabilitas perusahaan berpengaruh terhadap audit delay?
4. Apakah likuiditas perusahaan berpengaruh terhadap audit delay?
5. Apakah ukuran perusahaan, profitabilitas perusahaan, solvabilitas perusahaan, dan likuiditas perusahaan berpengaruh terhadap audit delay?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis pengaruh ukuran perusahaan berpengaruh terhadap audit delay.
2. Untuk menganalisis pengaruh profitabilitas perusahaan berpengaruh terhadap audit delay.
3. Untuk menganalisis pengaruh solvabilitas perusahaan berpengaruh terhadap audit delay.
4. Untuk menganalisis pengaruh likuiditas perusahaan berpengaruh terhadap audit delay.
5. Untuk menganalisis pengaruh ukuran perusahaan, profitabilitas perusahaan, solvabilitas perusahaan, dan likuiditas perusahaan berpengaruh terhadap audit delay.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Membantu auditor dalam mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi *audit delay* sehingga dapat mengoptimalkan kinerja yang berimbas pada tepatnya waktu pelaporan keuangan
2. Memberi deskripsi tentang faktor-faktor yang mempengaruhi *audit delay* di Indonesia, dimana bukti empiris tersebut dapat dijadikan tambahan wawasan dalam penelitian berikutnya.
3. Hasil penelitian dapat dijadikan pedoman dalam melakukan pekerjaan audit sehingga mempersingkat rentang waktu audit; meningkatkan efisiensi dan efektivitas dengan mencermati faktor-faktor yang dominan mempengaruhi *audit delay*

## **KERANGKA TEORITIS**

### **2.1 Grand Theory : Teori Pengambilan Keputusan**

Proses pengambilan keputusan diawali dengan adanya kebutuhan yang berusaha untuk dipenuhi. Pemenuhan kebutuhan ini terkait dengan beberapa alternatif sehingga perlu dilakukan evaluasi yang bertujuan untuk memperoleh alternatif terbaik dari persepsi konsumen. Di dalam proses membandingkan ini konsumen memerlukan informasi yang jumlah dan tingkat kepentingannya tergantung dari kebutuhan konsumen serta situasi yang dihadapinya

Pengertian Pengambilan Keputusan dikemukakan oleh :

- a. Ralp C. Davis;
- b. Mary Follet;
- c. James A.F. Stoner

## 2.2 Definisi Audit

Definisi audit (*auditing*) menurut Messier (2003:8) adalah suatu proses sistematis mendapatkan dan mengevaluasi bukti-bukti secara objektif sehubungan dengan asersi atas tindakan dan peristiwa ekonomi untuk memastikan tingkat kesesuaian antara asersi-asersi tersebut dan menetapkan kriteria serta mengkomunikasikan hasilnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan

Secara umum definisi pemeriksaan menurut Mulyadi (2002:9) dalam bukunya *Auditing* adalah sebagai berikut :“*Auditing* adalah suatu proses sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai pernyataan-pernyataan tentang kegiatan dan kejadian ekonomi, dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan-pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta penyampaian hasil-hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan

## 2.3 Jenis-Jenis Pemeriksaan

Jenis-jenis pemeriksaan menurut Sukrisno Agoes (2004:9) dalam bukunya *Auditing* (Pemeriksaan Akuntan) oleh Kantor Akuntan Publik adalah sebagai berikut :

Ditinjau dari luasnya pemeriksaan, audit bisa dibedakan atas :

1. *General Audit* (Pemeriksaan Umum)
2. *Special Audit* (Pemeriksaan Khusus)”.

## 2.4 Tujuan Audit

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2001), tujuan audit atas laporan keuangan oleh auditor independen pada umumnya adalah untuk menyatakan pendapat tentang kewajaran dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, perubahan ekuitas dan arus kas sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia

Kewajaran laporan keuangan dinilai berdasarkan asersi yang terkandung dalam setiap unsur yang disajikan dalam laporan keuangan. Dalam menghasilkan jasa audit, auditor memberikan keyakinan atas asersi yang dibuat oleh manajemen dalam laporan keuangan historis.

## 2.5 Standar Auditing

Standar auditing yang telah ditetapkan dan disahkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (2011:150.1-150.2) dalam Sukrisno Agoes (2012:31), terdiri dari sepuluh standar yang dikelompokkan menjadi tiga kelompok besar yakni Standar Umum, Standar Pekerjaan Lapangan, Standar Pelaporan

## 2.6 Laporan Keuangan

Laporan keuangan merupakan laporan yang disusun secara sistematis tentang kinerja dan posisi keuangan suatu lembaga/organisasi/ perusahaan dalam suatu periode tertentu. Ini menunjukkan bahwa laporan keuangan dapat dijadikan acuan untuk menilai kinerja lembaga yang menerbitkan laporan tersebut, dan kemampuan keuangan suatu organisasi/perusahaan. Informasi yang ada dalam laporan keuangan bersifat umum, tidak sepenuhnya dapat memenuhi kebutuhan informasi setiap pemakai, namun informasi yang disajikan masih dalam kategori memadai untuk pengambilan kebijakan ( Mursydi 2010:23 ). Konsep pengungkapan yang umumnya diusulkan adalah pengungkapan yang cukup (*adequate*), wajar (*fair*), dan lengkap (*full*).

## 2.7 Audit Delay ( Penundaan Audit )

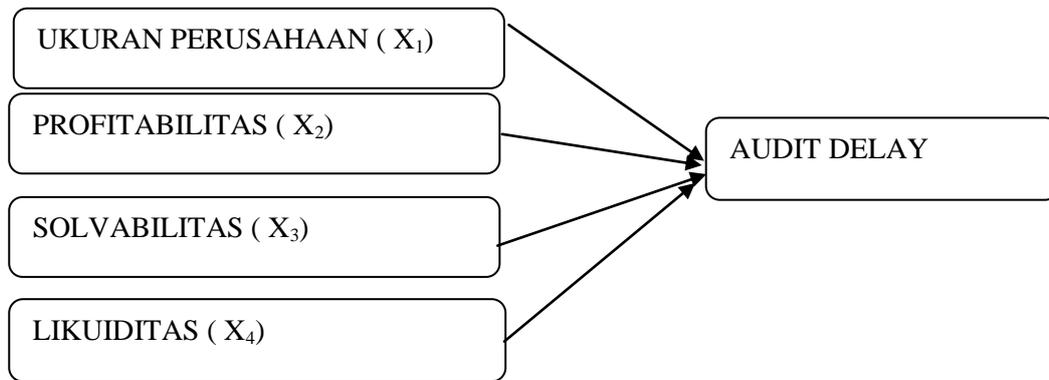
Audit Delay adalah lamanya waktu penyelesaian audit yang diukur dari tanggal penutupan tahun buku, hingga tanggal diselesaikannya laporan audit independen (Wiwik Utami, 2006:4)

*Audit delay* didefinisikan sebagai lamanya waktu penyelesaian audit yang diukur dari tanggal penutupan tahun buku hingga tanggal diterbitkannya laporan audit (Halim, 2000:46). Menurut Lawrence dan Briyan (1988) dalam Yugo Trianto (2006:31) Audit Delay adalah lamanya hari yang dibutuhkan auditor untuk menyelesaikan pekerjaannya, yang diukur dari tanggal penutupan tahun buku hingga tanggal diterbitkannya laporan keuangan audit

Diungkap dalam penelitian Subekti dan Widiyanti (2004), perbedaan waktu yang sering dinamai dengan *audit delay* adalah perbedaan antara tanggal laporan keuangan dengan tanggal opini audit dalam laporan keuangan yang mengindikasikan tentang lamanya waktu penyelesaian audit yang dilakukan oleh auditor. Maka semakin panjang *audit delay* semakin lama auditor dalam menyelesaikan pekerjaannya.

## KERANGKA KONSEPTUAL

### 3.1 Kerangka Konseptual



### 3.2 Hipotesis

Hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Diduga Ukuran perusahaan secara parsial berpengaruh terhadap Audit Delay.  
Ha :  $X_1 \neq 0$
2. Diduga Profitabilitas secara parsial berpengaruh terhadap Audit Delay.  
Ha :  $X_2 \neq 0$
3. Diduga Solvabilitas secara parsial berpengaruh terhadap Audit Delay.  
Ha :  $X_3 \neq 0$
4. Diduga Likuiditas secara parsial berpengaruh terhadap Audit Delay.  
Ha :  $X_4 \neq 0$
5. Diduga Ukuran perusahaan, Profitabilitas, Solvabilitas dan Likuiditas secara simultan berpengaruh terhadap Audit Delay.  
Ha :  $X_1, X_2, X_3, X_4 \neq 0$

### Metode Penelitian

#### 4.1 Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini meliputi perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Bursa efek Indonesia khususnya Sub sektor makanan dan Minuman. Dalam penelitian ini diambil sampel 9 perusahaan dari 19 perusahaan sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di bursa efek Indonesia dengan tahun penelitian 2010,2011,2012,2013,2014

#### 4.2 Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini membutuhkan data sekunder berupa laporan keuangan perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Laporan keuangan tersebut disyaratkan telah diaudit dengan tahun terbit 2010, 2011, 2012, dan 2013

#### 4.3 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data menggunakan teknik dokumentasi, yaitu dengan melihat dokumen yang sudah terjadi (laporan keuangan dan laporan audit perusahaan). Laporan keuangan auditan perusahaan diperoleh dari akses website Bursa Efek Indonesia ([www.idx.co.id](http://www.idx.co.id))

#### 4.4 Metode Analisis

Pada penelitian ini, pengujian dilakukan dengan analisis regresi linier berganda, yaitu suatu metode statistik yang umum digunakan untuk meneliti hubungan antara sebuah variabel dependen dengan beberapa variabel independen.

Adapun model regresi yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$AUDELAY = \beta_0 + \beta_1 \text{SIZE} + \beta_2 \text{PROF} + \beta_3 \text{SOLV} + \beta_4 \text{LIK} + \varepsilon$$

Keterangan :

- AUDELAY = jangka waktu tanggal penutupan tahun buku dengan Tanggal opini Laporan keuangan auditor Independen
- SIZE = ukuran perusahaan
- PROF = profitabilitas (*net income to total asset*)

SOLV = solvabilitas (*total debt to total asset*)  
 LIK = Likuiditas *curren ratio* (*aktiva lancar to hutang lancar*)

#### 4.5 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

Dalam penelitian ini variabel dependen (Y) adalah penundaan audit (*audit delay*) sedangkan variabel independen (X) adalah Ukuran Perusahaan ( $X^1$ ), Profitabilitas ( $X^2$ ), Solvabilitas ( $X^3$ ), dan likuiditas ( $X^4$ )

Definisi operasional dan pengukuran untuk variabel-variabel tersebut adalah

Penundaan Audit / *Audit Delay* (Y)

Dalam penelitian ini, variabel dependennya adalah penundaan audit /*audit delay* yang diukur secara kuantitatif dalam jumlah hari, ialah jangka waktu antara tanggal penutupan tahun buku hingga tanggal yang tertera pada laporan auditor independen. Sebagai contoh, laporan keuangan perusahaan periode 2005 dengan tanggal tutup buku 31 Desember 2005 mempunyai laporan auditor dengan tanggal 21 Maret 2006. Dengan demikian *audit delay* pada perusahaan tersebut sebesar 80 hari

Ukuran Perusahaan / SIZE ( $X^1$ )

Ukuran Perusahaan dapat diklasifikasikan dalam berbagai cara. Dalam penelitian ini, ukuran perusahaan dihitung dengan menggunakan total asset yang dimiliki perusahaan. Ukuran perusahaan diprosikan dengan nilai logaritma untuk menghaluskan besarnya angka dan menyamakan ukuran saat regresi. Ukuran Perusahaan =  $t \log(\text{total asset})$

Profitabilitas / PROFIT ( $X^2$ )

Profitabilitas diukur dari *net income* dibagi dengan *total asset*. Perusahaan dengan tingkat profitabilitas tinggi diduga membutuhkan waktu lebih pendek guna menyelesaikannya audit.

$$ROA = \frac{\text{Net Income}}{\text{Total Assets}} \times 100\%$$

Solvabilitas / SOLV ( $X^3$ )

Solvabilitas diukur menggunakan rasio DER yaitu rasio perbandingan antara nilai *total debt* dengan nilai *total modal sendiri*. Menurut Kasmir (2012:157), "DER berguna untuk mengetahui jumlah dana yang disediakan pemegang (kreditur) dengan pemilik perusahaan." Dengan kata lain, rasio ini berfungsi untuk mengetahui setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan untuk jaminan utang." Menurut Kasmir (2012:158) secara matematis DER dapat dihitung dengan menggunakan rumus :

$$DER = \frac{\text{Total Hutang}}{\text{Total Equity}} \times 100\%$$

Likuiditas /LIK ( $X^4$ )

Likuiditas diukur menggunakan rasio Current Ratio yaitu rasio perbandingan antara nilai *aktiva lancar* dengan nilai *hutang lancar*

### HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

#### Uji Normalitas

##### Uji Normalitas Data One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Profitabilitas	Solvabilitas	Ukuran Perusahaan
N		45	45	45
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	1.9668	-.1405	2.6555
	Std. Deviation	.24908	.29606	.12282
Most Extreme Differences	Absolute	.172	.118	.141
	Positive	.097	.118	.080
	Negative	-.172	-.111	-.141
Kolmogorov-Smirnov Z		1.157	.794	.949
Asymp. Sig. (2-tailed)		.137	.555	.329

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

### One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Likuiditas	Audit Delay
N		45	45
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	11.7779	84.0042
	Std. Deviation	1.24707	14.00557
Most Extreme Differences	Absolute	.154	.134
	Positive	.124	.134
	Negative	-.154	-.105
Kolmogorov-Smirnov Z		1.034	.901
Asymp. Sig. (2-tailed)		.235	.392

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Sumber : Data Diolah Penulis, 2015

Pada tabel dan gambar di atas menunjukkan hasil uji Normalitas data pada variable Profitabilitas dengan probabilitas signifikansi sebesar  $0,137 > 0,05$ , pada variable Solvabilitas dengan probabilitas signifikansi sebesar  $0,555 > 0,05$ , variable Ukuran Perusahaan dengan probabilitas signifikansi sebesar  $0,329 > 0,05$ , variable Likuiditas dengan probabilitas signifikansi sebesar  $0,235 > 0,05$  dan variable Audit Delay dengan probabilitas signifikansi sebesar  $0,392 > 0,05$  dan dapat dilihat bahwa penyebaran data berada pada sekitar garis diagonal dan mengikuti garis arah diagonal, maka nilai residual terstandarisasi. Dengan demikian maka model regresi berganda memenuhi asumsi normalitas, berarti berdistribusi normal atau model telah memenuhi asumsi normalitas.

Uji Multikolinieritas

#### Uji Multikolinieritas Coefficients<sup>a</sup>

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
Profitabilitas	.828	1.208
Solvabilitas	.569	1.757
Ukuran Perusahaan	.724	1.381
Likuiditas	.572	1.747

a. Dependent Variable: Audit Delay

Sumber : Data Diolah Penulis, 2015

Hasil analisis pada Tabel di atas, diketahui bahwa keseluruhan variabel pada model regresi dengan dependen variabel *Audit Delay* besarnya nilai VIF tidak melebihi angka 1, dengan nilai Tolerance sebesar tidak melebihi angka 10. Dengan demikian, berdasarkan data hasil analisis pada Tabel dan ketentuan pengujian multikolinieritas tersebut, diketahui bahwa keseluruhan variabel pada model regresi dengan dependen variabel *Audit Delay* memiliki nilai VIF disekitar angka 1, dan nilai Tolerance dibawah/lebih kecil dari angka 1. Hal ini berarti, ketiga variabel bebas tidak terdapat gejala/problem multikolinieritas.

Uji Auto Korelasi

#### Uji Auto Korelasi Model Summary<sup>b</sup>

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.496 <sup>a</sup>	.246	.171	12.75201	1.906

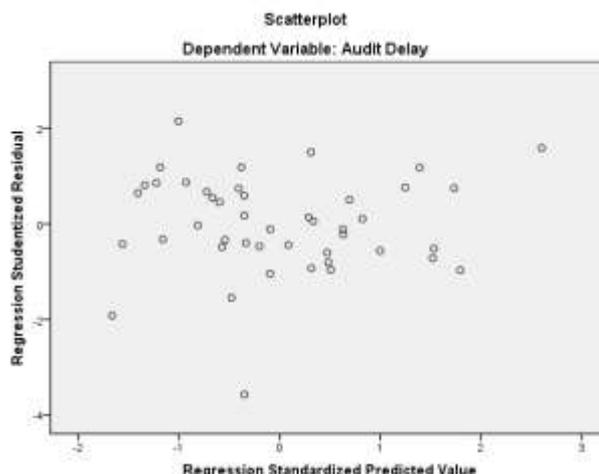
a. Predictors: (Constant), Likuiditas, Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Solvabilitas

b. Dependent Variable: Audit Delay

Sumber : Data Diolah Penulis, 2015

Dari hasil pengolahan SPSS 18.0 diperoleh nilai DW sebesar 1,906 nilai ini akan dibandingkan dengan nilai tabel dengan nilai signifikansi 5%, jumlah sampel 45 (n) dan jumlah variabel independen 4 (k=4), karena nilai DW1,906 berada diatas batas bawah (dL) 1.336dan batas atas (dU) 1.720, maka dapat disimpulkan bahwa pengujian auto korelasi pada model regresi Audit Delay. tidak ada *autokorelasi* positif atau negatif, jadi dapat disimpulkan tidak terdapat *autokorelasi*

### Uji Heteroskedastisitas



Dari hasil model regresi dengan dependen variabel Audit Delay pada gambar diatas *scatterplots of residuals* tidak membentuk pola tertentu (bergelombang, melebar kemudian menyempit, pola linear atau kuadratis), terlihat scatterplot Chart dalam Lampiran tidak membentuk pola tertentu, maka dalam regresi asumsi tidak terjadi heteroskedastisitas dipenuhi.

Analisis Regresi Berganda

### Hasil Analisis Regresi Linier Ganda Coefficients<sup>a</sup>

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	29.257	43.112		.679	.501
Profitabilitas	-21.729	8.483	-.386	-2.562	.014
Solvabilitas	-18.297	8.607	-.387	-2.126	.040
Ukuran Perusahaan	54.117	18.391	.475	2.943	.005
Likuiditas	-4.143	2.038	-.369	-2.033	.049

a. Dependent Variable: Audit Delay

Sumber : Data Diolah Penulis, 2015

Berdasarkan hasil regresi linier ganda model 1, dependen variabel return on aset (ROA). Untuk membuat persamaan garis regresi dapat dilihat dari kolom B.

Constant = 29.257

Profitabilitas = -21.729

Solvabilitas = -18.297

Ukuran Perusahaan = 54.117

Likuiditas = -4.143

Berarti persamaan garis regresinya adalah:

$$Y = 29.257 - 21.729 \text{ Profitabilitas} - 18.297 \text{ Solvabilitas} + 54.117 \text{ Ukuran Perusahaan} - 4.143 \text{ Likuiditas}$$

1. Konstanta sebesar 29.257 menyatakan bahwa jika tidak ada Profitabilitas, Solvabilitas, Ukuran Perusahaan dan Likuiditas maka peningkatan Audit Delay adalah sebesar 29.257.
2. Koefisien X1 = -21.729, menunjukkan bahwa Profitabilitas (X1) memiliki dampak negatif terhadap Audit Delay (Y). Artinya, jika Profitabilitas ditingkatkan sebesar satu satuan, maka peningkatan Audit Delay akan menurun sebesar -21.729.

3. Koefisien  $X_2 = -18.297$ , menunjukkan bahwa Solvabilitas ( $X_2$ ) memiliki dampak negatif terhadap Audit Delay ( $Y$ ). Artinya, jika Arus Solvabilitas ditingkatkan sebesar satu satuan, maka peningkatan Audit Delay akan menurun sebesar  $-18.297$ .
4. Koefisien  $X_3 = 54.117$ , menunjukkan bahwa Ukuran Perusahaan ( $X_3$ ) memiliki dampak positif terhadap Audit Delay ( $Y$ ). Artinya, jika Arus Ukuran Perusahaan ditingkatkan sebesar satu satuan, maka peningkatan Audit Delay akan meningkat sebesar  $54.117$ .
5. Koefisien  $X_4 = -4.143$ , menunjukkan bahwa Likuiditas ( $X_4$ ) memiliki dampak negatif terhadap Audit Delay ( $Y$ ). Artinya, jika Likuiditas ditingkatkan sebesar satu satuan, maka peningkatan Audit Delay akan menurun sebesar  $-4.143$ .
6. Standar error ( $e$ ) menunjukkan tingkat kesalahan pengganggu.

Hasil regresi linier berganda diatas menunjukkan bahwa variabel Ukuran Perusahaan memiliki pengaruh positif terhadap variabel Audit Delay. Sedangkan Profitabilitas, Solvabilitas dan Likuiditas memiliki pengaruh negatif terhadap Audit Delay.

#### Uji Hipotesis Secara Simultan (F)

Menurut (Priyatno, 2011:258) uji F digunakan untuk menguji pengaruh semua variabel independen atau variabel bebas secara bersama-sama terhadap variabel dependen atau variabel terikat. Kriteria pengambilan keputusannya adalah bila  $F_{hitung} > F_{tabel}$  maka  $H_0$  ditolak dan menerima  $H_a$  (Ghozali, 2005,84).

Uji F digunakan untuk mengetahui pengaruh Profitabilitas, Solvabilitas, Ukuran Perusahaan dan Likuiditas secara bersama-sama terhadap audit delay .

Dasar pengambilan keputusan berdasarkan probabilitas :

- a. Jika signifikansi  $> 0,05$ , maka  $H_0$  diterima (terdapat pengaruh)
- b. Jika signifikansi  $< 0,05$ , maka  $H_a$  diterima (tidak terdapat pengaruh)

Hasil uji F dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut ini :

#### Uji Hipotesis Secara Simultan

##### ANOVA<sup>b</sup>

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	2126.314	4	531.579	3.269	.021 <sup>a</sup>
	Residual	6504.548	40	162.614		
	Total	8630.862	44			

a. Predictors: (Constant), Likuiditas, Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Solvabilitas

b. Dependent Variable: Audit Delay

Sumber : Data Diolah Penulis, 2015

Berdasarkan data tabel diatas terlihat bahwa nilai F berada pada signifikansi 0,021 yang berarti  $< 0,05$ . maka  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak sehingga dapat dikatakan bahwa  $X_1$ ,  $X_2$ ,  $X_3$ , dan  $X_4$  berpengaruh terhadap  $Y$ . Dengan demikian secara bersama-sama Profitabilitas, Solvabilitas, Ukuran Perusahaan dan Likuiditas memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Audit Delay. Hipotesis yang diujikan yang menyatakan bahwa Profitabilitas, Solvabilitas, Ukuran Perusahaan dan Likuiditas berpengaruh positif dan nyata terhadap Audit Delay dapat diterima.

#### 5.3.2 Uji Hipotesis Secara Parsial (t)

Kriteria pengambilan adalah bila tingkat signifikan  $< 0.05$  maka  $H_0$  ditolak dan menerima  $H_a$ . Langkah-langkah pengujiannya adalah sebagai berikut (Ghozali, 2005)

1. Menentukan Formulasi Hipotesis
  - a.  $H_a : \beta = 0$ , artinya variabel  $X_1$ ,  $X_2$ ,  $X_3$  dan  $X_4$  tidak mempunyai pengaruh yang signifikan secara parsial terhadap variabel  $Y$ .
  - b.  $H_0 : \beta \neq 0$ , artinya variabel  $X_1$ ,  $X_2$ ,  $X_3$  dan  $X_4$  mempunyai pengaruh yang signifikan secara parsial terhadap variabel  $Y$ .
2. Menentukan derajat kepercayaan 95% ( $\alpha = 0,05$ )
3. Menentukan signifikansi
  - a. Nilai signifikansi (P Value)  $< 0,05$  maka  $H_a$  ditolak dan  $H_0$  diterima.

b. Nilai signifikansi (P Value) > 0,05 maka H0 ditolak dan Ha diterima.

Hasil uji t pada penelitian ini dapat dilihat ditabel berikut

**Uji Hipotesis Parsial  
Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	29.257	43.112		.679	.501
Profitabilitas	-21.729	8.483	-.386	-2.562	.014
Solvabilitas	-18.297	8.607	-.387	-2.126	.040
Ukuran Perusahaan	54.117	18.391	.475	2.943	.005
Likuiditas	-4.143	2.038	-.369	-2.033	.049

a. Dependent Variable: Audit Delay

Sumber : Data Diolah Penulis, 2015

Berdasarkan tabel diatas, maka hasil uji t pada penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Variabel (X1) Profitabilitas

Hipotesis variabel Profitabilitas adalah:

- a. Ha :  $\beta = 0$ , variabel (X1) Profitabilitas tidak mempunyai pengaruh yang signifikan secara parsial terhadap variabel Audit Delay.
- b. H0 :  $\beta = 0$ , variabel (X1) Profitabilitas mempunyai pengaruh yang signifikan secara parsial terhadap variabel Audit Delay.

Pada variabel Profitabilitas dengan tingkat signifikansi 95% ( $\alpha = 0,05$ ). Angka signifikansi (P Value) pada variabel Profitabilitas sebesar  $0,014 < 0,05$ . Dengan derajat kebebasan (df) =  $n-2 = 45-2 = 43$  yaitu sebesar 2,017, di dengan demikian kriteria pengambilan keputusannya dikarenakan karena besarnya  $t_{hitung} -2,562 > t_{tabel} 2,017$ , sehingga berarti secara parsial X<sub>1</sub> memiliki pengaruh terhadap Y. Atas dasar perbandingan tersebut, maka berarti Profitabilitas mempunyai pengaruh negatif namun signifikan terhadap Audit Delay.

2. Variabel (X2) Solvabilitas

Hipotesis variabel Solvabilitas adalah:

- a. Ha :  $\beta = 0$ , variabel (X1) Solvabilitas tidak mempunyai pengaruh yang signifikan secara parsial terhadap variabel Audit Delay.
- b. H0 :  $\beta = 0$ , variabel (X1) Solvabilitas mempunyai pengaruh yang signifikan secara parsial terhadap variabel Audit Delay.

Pada variabel Solvabilitas dengan tingkat signifikansi 95% ( $\alpha = 0,05$ ). Angka signifikansi (P Value) pada variabel Solvabilitas sebesar  $0,040 < 0,05$ . Dengan derajat kebebasan (df) =  $n-2 = 45-2 = 43$  yaitu sebesar 2,017, di dengan demikian kriteria pengambilan keputusannya dikarenakan karena besarnya  $t_{hitung} -2,126 > t_{tabel} 2,017$ , sehingga berarti secara parsial X<sub>1</sub> memiliki pengaruh terhadap Y. Atas dasar perbandingan tersebut, maka berarti Solvabilitas mempunyai pengaruh negatif namun signifikan terhadap Audit Delay.

3. Variabel (X1) Ukuran Perusahaan

Hipotesis variabel Ukuran Perusahaan adalah:

- c. Ha :  $\beta = 0$ , variabel (X1) Ukuran Perusahaan tidak mempunyai pengaruh yang signifikan secara parsial terhadap variabel Audit Delay.
- d. H0 :  $\beta = 0$ , variabel (X1) Ukuran Perusahaan mempunyai pengaruh yang signifikan secara parsial terhadap variabel Audit Delay.

Pada variabel Ukuran Perusahaan dengan tingkat signifikansi 95% ( $\alpha = 0,05$ ). Angka signifikansi (P Value) pada variabel Ukuran Perusahaan sebesar  $0,005 < 0,05$ . Dengan derajat kebebasan (df) =  $n-2 = 45-2 = 43$  yaitu sebesar 2,017, di dengan demikian kriteria pengambilan keputusannya dikarenakan karena besarnya  $t_{hitung} 2,943 > t_{tabel} 2,017$ , sehingga berarti secara parsial X<sub>1</sub> memiliki pengaruh terhadap Y. Atas dasar perbandingan tersebut, maka berarti Ukuran Perusahaan mempunyai pengaruh negatif namun signifikan terhadap Audit delay

4. Variabel (X4) Likuiditas

Hipotesis variabel Likuiditas adalah:

- a.  $H_a : \beta = 0$ , variabel (X1) Likuiditas tidak mempunyai pengaruh yang signifikan secara parsial terhadap variabel Audit Delay.
- b.  $H_0 : \beta = 0$ , variabel (X1) Likuiditas mempunyai pengaruh yang signifikan secara parsial terhadap variabel Audit Delay.

Pada variabel Likuiditas dengan tingkat signifikansi 95% ( $\alpha = 0,05$ ). Angka signifikansi (P Value) pada variabel Solvabilitas sebesar  $0,049 < 0,05$ . Dengan derajat kebebasan ( $df = n - 2 = 45 - 2 = 43$ ) yaitu sebesar 2,017, di dengan demikian kriteria pengambilan keputusannya dikarenakan karena besarnya  $t_{hitung} -2,126 > t_{tabel} 2,017$ , sehingga berarti secara parsial  $X_1$  memiliki pengaruh terhadap Y. Atas dasar perbandingan tersebut, maka berarti Solvabilitas mempunyai pengaruh negatif namun signifikan terhadap Audit Delay

#### 5.4 Koefisien Determinasi

##### Hasil Uji Koefisien Determinasi Model Summary<sup>b</sup>

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.496 <sup>a</sup>	.246	.171	12.75201	1.906

a. Predictors: (Constant), Likuiditas, Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Solvabilitas

b. Dependent Variable: Audit Delay

Sumber : Data Diolah Penulis, 2015

Dengan melihat dari tabel diatas hasil perhitungan di atas di mana R square sebesar 0,246 atau 24,6%. Hal ini menunjukkan besarnya kontribusi dari Profitabilitas, Solvabilitas, Ukuran Perusahaan dan Likuiditas terhadap Audit Delay sebesar 24,6% sedangkan sisanya 75,4% merupakan kontribusi faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### 6.1. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. *Profitabilitas, Solvabilitas, Ukuran Perusahaan dan Likuiditas* secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Audit Delay perusahaan-perusahaan subsektor makanan dan minuman BEI
2. *Profitabilitas* secara parsial berpengaruh negative namun signifikan terhadap Audit Delay perusahaan-perusahaan subsektor makanan dan minuman BEI
3. *Solvabilitas* secara parsial berpengaruh negative namun signifikan terhadap Audit Delay perusahaan-perusahaan subsektor makanan dan minuman BEI
4. *Ukuran Perusahaan* secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Audit Delay perusahaan-perusahaan subsektor makanan dan minuman BEI
5. Likuiditas secara parsial berpengaruh negative namun signifikan terhadap Audit Delay perusahaan-perusahaan subsektor makanan dan minuman BEI

### 6.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka penulis memberi saran sebagai berikut :

1. Hasil penelitian dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan akuntansi khususnya untuk *Profitabilitas, Solvabilitas, Ukuran Perusahaan dan Likuiditas serta Audit Delay*
2. Dalam penelitian ini yang diteliti hanya terbatas pada pengaruh *Profitabilitas, Solvabilitas, Ukuran Perusahaan, Likuiditas dan Audit Delay* di Perusahaan-perusahaan makanan dan minuman BEI. Sedangkan faktor-faktor lain yang juga berpengaruh terhadap Audit Delay yang belum diungkap berapa besar pengaruhnya, semoga pada penelitian selanjutnya dapat membahas faktor-faktor lain yang belum diteliti dalam penelitian ini., misalnya ukuran kantor akuntan public

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim. (2005). Analisis Investasi. Salemba Empat, Jakarta.
- Agnes Sawir. 2004. Analisis Kinerja Keuangan dan Perencanaan Keuangan Perusahaan, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama
- Agoes, Sukrisno. 2004. Auditing (Pemeriksaan Akuntan) oleh Kantor Akuntan Publik. Edisi Ketiga. Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Trisakti.
- Almilia, Luciana Spica dan Lucas Setiady. 2006. "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyelesaian dan Penyajian Laporan Keuangan pada Perusahaan yang Terdaftar di BEJ". Seminar Nasional Good Corporate Governance. Universitas Trisakti Jakarta, hal 1-28
- Arens, Alvin A. Elder, Randal J. and Beasley, Mark S. 2008. Auditing dan Jasa Assurance : Pendekatan Terintegrasi Jilid 1. Edisi 12. Salemba Empat. Jakarta
- Boynton, Johnson, dan Kell, dialihbahasakan oleh Ichsan Setiyo Budi dan Herman Wibowo, 2003, *Modern Auditing*, Jilid II, Edisi Ketujuh, Jakarta: Erlangga
- Carslaw, C.A.P.N. dan S.E. Kaplan. 1991 "An Examination of Audit Delay: Further Evidence from New Zealand", *Accounting and Business Research* 22(85):21-32.
- Chambers, Anne E and Stephen H Penman. 1984. "The Timeliness of Reporting and the stock Price Reaction to earning Announcements". *Journal of Accounting Research* (204-220)
- Davis, Ralph C., 2002, *Fundamental Of Top Management*, Tokyo, Penerbit: Kogakusha Company Limited
- Dyer J C, and Mc Hugh. 1975. "The Timeliness of the Australian annual report". *Journal of Accounting Research*, 13(3):204-219
- Givoly, D. dan Palmon, D. 1982. Timeliness of Annual Earning Announcements: Some Empirical Evidence. *The Accounting Review*, Vol.LVII., No,3.
- Halim, Varianada. 2000. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi *Audit Delay*: Studi Empiris Perusahaan-perusahaan di Bursa Efek Jakarta", *Jurnal Bisnis dan Akuntansi* 2(1):63-75.
- Harahap, Sofyan, 2001. *Sistem Pengawasan Manajemen*, Penerbit Quantum, Jakarta
- Hilmi, Utari dan Syaiful Ali. 2008. "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan (Studi Empiris pada Perusahaan-perusahaan yang Terdaftar di BEJ)". *Simposium Nasional Akuntansi XI Ikatan Akuntan Indonesia*
- Jensen, M. C and Meckling, W.H. 1976. Theory of the Firm : Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure . *Journal of Financial Economics*, Oktober, 1976, V. 3, No. 4, pp. 305-360. Available from: <http://papers.ssrn.com>
- Messier, William F., Jr. 2003. *Auditing & Assurance Services A Systematic Approach*. Prentice Hall, Inc.
- Mulyadi. 2002. *Auditing*. Jakarta: Salemba Empat.
- Mursyidi. (2010). *Akuntansi Dasar*. Bogor: Ghalia Indonesia
- Owusu-Ansah, Stephen. 2000. "Timeliness of Corporate Financial Reporting in Emerging Capital Market: Empirical Evidence from The Zimbabwe Stock Exchange". *Journal Accounting and Business Research*. Vol.30. No.3. pp.241-254.
- Paz, Lawrence W.1998. *Auditing Integrated Control Systems*. Boston. Kent Publishing
- Petronila T.A dan Mukhlisin, 2003, Pengaruh Profitabilitas Perusahaan Terhadap Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan dengan Opini Audit
- Rachmawati, Sisty. 2008. Pengaruh Faktor Internal dan Eksternal Perusahaan terhadap Audit Delay dan Timeliness. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*. Vol. 10, No. 1, Mei, hal 347-356.
- Subekti, Imam. dan N.W. Widiyanti. 2004. "Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap *Audit Delay* di Indonesia", *Simposium Nasional Akuntansi VII*:991-1002
- Suwardjono, 2005. *Teori Akuntansi: Perekayasa Pelaporan Keuangan (Edisi III)*. Yogyakarta: BPFE
- Ukago, Kristianus. 2004. Faktor-Faktor yang Berpengaruh Terhadap Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan Bukti Empiris Emiten di Bursa Efek Jakarta.
- Weston, J. Fred., dan Thomas E. Copeland, 1995, *Manajemen Keuangan*, Edisi 8. Jilid 1. Alih bahasa: Jaka Wasana dan Kirbrandoko. Gelora Aksara Pratama, Jakarta

# PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA ALOKASI UMUM TERHADAP ANGGARAN BELANJA MODAL DI PROVINSI SULAWESI UTARA

Sandi Hasudungan Pasaribu  
Jantje Tinangon

[sandihhasudungan@gmail.com](mailto:sandihhasudungan@gmail.com)

## *Abstract*

*The local government allocated funds in the form of capital expenditure in the budget to increase fixed assets. Capital expenditure allocation is based on local needs for facilities and infrastructure, both for the smooth implementation of the tasks for the government and public facilities. Therefore, in an effort to improve the quality of public services, local government should change the composition of spending. During this shopping areas more used to spending relatively less productive routine.*

*This study carried out in North Sulawesi Provincial Government by taking the data used for the study include data on local revenues, general allocation funds, and capital expenditure obtained from the Finance and Assets Management Agency of North Sulawesi Province.*

*The purpose of this study was to determine how much influence of local revenues and a general allocation of funds towards capital expenditure budget in North Sulawesi.*

*The analytical method used is quantitative descriptive analysis method that describes the position of research variables studied and the effect of one variable with other variables. Data analysis techniques to test the hypothesis performed using multiple linear regression analysis were processed through SPSS.*

*Based on the results simultaneously (test F) indicates that the variable revenue (X1), and the general allocation fund (X2) significantly affects the capital expenditure budget in North Sulawesi. While for the results of research partially (t test) showed that variabels local revenues and a general allocation fund a significant effect on capital expenditure in North Sulawesi.*

**Keywords: Locally-Generated Revenue, General Allocation Fund, Capital Expenditure.**

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan umum di UU Otonomi Daerah No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang telah menggantikan UU No. 22 tahun 1999. Pelaksanaan kebijakan pemerintah Indonesia tentang Otonomi Daerah, dimulai secara efektif pada tanggal 1 Januari 2001, merupakan kebijakan yang dipandang sangat demokratis dan memenuhi aspek desentralisasi yang sesungguhnya. Desentralisasi sendiri mempunyai tujuan untuk lebih meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat, pengembangan kehidupan berdemokrasi, keadilan, pemerataan, dan pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah dan antar daerah.

Dengan ditetapkannya UU No. 32 Tahun 2004, pemerintah di daerah mendapat kewenangan “riil” yang lebih besar dalam mengatur dirinya sendiri. Hal ini menimbulkan peningkatan tanggung jawab penyelenggaraan pemerintahan (penyediaan barang publik dan pembangunan ekonomi) di tingkat daerah yang sangat besar, khususnya pada bidang pendidikan yang merupakan unsur esensial dalam pembangunan daerah dan telah menjadi salah satu bagian utama kebutuhan penduduk. Namun, kemampuan daerah untuk mempertahankan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tersebut dapat dikatakan sangat terbatas, mengingat peranan pendapatan asli daerah masih rendah dalam penerimaan APBD daerah kabupaten/kota dan kesiapan sumber daya manusia (SDM) serta kemampuan manajemen sektor pendidikan di tingkat daerah masih sangat terbatas.

Namun Tujuan perubahan sistem dari sentralistik *top-down* menjadi desentralistik *bottom-up* tidak selamanya berdampak baik. Bahkan banyak permasalahan baru yang timbul. Permasalahan-permasalahan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Pemerintah daerah masih belum dapat melepaskan diri dari ketergantungan terhadap pemerintah pusat. Desentralisasi yang menghasilkan otonomi daerah ini tidak sepenuhnya dapat dijalankan oleh seluruh daerah di Indonesia. Kota-kota besar yang telah mendapatkan keuntungan pembangunan sejak orde lama dan orde baru mungkin dapat mengikuti proses otonomi. Namun tidak sama halnya dengan daerah-daerah terpencil atau daerah yang lokasinya jauh dari pusat. Pejabat daerah yang pada masa sebelumnya tidak pernah menerima kepercayaan dari pemerintah pusat untuk mengelola wilayahnya sendiri, dan tiba-tiba setelah adanya otonomi daerah mendapatkan wewenang tersebut, pasti tidak dapat serta merta mengelola wilayahnya. Apalagi pengelolaan kekayaan alam di daerahnya harus dengan dana sendiri. Oleh karena itu, banyak daerah-daerah yang masih tergantung terhadap pusat terutama untuk permasalahan anggaran atau dana pembangunan.
2. Semakin tingginya penarikan biaya kepada masyarakat. Berdasarkan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dengan Daerah, sumber penerimaan daerah terdiri dari 2, yaitu pendapatan daerah dan pembiayaan daerah. Pendapatan daerah bersumber dari pendapatan asli daerah (PAD), dana perimbangan, lain-lain pendapatan. Sedangkan pembiayaan bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran daerah, penerimaan pinjaman daerah, dana cadangan daerah, dan hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan. Adapun sumber PAD adalah pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, serta komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah. Ditilik dari penjelasan tersebut, maka seharusnya PAD terbesar berasal dari hasil pengelolaan dan penjualan kekayaan daerah serta penjualan ataupun pengadaan barang dan jasa daerah sebagai bentuk otonomi daerah. Namun pada kenyataannya, PAD di kebanyakan daerah bersumber dari pajak dan retribusi daerah.
3. Kasus-kasus korupsi oleh pejabat-pejabat pemerintah daerah. Adanya sistem desentralisasi ini bukan berarti bebas dari permasalahan korupsi. Bahkan otonomi daerah mampu menciptakan koruptor-koruptor kecil dari daerah. Berdasarkan laporan dari *Indonesia Corruption Watch* (ICW), pada tahun 2004 terjadi 432 kasus korupsi di Indonesia dengan berbagai macam aktor, modus, dan kerugian negara. Adapun 83 kasus melibatkan kepala daerah, dan 124 kasus melibatkan anggota DPRD.

Anggaran daerah merupakan rencana keuangan yang menjadi dasar dalam pelaksanaan pelayanan publik. Di Indonesia, dokumen anggaran daerah disebut APBD, baik untuk provinsi maupun kabupaten dan kota. Proses penyusunan anggaran pasca UU No.2 tahun 1999 dan UU No.32 tahun 2004, melibatkan dua pihak eksekutif dan legislatif, masing-masing melalui sebuah tim atau panitia anggaran. Adapun eksekutif sebagai pelaksana operasionalisasi daerah berkewajiban membuat draft/rancangan APBD, yang hanya bias di implementasikan kalau sudah disahkan oleh DPRD dalam proses ratifikasi anggaran.

Penyusunan APBD diawali dengan membuat kesepakatan antara eksekutif dan legislatif tentang Kebijakan Umum APBD dan Prioritas & Plafon Anggaran yang akan menjadi pedoman untuk penyusunan anggaran pendapatan dan anggaran belanja. Eksekutif membuat rancangan APBD sesuai dengan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas & Plafon Anggaran yang kemudian diserahkan kepada legislative untuk dipelajari dan dibahas bersama-sama sebelum ditetapkan sebagai Peraturan Daerah (Perda). Dalam perspektif keagenan, hal ini merupakan bentuk kontrak (*incomplete contract*), yang menjadi alat bagi legislatif untuk mengawasi pelaksanaan anggaran oleh eksekutif.

Berlakunya UU No. 25 tahun 1999 dan UU No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, membawa perubahan mendasar pada sistem dan mekanisme pengelolaan pemerintahan daerah. UU ini menegaskan bahwa untuk pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat akan mentransferkan dana perimbangan kepada Pemda. Dana Perimbangan tersebut terdiri dari Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan bagian daerah dari bagi hasil pajak pusat. Disamping itu, Pemerintah Daerah juga memiliki sumber pendanaan sendiri berupa PAD, pinjaman daerah, maupun lain-lain penerimaan daerah yang sah. Kebijakan penggunaan semua dana tersebut diserahkan kepada Pemda (Prakosa, 2004). Namun pada praktiknya, transfer dari pemerintah pusat merupakan sumber pendanaan

utama Pemda untuk membiayai operasi utamanya sehari-hari, yang oleh Pemda “dilaporkan” di perhitungkan APBD.

Pemerintah daerah mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran belanja modal dalam APBD untuk menambah aset tetap. Alokasi belanja modal ini didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan maupun untuk fasilitas publik. Oleh karena itu, dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik, pemerintah daerah seharusnya mengubah komposisi belanjanya. Selama ini belanja daerah lebih banyak digunakan untuk belanja rutin yang relatif kurang produktif. Saragih (2003) menyatakan bahwa pemanfaatan belanja hendaknya dialokasikan untuk hal-hal produktif, misal untuk melakukan aktivitas pembangunan.

Berdasarkan penjelasan diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai : “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum terhadap Anggaran Belanja Modal di Provinsi Sulawesi Utara”.

### **1.2 Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang yang dikemukakan di atas, maka yang menjadimasalah pokok dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap anggaran belanja modal di Provinsi Sulawesi Utara?
2. Apakah dana alokasi umum berpengaruh terhadap anggaran belanja modal di Provinsi Sulawesi Utara?
3. Apakah secara bersama-sama pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum berpengaruh terhadap anggaran belanja modal di Provinsi Sulawesi Utara?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk :

1. Mengetahui pengaruh pendapatan asli daerah terhadap anggaran belanja modal di Provinsi Sulawesi Utara?
2. Mengetahui pengaruh dana alokasi umum terhadap anggaran belanja modal di Provinsi Sulawesi Utara?
3. Mengetahui secara bersama-sama pengaruh pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum terhadap anggaran belanja modal di Provinsi Sulawesi Utara?

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Apabila tujuan penelitian ini dapat dipenuhi, maka manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Bagi peneliti, untuk menambah pengetahuan dan wawasan peneliti sehubungan dengan pengaruh pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum terhadap anggaran belanja modal di Provinsi Sulawesi Utara.
2. Bagi pemerintah daerah, memberikan masukan dalam hal penyusunan kebijakan dimasa yang akan datang dalam hal pengalokasian anggaran belanja modal yang terdapat di dalam APBD.

### **1.5 Tinjauan Pustaka**

Darwanto dan Sari (2007), melakukan penelitian yang berjudul “pengaruh pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah, dan dana alokasi umum terhadap pengalokasian anggaran belanja modal, kasus: di Provinsi Jawa dan Bali” menyatakan bahwa adanya pertumbuhan ekonomi (PDRB) memiliki korelasi positif namun tidak signifikan terhadap belanja modal, artinya pertumbuhan ekonomi kurang memiliki pengaruh yang nyata terhadap belanja modal. Sedangkan pendapatan asli daerah (PAD) memiliki korelasi positif dan signifikan terhadap belanja modal, artinya PAD memiliki pengaruh yang nyata terhadap belanja modal dan hubungannya positif. Begitu juga dengan dana alokasi umum (DAU) memiliki korelasi positif yang signifikan terhadap belanja modal, artinya DAU memiliki korelasi (hubungan) yang nyata dengan belanja modal dan hubungannya negatif. Kesamaan antara penelitian sebelumnya dengan yang ini, dimana terletak pada variabel pendapatan asli daerah, dan dana alokasi umum dan menggunakan metode analisis yang sama. Sedangkan perbedaannya terletak pada pertumbuhan ekonomi dan objek penelitian sebelumnya dengan yang saat ini yaitu pada Provinsi Jawa dan Bali sedangkan penelitian ini di Provinsi Sulawesi Utara.

Syafitri (2009), melakukan penelitian yang berjudul “pengaruh pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah, dan dana alokasi umum terhadap pengalokasian anggaran belanja modal”, kasus: Provinsi

Sumatra Utara tahun 2006-2008. Menyatakan secara parsial bahwa hanya pendapatan asli daerah (PAD) yang mempunyai pengaruh signifikan positif terhadap belanja modal. Sedangkan PDRB dan dana alokasi umum (DAU) tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Kesamaan dengan penelitian saat ini yaitu menggunakan variabel pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan belanja modal tetapi yang membedakannya adalah tidak digunakannya variabel pertumbuhan ekonomi dan objek penelitian, dimana penelitian sebelumnya mengambil tempat di Provinsi Sumatra Utara sedangkan penelitian saat ini mengambil tempat di Provinsi Sulawesi Utara.

Fitria (2013), melakukan penelitian yang berjudul “pengaruh pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah, dan dana alokasi umum terhadap pengalokasian anggaran belanja modal, studi kasus: pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat” menyatakan bahwa adanya pertumbuhan ekonomi (PDRB) memiliki korelasi positif dan signifikan terhadap belanja modal, artinya pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh yang nyata terhadap belanja modal. Sedangkan pendapatan asli daerah (PAD) memiliki korelasi positif dan signifikan terhadap belanja modal, artinya PAD memiliki pengaruh yang nyata terhadap belanja modal dan hubungannya positif. Begitu juga dengan dana alokasi umum (DAU) memiliki korelasi positif yang signifikan terhadap belanja modal, artinya DAU memiliki korelasi (hubungan) yang nyata dengan belanja modal dan hubungannya positif. Kesamaan antara penelitian sebelumnya dengan yang saat ini, dimana sama-sama menggunakan pendapatan asli daerah, dan dana alokasi umum dan menggunakan metode analisis yang sama. Sedangkan perbedaannya terletak pada pertumbuhan ekonomi dan objek penelitian yang mana penelitian sebelumnya mengambil objek di Provinsi Jawa Barat sedangkan penelitian ini di Provinsi Sulawesi Utara.

## **1.6 Hipotesis**

Berdasarkan landasan teori di atas, maka hipotesis pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

Hipotesis 1 : Variabel pendapatan asli daerah ( $X_1$ ) berpengaruh secara signifikan terhadap anggaran belanja modal (Y) di Provinsi Sulawesi Utara.

Hipotesis 2 : Variabel dana alokasi umum ( $X_2$ ) berpengaruh secara signifikan terhadap anggaran belanja modal (Y) di Provinsi Sulawesi Utara.

Hipotesis 3: Variabel pendapatan asli daerah ( $X_1$ ) dan dana alokasi umum ( $X_2$ ) berpengaruh secara signifikan terhadap anggaran belanja modal (Y) di Provinsi Sulawesi Utara.

## **1.7 Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah dan memberikan gambaran secara menyeluruh dalam penelitian ini, maka penulis membaginya kedalam lima bab berikut :

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini berisi bagian pendahuluan yang terdiri dari: latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, hipotesis, serta sistematika penulisan.

### **BAB II LANDASAN TEORI**

Pada bab ini berisi penjelasan dan pembahasan secara rinci tentang landasan teori meliputi pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan belanja modal .

### **BAB III METODE PENELITIAN**

Bab ini berisi uraian secara umum mengenai jenis data, sumber data, metode pengumpulan data, definisi operasional dan pengukuran variabel, metode analisis data.

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab ini berisi tentang uraian secara rinci mengenai langkah-langkah analisis data dan hasilnya serta pembahasan hasil yang diperoleh.

### **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

Dalam bab terakhir ini berisi kesimpulan penelitian, keterbatasan, dan saran-saran yang perlu disampaikan.

## **LANDASAN TEORI**

### **2.1 Anggaran Pemerintah Daerah**

Anggaran pemerintah daerah adalah alat bagi pemerintah untuk mengarahkan pembangunan sosial dalam menjamin kesinambungan serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Anggaran sektor publik memuat berbagai pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu

tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial. Pembentukan anggaran sektor publik kerap kali melibatkan unsur politik dan sejenisnya.

Anggaran pada pemerintah daerah memiliki fungsi yang sama dengan anggaran pada perusahaan komersil, yaitu sebagai pernyataan mengenai rencana kerja yang akan dilakukan pada periode waktu tertentu. Anggaran pemerintah daerah menurut Mardiasmo (2004;62) yaitu merupakan suatu rencana kegiatan yang dipresentasikan dalam bentuk rencana perolehan pendapatan dan belanja dalam satuan moneter.”

### **2.1.1 Jenis-jenis Anggaran Pemerintah daerah**

Ada beberapa pendekatan dalam penyusunan anggaran. Seperti yang dikemukakan oleh Mardiasmo (2004; 76-83) bahwa pendekatan dalam penyusunan anggaran sebagai berikut :

#### **1. Anggaran Tradisional**

Anggaran tradisional memiliki dua ciri utama yaitu cara penyusunan anggaran yang didasarkan atas pendekatan *incrementalism* dan struktur susunan anggaran yang bersifat *line-item*.

- a. *Line Item Budgeting*
- b. *Incremental Budgeting*

#### **2. New Public Management**

*New Public Management* berfokus pada manajemen sektor publik yang berorientasi pada kinerja bukan berorientasi kebijakan *new public management* menimbulkan beberapa konsekuensi bagi pemerintah. Diantaranya adalah tuntutan-tuntutan untuk melakukan efisiensi, penangkasan biaya dan kompetensi tender.

- a. Anggaran kinerja (*Performance Budgeting*)
- b. *Zero Based Budgeting* (ZBB)
- c. *Planning, Programming and Budgeting System* (PPBS)

### **2.1.2 Proses Penyusunan Anggaran Pemerintah Daerah**

Proses penyusunan anggaran pada sektor publik cukup rumit karena dalam proses penganggarannya mengandung nuansa politisi. Menurut Mardiasmo (2004;61),dikemukakan bahwa penganggaran pemerintah daerah adalah sebagai suatu proses penentuan jumlah alokasi dana untuk tiap-tiap program dan aktivitas dalam satuan moneter.

Proses penyusunan anggaran mempunyai empat tujuan seperti yang dikemukakan oleh Mardiasmo (2004;61) adalah sebagai berikut :

- a. Membantu pemerintah mencapai tujuan fiskal dan meningkatkan koordinasi antar bagian dalam lingkungan pemerintah.
- b. Membantu menciptakan efisiensi dan keadilan dalam menyediakan barang dan jasa publik melalui proses pemrioritasan.
- c. Memungkinkan bagi pemerintah untuk memenuhi prioritas belanja.
- d. Meningkatkan transparansi dan pertanggungjawaban pemerintah kepada DPR/DPRD dan masyarakat luas.”

### **2.2 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)**

Anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) pada hakekatnya merupakan salah satu instrumen kebijakan yang dipakai sebagai alat untuk meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat di daerah. Menurut Halim (2004:15), Anggaran pendapatan daerah (APBD) adalah suatu Anggaran Daerah, yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut : rencana kegiatan suatu daerah, beserta uraiannya secara rinci; adanya sumber penerimaan yang merupakan target minimal untuk menutupi biaya-biaya sehubungan dengan aktivitas-aktivitas tersebut, dan adanya biaya-biaya yang merupakan batas maksimal pengeluaran-pengeluaran yang akan dilaksanakan; jenis kegiatan dan proyek yang dituangkan dalam bentuk angka; periode anggaran, yaitu biasanya 1 (satu) tahun.

APBD harus memuat sasaran yang diharapkan menurut fungsi belanja, standar pelayanan yang diharapkan dan perkiraan biaya satuan komponen kegiatan yang bersangkutan, serta bagian pendapatan APBD yang digunakan untuk membiayai belanja administrasi umum, belanja operasi dan pemeliharaan dan belanja modal/investasi.

Unsur-unsur APBD menurut Halim (2004 : 15-16) adalah sebagai berikut:

1. Rencana kegiatan suatu daerah, beserta uraiannya secara rinci.

2. Adanya sumber penerimaan yang merupakan target minimal untuk menutupi biaya-biaya sehubungan dengan aktivitas tersebut, dan adanya biaya-biaya yang merupakan batas maksimal pengeluaran-pengeluaran yang akan dilaksanakan.
3. Jenis kegiatan dan proyek yang dituangkan dalam bentuk angka.
4. Periode anggaran yang biasanya 1 (satu) tahun.

### **2.2.1 Struktur APBD**

Struktur APBD yang terbaru adalah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah. Adapun bentuk dan susunan APBD yang didasarkan pada Permendagri 13/2006 pasal 22 ayat (1) terdiri atas 3 bagian, yaitu : “pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.” Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat (1) dikelompokkan atas pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Belanja menurut kelompok belanja terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung. Pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan mencakup sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SilPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, dan penerimaan piutang daerah. Pengeluaran pembiayaan mencakup pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah, pembayaran pokok utang, dan pemberian pinjaman daerah. (permendagri 13/2006). Oleh karena ini menggunakan laporan APBD yang memakai format Keputusan Menteri Dalam Negeri No.29 Tahun 2002, maka APBD yang berdasarkan format tersebut terdiri atas 3 bagian, yaitu : ”pendapatan, belanja, dan pembiayaan.”

Pendapatan dibagi menjadi 3 kategori yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Belanja digolongkan menjadi 4 yakni belanja aparatur daerah, belanja pelayanan publik, belanja bagi hasil dan bantuan keuangan, dan belanja tak terduga. Belanja aparatur daerah diklasifikasikan menjadi 3 kategori yaitu belanja administrasi umum, belanja operasi dan pemeliharaan, dan belanja modal/pembangunan. Belanja pelayanan publik dikelompokkan menjadi 3 yakni belanja administrasi umum, belanja operasi dan pemeliharaan, dan belanja modal. Pembiayaan dikelompokkan menurut sumber-sumber pembiayaan yaitu : sumber penerimaan daerah dan sumber pengeluaran daerah. Sumber pembiayaan berupa penerimaan daerah adalah : sisa lebih anggaran tahun lalu, penerimaan pinjaman obligasi, hasil penjualan asset daerah yang dipisahkan dan transfer dana cadangan. Sumber pembiayaan berupa pengeluaran daerah terdiri atas : pembayaran utang pokok yang telah jatuh tempo, penyertaan modal, transfer ke dana cadangan, dan sisa lebih anggaran tahun sekarang. (Halim 2004:18)

### **2.3 Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Pengertian pendapatan asli daerah berdasarkan Undang-Undang No. 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pusat dan daerah pasal 1 angka 18 bahwa : pendapatan asli daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan perundang-undangan.

Adapun kelompok pendapatan asli daerah yang dipisahkan menjadi empat jenis pendapatan, diantaranya:

1. Pajak daerah
2. Retribusi daerah
3. Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
4. Lain-lain pendapatan yang sah

#### **2.3.1 Hubungan PAD dengan Belanja Modal**

Selama ini PAD memiliki peran untuk membiayai pelaksanaan otonomi daerah guna mencapai tujuan utama penyelenggaraan otonomi daerah yang ingin meningkatkan pelayanan publik dan memajukan perekonomian daerah (Mardiasmo, 2004:46). Bermula dari keinginan untuk mewujudkan harapan tersebut, Pemda melakukan berbagai cara dalam meningkatkan pelayanan publik, yang salah satunya dilakukan dengan melakukan belanja untuk kepentingan investasi yang direalisasikan melalui belanja modal, jika semakin tinggi PAD maka pengeluaran pemerintah atas Belanja Modal pun akan semakin tinggi. Hal ini sesuai dengan PP No 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah yang menyatakan bahwa APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintah dan

kemampuan pendapatan daerah. Artinya, disetiap penyusunan APBD, jika Pemerintah Daerah akan mengalokasikan Belanja Modal maka harus benar-benar disesuaikan dengan kebutuhan daerah dengan mempertimbangkan PAD yang diterima. Besar kecilnya belanja modal akan ditentukan dari besar kecilnya PAD. Sehingga jika Pemda ingin meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat dengan jalan meningkatkan belanja modal, maka Pemda harus menggali PAD yang sebesar-besarnya.

## **2.4 Dana Alokasi Umum (DAU)**

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang dana perimbangan atau Dana Alokasi Umum, bahwa : “Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan desentralisasi”.

Secara definisi DAU dapat diartikan sebagai berikut:

1. Salah satu komponen dari dana perimbangan pada APBN, yang pengalokasiannya didasarkan atas konsep kesenjangan fiskal yaitu selisih antara kebutuhan fiskal dengan kapital fiskal.
2. Instrumen untuk mengatasi *horizontal balance* yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah dan penggunaannya ditetapkan sepenuhnya oleh daerah.
3. *Equalization grant* berfungsi untuk menetralisasi ketimpangan kemampuan keuangan dengan adanya PAD, Bagi Hasil Pajak dan bagi hasil SDA yang diperoleh daerah (Sigit, 2003; Kuncoro, 2004:31).

### **2.4.1 Hubungan DAU dengan Belanja Modal**

Hubungan antara DAU dengan Belanja Modal ini dapat dipahami mengingat bahwa pelaksanaan otonomi daerah yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik yang direalisasikan melalui belanja modal yang juga ikut dibiayai oleh DAU tersebut. Bahkan Abdullah dan Halim (2006:26) menyatakan bahwa pendapatan dari pemerintah pusat berupa dana perimbangan di pemerintah daerah di Indonesia merupakan sumber pendapatan utama dalam APBD. Sayangnya kontribusi DAU terhadap Belanja Modal belum efektif sehingga masih banyak daerah yang belum merata pembangunannya, juga masih kurangnya pelayanan publik sehingga kesejahteraan masyarakat pun belum efektif (masih banyaknya masyarakat dibawah garis kemiskinan, belum meratanya fasilitas pendidikan dan kesehatan, sektor usaha kecil masih terabaikan contoh PKL).

## **2.5 Belanja Modal**

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 29 Tahun 2002, belanja modal dibagi menjadi:

- a. Belanja publik, yaitu belanja yang manfaatnya dapat dinikmati secara langsung oleh masyarakat umum.
- b. Belanja aparatur, yaitu belanja yang manfaatnya tidak secara langsung dinikmati oleh masyarakat, tetapi dirasakan secara langsung oleh aparatur.

Belanja Modal dapat diaktegorikan dalam 5 (lima) kategori utama:

- a) Belanja Modal Tanah
- b) Belanja Modal Peralatan dan Mesin
- c) Belanja Modal Gedung dan Bangunan
- d) Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
- e) Belanja Modal Fisik Lainnya

## **METODE PENELITIAN**

### **3.1 Jenis Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif yaitu data yang dapat diukur dengan angka.

### **3.2 Sumber Data**

Sumberdata yang digunakan oleh peneliti adalah data sekunder yang bersumber dari laporanRealisasi APBD Pemda di Provinsi Sulawesi Utara, yakni dataPAD, DAU, dan Belanja Modal yang diperoleh dari situs DirjenPerimbangan Keuangan Daerah melalui internet dan BPKAD. Adapun data yang digunakan adalah data *time series* dengan periode waktu daritahun 2004 sampai dengan tahun 2014.

### **3.3 Metode Pengumpulan Data**

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam proses penganalisaan maka penulis menggunakan metode sebagai berikut:

1. Studi kepustakaan,
2. Penelitian lapangan

### 3.4 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Dalam penelitian ini ada beberapa variabel yang diukur antara lain :

1. Pendapatan Asli Daerah ( $X_1$ ) yaitu merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah yang dilihat dari laporan realisasi APBD pada bagian pendapatan. Pengukuran variabel ini menggunakan nilai nominal dari jumlah penerimaan PAD dalam setahun.
2. Dana Alokasi Umum ( $X_2$ ) yaitu dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka desentralisasi, yang dapat dilihat dari laporan realisasi APBD pada bagian Perimbangan. Pengukuran variabel ini menggunakan nilai nominal dari jumlah DAU dalam setahun.
3. Belanja Modal (Y) yaitu belanja pemerintah daerah yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan pada kelompok belanja administrasi umum, yang dapat dilihat dalam laporan realisasi APBD pada bagian belanja aparatur daerah dan pelayanan publik. Pengukuran variabel ini menggunakan nilai nominal dari jumlah anggaran belanja modal dalam setahun.

### 3.5 Metode Analisis Data

Sebelum melakukan pengujian dengan regresi linear berganda, terlebih dahulu dilakukan Uji Asumsi Klasik, antara lain : Uji Normalitas, Uji Autokorelasi, Uji *Heterokedastisitas*, Uji Multikolinearitas, Analisis Regresi Linear Berganda, Koefisien Korelasi (R) & Determinasi ( $R^2$ ) dan Uji Hipotesis.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### 4.1 Hasil Analisis

#### Uji Asumsi Klasik

#### Uji Normalitas

	Unstandardized Residual
df	11
Kolmogorov-Smirnov <sup>a</sup>	.166
Asymp. Sig. (2-tailed)	.200 <sup>a</sup>

Sumber : Hasil Olah Data SPSS, 2014

Dari Tabel 4.1 diatas, terlihat bahwa nilai Sig. (2-tailed) dalam *One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test* adalah  $0,200 > 0,05$ , maka dapat disimpulkan bahwa *residual error* data terdistribusi memenuhi asumsi normalitas.

#### Uji Autokorelasi

Model	Durbin-Watson
1	2.098

Sumber : Hasil Olah Data SPSS, 2014

Berdasarkan pada tabel 4.2 diatas, nilai DW yang dihasilkan adalah sebesar 2,098, maka dapat disimpulkan bahwa data penelitian tidak terjadi autokorelasi dalam regresi.

#### Uji Multikolinearitas

Model	Collinearity Statistic	
	Tolerance	VIF
Pendapatan Asli Daerah	.228	4.390
Dana Alokasi Umum	.228	4.390

Sumber : Hasil Olah Data SPSS, 2014

Dengan melihat nilai VIF pada tabel 4.3 diatas, setiap variabel independen dibawah 10, yaitu pendapatan asli daerah sebesar 4,390, dan dana alokasi umum sebesar 4,390, maka dapat disimpulkan bahwa variabel penelitian tidak terjadi multikolinearitas.

### Uji Heteroskedastisitas

**Tabel 4.4 Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Sig.
1	(Constant)	.069
	Pendapatan Asli Daerah	.929
	Dana Alokasi Umum	.786

Sumber : Hasil Olah Data SPSS, 2014

Berdasarkan tabel 4.4 diatas, nilai signifikansi untuk masing-masing variabel independen terhadap nilai *absolute residual* berada di atas 0,05, sehingga dapat disimpulkan tidak terdapat gejala heteroskedastisitas pada data penelitian ini.

### Analisis Regresi Linear Berganda

**Tabel 4.5 Coefficients<sup>a</sup>**

Model		B	t	Sig.
1	(Constant)	7.801E10	2.766	.024
	Pendapatan Asli Daerah	.579	6.045	.000
	Dana Alokasi Umum	.370	3.605	.007

Sumber : Hasil Olah Data SPSS, 2014

Dari Tabel 4.5 di atas, maka dapat diketahui bahwa model regresi yang diperoleh adalah :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e$$

$$Y = 7.801E10 + 0.579 X_1 + 0.370 X_2$$

### Koefisien Korelasi dan Determinasi

**Tabel 4.6 Model Summary**

Model	R Square	Adjusted Square
1	.932	.914

Sumber : Hasil Olah Data SPSS, 2014

Berdasarkan tabel 4.6 diatas, dapat dilihat perbandingan hasil dari uji koefisien determinasi, dimana jika dilihat dari nilai adjusted R squarenya, hasil uji dengan variabel moderasi lebih baik daripada hasil uji tanpa variabel moderasi, hal tersebut dapat kita lihat dari perbandingan nilai adjusted R square.

Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independen (pendapatan asli daerah, dan dana alokasi umum) terhadap variabel dependennya (anggaran belanja modal) digunakan Nilai adjusted R<sup>2</sup> tanpa variabel moderasi yaitu sebesar 0,914, memiliki arti bahwa 91,4% perubahan anggaran belanja modal dapat dijelaskan oleh variabel pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum. Sedangkan sisanya 8,6% dipengaruhi oleh variabel lain diluar model.

#### 4.1.2 Uji Hipotesis

##### Hasil Uji F

**Tabel 4.7 ANOVA<sup>b</sup>**

Model		Sum of Square	df	F	Sig.
1	Regression	1.039E23	2	54.439	.000 <sup>a</sup>
	Residual	7.637E21	8		
	Total	1.116E23	10		

Sumber : Hasil Olah Data SPSS, 2014

Dari tabel 4.7 di atas, dapat dilihat pada signifikan  $0,000 < 0,05$ , maka dapat dinyatakan bahwa secara simultan, variabel pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum berpengaruh secara signifikan terhadap anggaran belanja modal.

**Hasil uji t**

**Tabel 4.8 Coefficients<sup>a</sup>**

Model		B	t	Sig.
1	(Constant)	7.801E10	2.766	.024
	Pendapatan Asli Daerah	.579	6.045	.000
	Dana Alokasi Umum	.370	3.605	.007

Sumber : Hasil Olah Data SPSS, 2014

Dari tabel 4.8 dapat dilihat bahwa nilai signifikansi pendapatan asli daerah adalah  $0,000 < 0,05$  hal ini menunjukkan  $H_0$  diterima sehingga pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap anggaran belanja modal. Sedangkan nilai signifikansi dana alokasi umum adalah  $0,07 < 0,05$  menunjukkan  $H_0$  diterima sehingga dana alokasi umum berpengaruh terhadap anggaran belanja modal.

**4.3 Pembahasan**

**4.3.1 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Anggaran Belanja Modal**

Berdasarkan hasil uji t sebelumnya, Hasil analisis menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh secara signifikan terhadap anggaran belanja modal ini bisa dilihat dengan tingkat signifikansi  $0,000 < 0,05$ , dengan koefisien regresi sebesar positif 0,579 menandakan bahwa apabila pendapatan asli daerah bertambah atau mengalami peningkatan sebesar Rp. 1, maka anggaran belanja modal yang dialokasikan akan ikut bertambah atau mengalami kenaikan sebesar Rp. 0,579 dengan asumsi variabel lainnya tetap atau konstan. Hasil pengujian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Abdullah (2004) yang membuktikan bahwa tidak terdapat pengaruh belanja modal pada kenaikan pendapatan asli daerah.

Pendapatan asli daerah merupakan sumber pendapatan penting bagi sebuah daerah dalam memenuhi belanjanya. Pendapatan asli daerah ini sekaligus dapat menunjukkan tingkat kemandirian suatu daerah. Semakin banyak pendapatan asli daerah yang didapat semakin memungkinkan daerah tersebut untuk memenuhi kebutuhan belanjanya sendiri tanpa harus tergantung pada Pemerintah Pusat, yang berarti ini menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah tersebut telah mampu untuk mandiri, dan begitu juga sebaliknya. Belanja daerah adalah semua pengeluaran Pemerintah Daerah pada suatu periode anggaran. Alokasi belanja daerah terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja tidak langsung merupakan belanja yang tidak memiliki keterkaitan secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, terdiri dari belanja pegawai, belanja bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga. Sedangkan belanja langsung merupakan belanja yang memiliki keterkaitan secara langsung dengan program dan kegiatan yang meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal.

**4.3.2 Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Anggaran Belanja Modal**

Variabel Dana Alokasi Umum berpengaruh positif, searah, serta berpengaruh secara signifikan terhadap jumlah anggaran belanja modal dengan tingkat signifikansi variabel independent  $0,007 < 0,05$ . Hal ini berarti bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap anggaran belanja modal di Provinsi Sulawesi Utara. Hal ini didukung oleh hasil koefisien regresi sebesar positif 0,370 menandakan bahwa apabila dana alokasi umum di Provinsi Sulawesi Utara bertambah atau mengalami peningkatan sebesar Rp. 1, maka jumlah Anggaran Belanja Modal yang dialokasikan akan ikut bertambah atau mengalami kenaikan sebesar Rp. 0,370 dengan asumsi variabel lainnya tetap atau konstan. Hasil pengujian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Anggiat Situngkir (2009) yang membuktikan bahwa besarnya jumlah belanja modal dipengaruhi oleh Dana Alokasi Umum yang diterima dari pemerintah pusat.

Transfer dari pemerintah pusat yang diwujudkan dalam dana alokasi umum untuk dana perimbangan merupakan sumber utama Pemda untuk menjaga/menjamin tercapainya standar pelayanan publik minimum di seluruh negeri. Transfer merupakan konsekuensi dari tidak meratanya kemampuan keuangan dan ekonomi daerah. Selain itu, tujuan transfer adalah mengurangi kesenjangan keuangan

horizontal antar daerah, mengurangi kesenjangan vertical Pusat-Daerah, mengatasi persoalan efek pelayanan publik antar daerah, dan untuk menciptakan stabilitas aktifitas perekonomian di daerah. Di Indonesia, seperti ditegaskan dalam UU No. 25/1999, bentuk transfer yang paling penting adalah DAU dan DAK, selain bagi hasil (*revenue sharing*). Transfer atau grants dari Pemerintah Pusat secara garis besar dapat dibagi dua, yakni *matching grant* dan *non-matching grants*. Kedua grants tersebut digunakan oleh Pemda untuk memenuhi belanja rutin dan belanja pembangunan.

Perimbangan keuangan antaran pemerintah pusat dan daerah merupakan konsekuensi adanya penyerahan kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Terjadinya transfer dana dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, maka pemerintah daerah secara leluasa dapat menggunakan dana untuk memberi pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. DAU merupakan salah satu alat bagi pemerintah pusat sebagai alat pemerataan pembangunan di Indonesia yang bertujuan untuk mengurangi ketimpangan dalam kebutuhan pembiayaan dan penguasaan pajak antara Pusat dan Daerah. Dengan perimbangan tersebut, khususnya dari DAU akan memberikan kepastian bagi Daerah dalam memperoleh sumber-sumber pembiayaan untuk membiayai kebutuhan pembangunan. Tujuan dari pemberian DAU ini adalah pemerataan dengan memperhatikan potensi daerah, luas daerah, keadaan geografis, jumlah penduduk, dan tingkat pendapatan. Jaminan keseimbangan penyelenggaraan Pemerintah Daerah dalam rangka penyediaan pelayanan dasar kepada masyarakat. Oleh karena itu DAU merupakan sumber dana yang dominan dan dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pembahasan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pendapatan asli daerah berpengaruh secara signifikan terhadap anggaran belanja modal, sehingga pendapatan asli daerah merupakan sumber pendapatan penting bagi sebuah daerah dalam memenuhi belanjanya dan juga sekaligus dapat menunjukkan tingkat kemandirian suatu daerah.
2. Dana alokasi umum berpengaruh secara signifikan terhadap anggaran belanja modal, sehingga dana alokasi umum merupakan salah satu alat bagi pemerintah pusat sebagai alat pemerataan pembangunan di Indonesia yang bertujuan untuk mengurangi ketimpangan dalam kebutuhan pembiayaan dan penguasaan pajak antara Pusat dan Daerah.
3. Pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum secara simultan berpengaruh terhadap anggaran belanja modal di Provinsi Sulawesi Utara. Dan pengaruh ini di tinjau dari koefisien determinasi di peroleh sekitar 91,4% sedangkan sisanya sebesar 8,6% dipengaruhi oleh faktor-faktor atau variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

### **Saran**

Setelah melakukan dan melihat hasil dari penelitian ini, maka penulis dapat memberikan beberapa saran. Adapun saran-saran tersebut adalah sebagai berikut :

1. Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara diharapkan perlu untuk memaksimalkan jumlah pendapatan asli daerah yang diperoleh dari berbagai unsur penerimaan daerah. Pemerintah Provinsi harus lebih giat lagi menggenjot sumber-sumber penerimaan daerah yang belum dioptimalkan sehingga bisa meningkatkan PAD.
2. Pengalokasian anggaran untuk belanja modal dari sektor dana alokasi umum (DAU) masih harus mendapat perhatian lebih dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, mengingat persentase peningkatan anggaran belanja modal yang bersumber dari dana alokasi umum masih sangat kecil bila dibandingkan dengan faktor-faktor pertumbuhan ekonomi lainnya.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdullah, Syukriy, 2004. *Perilaku Oportunistik Legislatif dalam Penganggaran Daerah: Pendekatan Principal-Agent Theory*. Makalah disajikan pada Seminar Antarbangsa di Universitas Bengkulu. Bengkulu. 4-5 Oktober 2004.
- Anggiat Situngkir, 2009. *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Anggaran belanja Modal di Kabupaten/kota Sumatra Utara*. Pasca Sarjana Universitas Sumatra Utara, Medan

- BAPPENAS. 2003. *Peta Kemampuan Keuangan Provinsi dalam Era Otonomi Daerah : Tinjauan Atas Kinerja PAD dan Upaya yang dilakukan Daerah*. Direktorat Jenderal Pengembangan Otonomi Daerah. Jakarta.
- Bastian Indra, 2002. *Sistem Akuntansi Sektor Publik*, buku satu, salemba empat, Jakarta.
- Departemen Keuangan RI. *Kebijakan Desentralisasi Fiskal dan Pengelolaan Keuangan Daerah*. 2009.
- Halim, Abdul. 2001. *Analisis Varian Atas Anggaran PAD pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia*.
- Halim, Abdul & Syukriy Abdullah. 2004. *Pengaruh Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Pemda: Studi Kasus Kabupaten dan Kota di Jawa dan Bali*. Jurnal Ekonomi STE.
- Irma Syafitri, 2009. *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran belanja Modal di Kabupaten/kota Sumatra Utara*. Universitas Sumatra Utara, Medan
- Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 29 Tahun 2002, tentang *Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah Serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah*.
- Kuncoro, Mudrajad, 2004. *Otonomi dan Pembangunan Daerah: Reformasi Perencanaan, Strategi dan Peluang*. Penerbit Erlangga. Jakarta.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 tentang *Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005, tentang *Dana Perimbangan atau Dana Alokasi Umum*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005, tentang *Sistem Informasi Keuangan Daerah*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, tentang *Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Prakosa, Kesit Bambang. 2004. *Analisa Pengaruh DAU dan PAD terhadap Prediksi Belanja Daerah (Studi Empirik di Provinsi Jawa Tengah dan DIY)* JAAI Vol. 8 N0. 2. 101-118.
- Saragih, Juli panglima, 2003. *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam otonomi*. Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta
- Sugiyono, 2004. *Metode Penelitian Bisnis*, Penerbit Alfabeta, Bandung.
- Undang-Undang RI No. 22 tahun 1999 tentang *Pemerintah Daerah*.
- No. 25 Tahun 1999 tentang *Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah*.
- No. 32 Tahun 2004 tentang *Pemerintah Daerah*.
- No. 33 Tahun 2004 tentang *Perimbangan Keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah*. Departemen Komunikasi dan Informatika. Jakarta.
- No. 28 Tahun 2009 tentang *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*.

